

**ANALISIS INTERAKSI ANTARA KREDIT PERBANKAN
DAN SEKTOR UNGGULAN TAHUN 2001 – 2007
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
JAWA BARAT, JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR**



TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan
studi pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Universitas Indonesia

Oleh:

Dominica Fitri Masniari L.

NPM : 0606012384

**MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA**

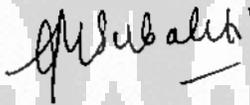
DEPOK, 2008

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Dominica Fitri Masniari Lumban Gaol
Tempat/tanggal lahir : Medan, 9 Agustus 1979
NPM : 0606012384
Judul Tesis : Analisis Interaksi Antara Kredit Perbankan dan Sektor Unggulan Tahun 2001-2007 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur

Depok, Juli 2008

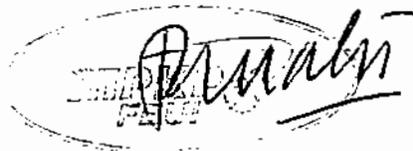
Menyetujui:
Pembimbing,



(Dr. Eugenia Mardanugraha)

Mengetahui:
Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Ketua Program Studi,



(Dr. B. Raksaka Mahi)
NIP. 131.932.199

ABSTRAK

Implementasi UU No. 22 dan 25 tahun 1999 menuntut kemandirian daerah baik dalam mengelola sumber pendapatan dan juga menggali sumber pembiayaan bagi pembangunan. Implikasi akibat adanya otonomi tersebut -mendorong setiap daerah mengembangkan sektor unggulan. Pengembangan sektor unggulan pada akhirnya dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit perbankan. Analisis interaksi antara perkembangan penyaluran kredit perbankan dan sektor unggulan menggunakan regresi data panel. Sementara analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa perkembangan sektor unggulan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan dan sebaliknya penyaluran kredit perbankan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sektor unggulan. Determinan lain yang signifikan memengaruhi dan paling elastis terhadap penyaluran kredit perbankan adalah Dana Pihak Ketiga, Jumlah Kantor Bank, Suku Bunga, Inflasi dan Rasio *Non Performing Loan*. Sementara determinan lain yang signifikan memengaruhi dan paling elastis terhadap perkembangan sektor unggulan adalah luas wilayah dan tenaga kerja.

Kata kunci : Kredit Perbankan, Sektor Unggulan, Metode Location Quotient (LQ), Regresi Data Panel.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul "Analisis Interaksi Antara Kredit Perbankan dan Sektor Unggulan Tahun 2001-2007 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur". Alasan penulis memilih topik ini karena sampai saat ini penyaluran kredit perbankan belum kembali ke kondisi terbaik seperti saat sebelum krisis. Topik mengenai peran kredit perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih hangat dibahas di berbagai kalangan baik akademisi maupun praktisi. Pendapat yang berkembang mengatakan bahwa penyaluran kredit perbankan dapat mendorong perkembangan sektor riil sehingga sebuah sektor berkembang menjadi sektor unggulan. Sebaliknya perkembangan sektor riil juga dapat mendorong perkembangan perbankan dan kredit perbankan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Eugenia Mardanugraha selaku Dosen Pembimbing yang tidak henti-hentinya membimbing dan memberi arahan tentang penulisan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kepada seluruh dosen dan pegawai Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia atas segala bantuan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh sebab itu penulis sangat menghargai segala kritik dan saran guna menyempurnakan kajian ini. Akhirnya penulis berharap hasil kajian ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan.

Jakarta, Juli 2008

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyusun tesis ini baik bantuan material dan spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis, yaitu:

1. Kedua orang tuaku di Medan, yang sangat kusayangi dan hormati. Tesis ini kudedikasikan untuk perjuangan kedua orangtuaku dalam menghantarkan kesuksesanku. Tesis ini juga kudedikasikan untuk orangtuaku kedua yang berada di Linggau, yang juga telah memberikan dorongan dan bantuan selama masa perkuliahanku.
2. Saudari-saudaraku yang ada di Medan, khususnya Kak Linda, Kak Donne, Adikku Ues, keluargaku yang ada di Jakarta, keluarga Inanguda dan keluarga Bang Felix, serta seluruh keluargaku yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan memberikan dorongan agar dapat menyelesaikan tesis dan kuliah saya.
3. Bapak Dr. Raksaka Mahi selaku ketua Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik dan seluruh jajaran pimpinan program MPKP.
4. Ibu Dr. Eugenia Mardanugraha selaku pembimbing tesis. Terima kasih atas segala bimbingan, dukungan dan kemurahan hati sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Hera dan Bapak Iman selaku ketua sidang dan dosen penguji tesis dan komprehensif. Terima kasih karena telah menjadi dosen penguji yang menyenangkan selama sidang.
6. Seluruh dosen dan karyawan Program MPKP yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa studi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi dan Bapak Iman yang telah memberikan kisi-kisi soal kompre pada saat kelas penyegaran. Khususnya kepada Mas Harris dan Mas Dedi, terima kasih karena selalu bersedia bersabar menunggu pengumpulan tugas "Miss Last Minute" sampai larut malam.

7. Buat Mgr. Aloysius Sudarso, Mgr. Situmorang, Rm. Afin, Bapak Thomas Handi, Bapak Yoke dan masyarakat Katolik Keuskupan Agung Palembang. Juga buat Bapak Hermanto, pimpinan Walubi Palembang. Terima kasih atas dukungan baik materiil dan spiritual yang telah diterima selama masa studi.
8. Buat Ibu dan Bapak di Yayasan Bhumiksara khususnya Ibu Bernadeth Setiadi dan Bapak Joko. Terima kasih atas masukan, dorongan dan bantuan selama saya mengikuti perkuliahan. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Cosmas Batubara yang juga telah memberikan bantuan kepada saya dalam perkuliahan.
9. Buat sahabat sejutiku, Erika, yang telah berbagi dalam suka dan duka khususnya saat penulisan tesis ini. Terima kasih atas bantuan, dorongan, dukungan, bahkan makian dan cacian ketika aku bermalas-malas.
10. Buat rekan-rekan Angkatan XV A Sore, terima kasih atas persahabatan, bantuan dan dukungan selama perkuliahan. Banyak hal yang dapat saya pelajari dari Ibu dan Bapak. Khusus buat Bapak Iman, Bapak Erik dan Bapak Dani, terima kasih atas waktu, bantuan, dukungan dan masukan-masukannya. Yang pasti, diskusi-diskusi yang kita lakukan di Bappeda dan beberapa tempat lain sangat membantu saya dalam proses studi ini. Dari Anda, saya belajar banyak hal terutama atas nilai kerendahan hati, persahabatan dan empati.
11. Buat rekan-rekan kekhususan perbankan, terima kasih atas suasana belajar yang sangat menyenangkan dan penuh persahabatan. Khusus kepada Bapak Fadhil dan Bapak Alfi, terima kasih atas data-data dan ilmu-ilmu perbankannya.
12. Buat petugas perpustakaan yang selalu saya kunjungi untuk meretas kebuntuan pikiran, baik perpustakaan MPKP, BI dan Freedom Institute. Terima kasih karena bersabar mengambil dan mengembalikan buku dan tesis selama di perpustakaan. Secara

khusus buat Ibu Rita dan Ibu Usmanti, terima kasih karena membantu dan memberi kemudahan selama di perpustakaan BI.

13. Buat rekan-rekan PP PMKRI, terima kasih karena mengizinkan saya berproses bersama dengan rekan-rekan di PP. Berkat kesempatan berproses di PP, saya akhirnya bisa sampai di MPKP. Buat rekan-rekan dan adik-adik di cabang Palembang, Lampung, Jakarta, Ambon, Kupang, Makasar dan cabang lain, terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan.
14. Buat teman-teman di Kantor Akuntan Publik, terima kasih karena telah bersabar dengan emosi dan uring-uringan saat tugas kantor dan kuliah lagi memuncak. Terima kasih secara khusus buat bang Liasta yang juga telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
15. Buat ibu, bapak dan rekan-rekan di Mitra ImaDei, ISKA, LG-ers, Bhumiksara RL Jakarta dan Rindang Banua. Terima kasih atas kebersamaan, dorongan dan nasehat yang saya terima selama 2 tahun tinggal di Jakarta. Anda semua adalah bapak, ibu dan saudara saya di Jakarta.

Semoga semua persahabatan, kepedulian, perhatian, masukan dan kritikan yang saya terima membuahkan limpahan rahmat bagi semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan pada setiap kesempatan.

Jakarta, Juli 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Permasalahan	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Hipotesa	9
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6. Metodologi Penelitian	9
1.6.1. Analisis Sektor Unggulan	10
1.6.2. Analisis Interaksi Kredit Perbankan terhadap Sektor Perbankan	10
1.7. Kerangka Berpikir Penelitian	11
1.8. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1. Definisi dan Fungsi Bank dalam Perekonomian ...	14
2.2. Intermediasi Bank: Permintaan dan Penawaran Kredit	15
2.3. Kredit Perbankan	17
2.3.1. Pengertian Kredit	17

2.3.2. Unsur Kredit	19
2.3.3. Tujuan Kredit	20
2.3.4. Fungsi Kredit	21
2.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	22
2.5. Metode Penentuan Keunggulan Daerah	26
2.5.1. Analisis Struktur Ekonomi	26
2.5.2. Analisis Pertumbuhan Ekonomi	27
2.5.3. Analisis Location Quotient (LQ)	28
2.6. Hubungan Kredit Perbankan dengan Sektor Unggulan	30
2.7. Penelitian Terdahulu	30
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH	34
3.1. Provinsi DKI Jakarta	34
3.2. Provinsi Jawa Barat	36
3.3. Provinsi Jawa Tengah	39
3.4. Provinsi Jawa Timur	42
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	45
4.1. Sumber dan Karakteristik Data	45
4.2. Spesifikasi Model	50
4.3. Teknik Estimasi Regresi Majemuk Panel Data	57
4.3.1. Metode <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)	58
4.3.2. Metode Efek Tetap (<i>Fixed Effect</i>)	59
4.3.3. Metode Efek Random (<i>Random Effect</i>)	60
4.4. Uji Statistika	61
4.4.1. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji-t)	62
4.4.2. Uji Kebaikan Model (<i>Goodness of fit</i>)	62
4.4.3. Pengujian Model Secara Keseluruhan (Uji-F)	63
4.5. Pengujian Asumsi OLS	64
4.5.1. Multikolinearitas	64

4.5.2. Heteroskedastisitas	65
4.5.3. Autokorelasi	66
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	67
5.1. Hasil	67
5.1.1. Pemilihan Model Terbaik	67
5.1.2. Hasil Regresi Panel Data	68
5.1.3. Evaluasi Hasil Regresi Panel Data	69
5.1.4. Pengujian Pelanggaran Asumsi	75
5.2. Analisis Interaksi Kredit Perbankan dan Sektor Unggulan	76
5.2.1. Provinsi DKI Jakarta	77
5.2.2. Provinsi Jawa Barat	84
5.2.3. Propinsi Jawa Tengah	88
5.2.4. Propinsi Jawa Timur	92
5.3. Implikasi Kebijakan	96
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	103
6.1. Kesimpulan	103
6.2. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 3.1. Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan DKI Jakarta ...	35
Tabel. 3.2. Distribusi sektor ekonomi PDRB DKI Jakarta	35
Tabel. 3.3. Perhitungan Location Quotient DKI Jakarta	36
Tabel. 3.4. Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Jawa Barat	37
Tabel. 3.5. Distribusi sektor ekonomi PDRB Jawa Barat	38
Tabel. 3.6. Perhitungan Location Quotient Jawa Barat	39
Tabel. 3.7. Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Jawa Tengah	40
Tabel. 3.8. Distribusi sektor ekonomi PDRB Jawa Tengah	41
Tabel. 3.9. Perhitungan Location Quotient Jawa Tengah	42
Tabel. 3.10. Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Jawa Timur	42
Tabel. 3.11. Distribusi sektor ekonomi PDRB Jawa Timur	43
Tabel. 3.12. Perhitungan Location Quotient Jawa Timur	44
Tabel. 4.1. Sumber dan Karakteristik Data	49
Tabel. 4.2. Dugaan Tanda koefisien	56
Tabel. 5.1. Hasil estimasi panel data persamaan (4.4.)	68
Tabel. 5.2. Hasil estimasi panel data persamaan (4.5.)	69

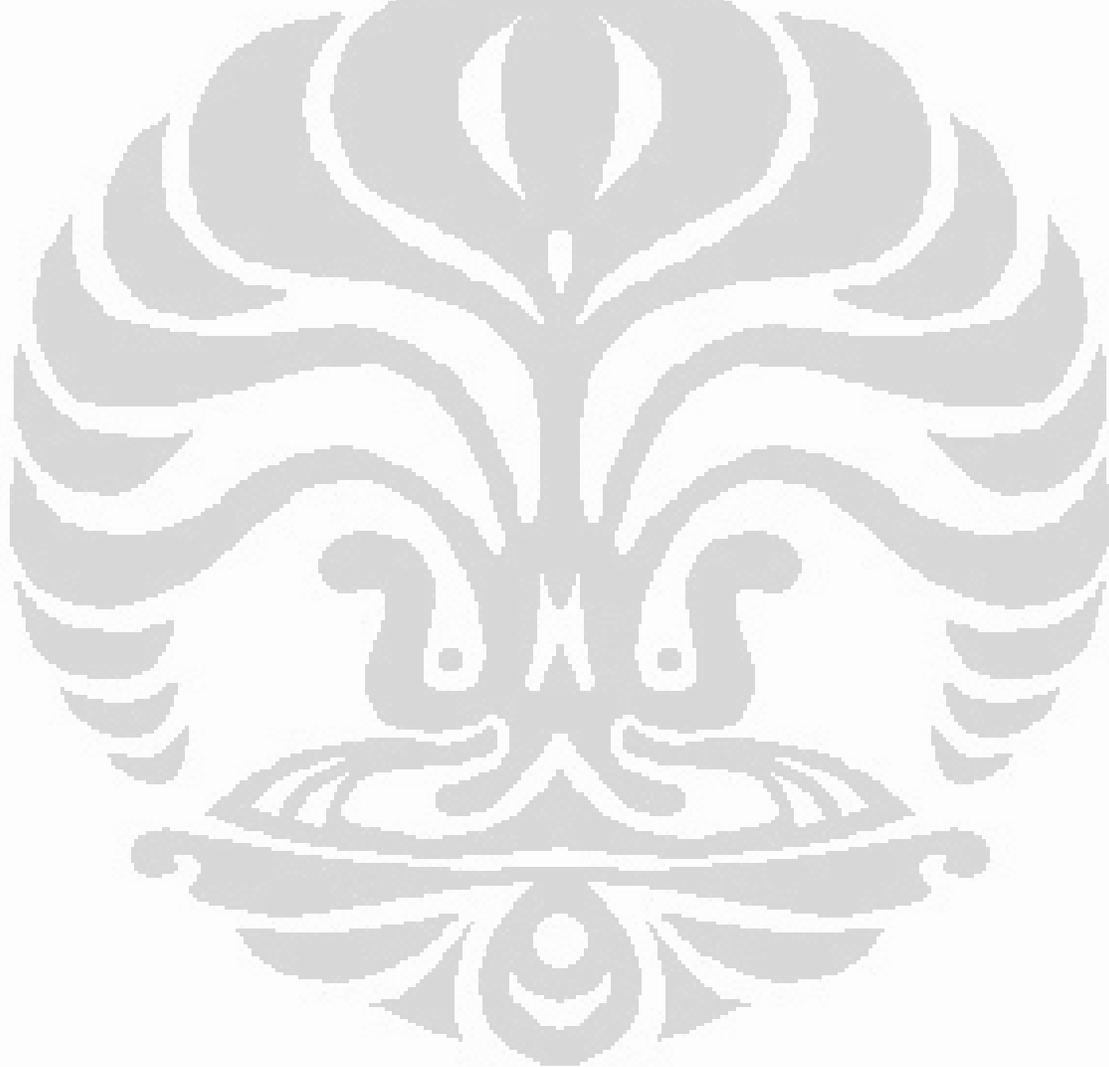
DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik. 1.1. Perkembangan Aset Lembaga Keuangan (Persen)	2
Grafik. 1.2. Perkembangan Aset, Dana dan Kredit Perbankan Nasional (Triliun Rupiah)	3
Grafik. 1.3. Perkembangan LDR dan NPL Perbankan Nasional (Persen)	3
Grafik. 1.4. Perkembangan pangsa PDRB (Persen)	6
Grafik. 1.5. Perkembangan pangsa kredit (Persen)	6
Grafik. 5.1. Perkembangan Kredit Bank Umum DKI Jakarta per Sektor Ekonomi (Triliun Rupiah)	77
Grafik. 5.2. Hubungan Pertumbuhan Kredit dan Inflasi DKI Jakarta (Persen)	78
Grafik. 5.3. Perkembangan Aset, DPK dan Kredit Bank Umum DKI Jakarta (Triliun Rupiah)	80
Grafik. 5.4. Perkembangan LDR dan RNPL Bank Umum DKI Jakarta (Persen)	80
Grafik. 5.5. Perkembangan SBI Nasional (Triliun Rupiah)	82
Grafik. 5.6. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja DKI Sektor Unggulan Jakarta (ribu jiwa)	83
Grafik. 5.7. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja DKI Jakarta Berdasarkan Pendidikan (ribu jiwa)	84
Grafik. 5.8. Perkembangan Kredit Bank Umum Jawa Barat per Sektor Ekonomi (Triliun Rupiah)	84
Grafik. 5.9. Hubungan Pertumbuhan Kredit dan Inflasi Jawa Barat (Persen)	85
Grafik. 5.10. Perkembangan Aset, DPK dan Kredit Bank Umum Jawa Barat (Triliun Rupiah)	86
Grafik. 5.11. Perkembangan LDR dan RNPL Bank Umum Jawa Barat (Persen)	87

Grafik. 5.12. Perkembangan Jumlah Tenaga Sektor Unggulan Jawa Barat (ribu jiwa)	88
Grafik. 5.13. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Jawa Barat Jakarta Berdasarkan Pendidikan (ribu jiwa)	88
Grafik. 5.14. Perkembangan Kredit Bank Umum Jawa Tengah per Sektor Ekonomi (Triliun Rupiah)	89
Grafik. 5.15. Hubungan pertumbuhan kredit dan Inflasi Jawa Tengah (Persen)	89
Grafik. 5.16. Perkembangan Aset, DPK dan Kredit Bank Umum Jawa Tengah (Triliun Rupiah)	90
Grafik. 5.17. Perkembangan LDR dan RNPL Bank Umum Jawa Tengah (Persen)	90
Grafik. 5.18. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Unggulan Jawa Tengah (ribu jiwa)	91
Grafik. 5.19. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Jawa Tengah Jakarta Berdasarkan Pendidikan (ribu jiwa)	91
Grafik. 5.20. Perkembangan Kredit Bank Umum Jawa Timur per Sektor Ekonomi (Triliun Rupiah)	92
Grafik. 5.21. Hubungan pertumbuhan kredit dan Inflasi Jawa Timur (Persen)	93
Grafik. 5.22. Perkembangan Aset, DPK dan Kredit Bank Umum Jawa Timur (Triliun Rupiah)	94
Grafik. 5.23. Perkembangan LDR dan RNPL Bank Umum Jawa Timur (Persen)	94
Grafik. 5.24. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Unggulan Jawa Timur (ribu jiwa)	95
Grafik. 5.25. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Jawa Timur Jakarta Berdasarkan Pendidikan (ribu jiwa)	96
Grafik. 5.26. Perkembangan suku bunga kredit (Persen)	98

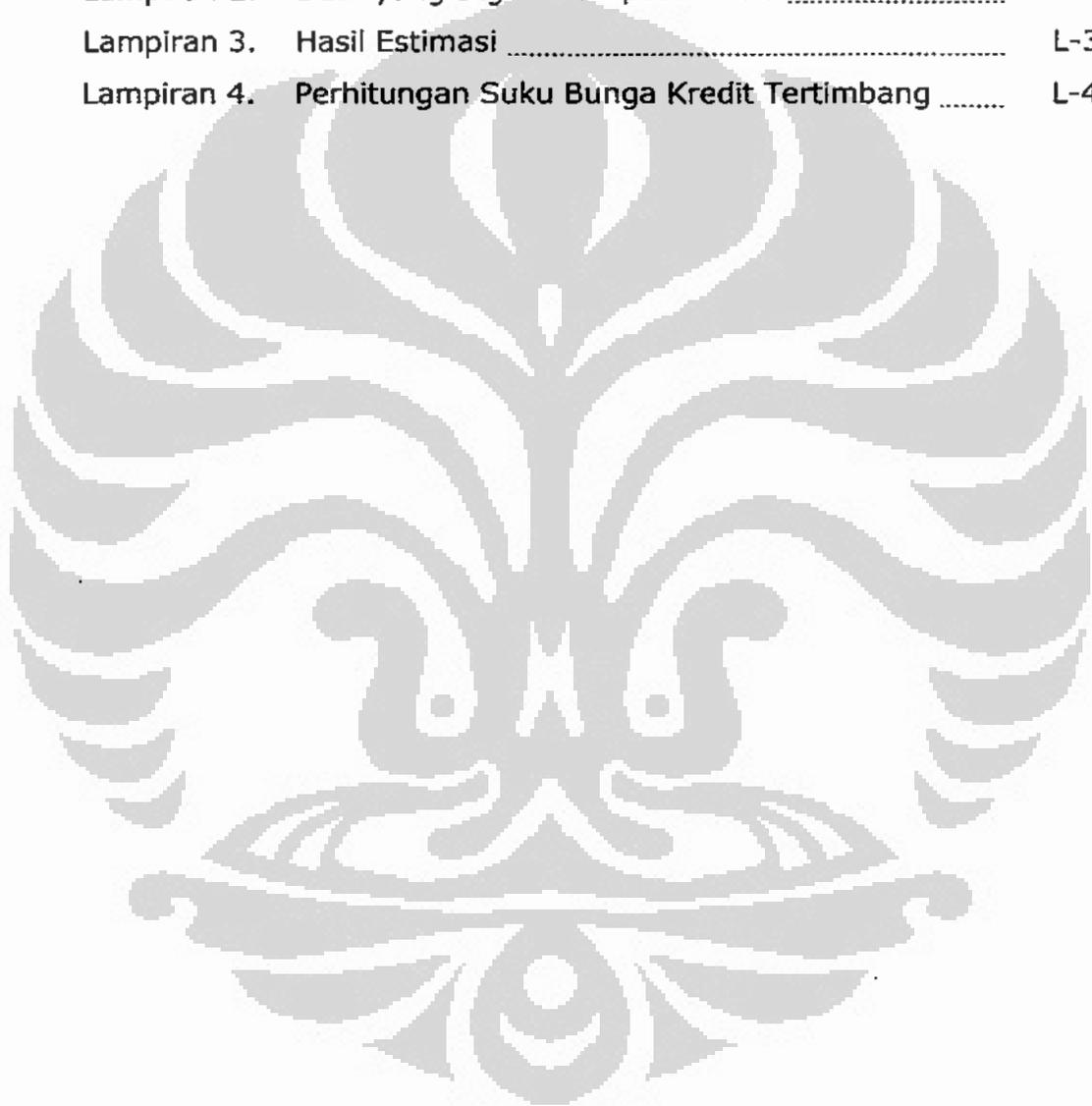
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar. 1.1. Kerangka Berpikir Penelitian	11
Gambar. 2.1. Sumber-sumber Pertumbuhan Regional: Perspektif Neoklasik	25



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Perhitungan Location Quotient	L-1.1
Lampiran 2. Data yang Digunakan pada Tesis	L-2.1
Lampiran 3. Hasil Estimasi	L-3.1
Lampiran 4. Perhitungan Suku Bunga Kredit Tertimbang	L-4.1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

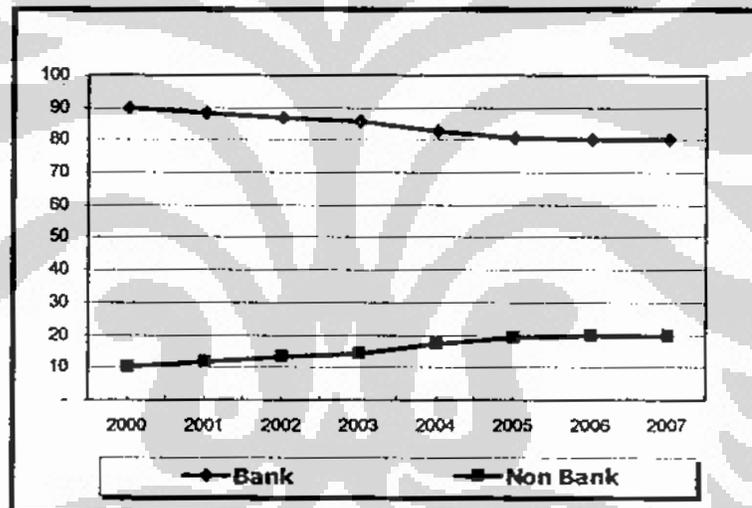
Pemberlakuan Otonomi Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menyebabkan perubahan yang sangat mendasar dalam tata kelola pemerintahan khususnya pemerintah daerah. Setelah era otonomi, setiap daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk membuat perencanaan daerah misalnya perencanaan pembangunan dan pemanfaatan potensi wilayah secara optimal demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Setiap daerah juga bertanggung jawab untuk memperoleh sumber pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Artinya selain penerimaan yang diperoleh dari pusat, daerah juga harus mampu memperoleh pembiayaan dari sumber lain dalam proses pembangunan.

Salah satu permasalahan utama penerapan otonomi daerah adalah keterbatasan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Keterbatasan ini tidak saja terjadi di daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam tetapi juga terjadi di daerah yang kaya akan sumber daya alam karena pemerintah daerah belum mengoptimalkan semua potensi penerimaan daerah. Selain itu perimbangan keuangan ternyata memunculkan permasalahan baru pada persentase alokasi sumber dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pada kondisi terjadinya keterbatasan sumber-sumber penerimaan tersebut, maka akan sulit untuk mengharapkan pemerintah daerah dapat memainkan peranannya sebagai pendorong utama pembangunan di daerah secara optimal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sangat mengharapkan adanya alternatif sumber pembiayaan lain. Alternatif sumber pembiayaan dapat diberikan oleh

lembaga keuangan bank melalui kredit perbankan dan lembaga keuangan non bank melalui penerbitan saham (*equities*) di pasar modal, penerbitan obligasi (*bonds*), pembiayaan dari perusahaan *leasing* atau *multi finance* dan pembiayaan dari pegadaian.

Dari berbagai lembaga keuangan yang ada di Indonesia, preferensi masyarakat masih diarahkan pada perbankan. Salah satu fakta yang dapat menunjukkan preferensi tersebut adalah adanya dominasi perbankan dalam sektor keuangan. Dari sisi asset, lembaga keuangan bank selalu menguasai sebagian besar pangsa pasar setiap tahun, rata-rata diatas 80% (grafik 1.1.).

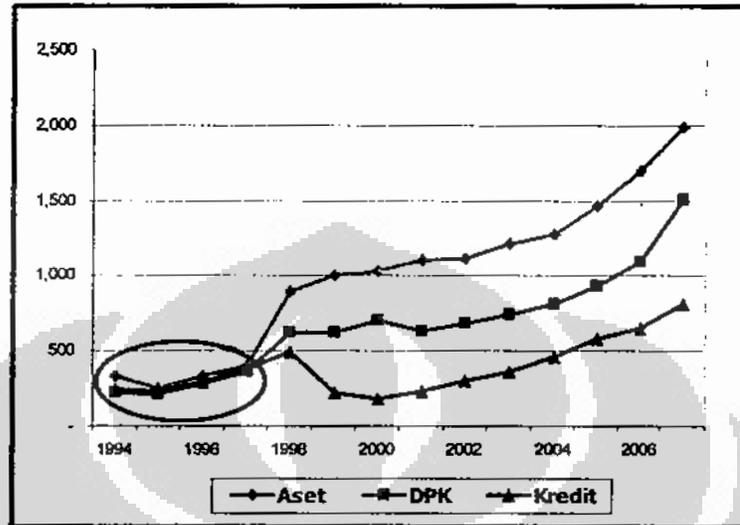
Grafik 1.1. Perkembangan Aset Lembaga Keuangan (Persen)



Sumber: Bank Indonesia

Penguasaan sebagian besar pangsa pasar tidak otomatis menunjukkan membaiknya kinerja perbankan sebagai lembaga intermediasi. Setelah krisis yang melanda perbankan, berbagai upaya restrukturisasi telah dilakukan untuk mengoptimalkan peran perbankan dalam perekonomian. Usaha tersebut mulai menunjukkan hasil sejak tahun 2000, yang dapat dilihat dari peningkatan aset, penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit. (Grafik 1.2.).

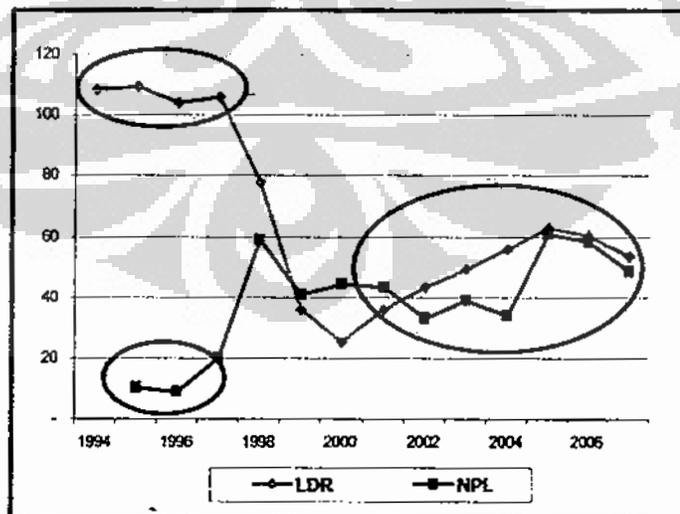
Grafik 1.2. Perkembangan Aset, DPK dan Kredit Perbankan Nasional (triliun rupiah)



Sumber: Bank Indonesia

Kredit bermasalah yang mencapai 60% juga mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2000. Walaupun sempat naik pada tahun 2006, tetapi Rasio *Non-Performing Loan* (RNPL) kembali mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2007 (Grafik 1.3.).

Grafik 1.3. Perkembangan LDR dan NPL Perbankan Nasional (Persen)



Sumber: Bank Indonesia

Walaupun mengalami kemajuan dari aspek kinerja dan intermediasi, grafik diatas menunjukkan bahwa fungsi perbankan masih belum kembali ke posisi terbaik seperti saat sebelum krisis. Padahal secara teori, perbankan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan upaya pembangunan melalui fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan media transmisi kebijakan moneter. Perbankan melalui kreditnya menjadi salah satu determinan penting bagi keberhasilan proses pembangunan yang kemudian dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sementara perbankan sendiri sangat membutuhkan optimalisasi penyaluran kredit pada fase restrukturisasi saat ini. Sebagai sebuah industri, perbankan akan memperoleh pendapatan dari penyaluran kredit. Pendapatan tersebut akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha perbankan.

Melihat fungsi intermediasi yang sangat krusial tersebut, perbankan tidak seharusnya mengurangi penyaluran kreditnya. Lantas, apa yang menyebabkan perbankan tidak optimal menjalankan fungsinya untuk menyalurkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*idle fund/surplus unit*) kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*)?

Dari sisi perbankan, rasionalisasi rendahnya penyaluran kredit adalah adanya pengalaman buruk sektor perbankan pada saat krisis. Sementara itu kondisi ekonomi dan sektor riil yang masih sangat fluktuatif juga menjadi penyebab rendahnya penyaluran kredit. Pada kondisi ekonomi dan sektor riil yang belum stabil, resiko yang dihadapi perbankan akan semakin besar karena kemungkinan terjadinya *moral hazard* juga semakin besar. Peningkatan resiko ini menyebabkan perbankan juga meningkatkan kehati-hatian (*prudential*) untuk menyalurkan dananya kepada sektor riil.

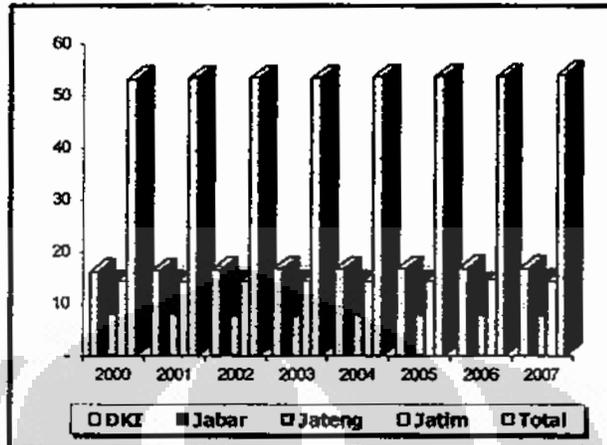
Pada dasarnya persepsi tingginya resiko dapat dinetralisir oleh perbankan dengan menyalurkan kredit kepada sektor-sektor unggulan dengan rasionalisasi bahwa sektor unggulan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengembalikan kredit. Kecenderungan ini mulai terlihat di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya, pangsa terbesar

dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta berasal dari sektor keuangan dan persewaan dimana kredit terbesar di provinsi ini juga disalurkan pada sektor keuangan. Hal yang sama juga terjadi pada provinsi lain yang memiliki jumlah PDRB besar misalnya Jawa Barat. Proporsi terbesar dalam PDRB Jawa Barat berasal dari sektor industri yang juga memperoleh kredit paling besar dari perbankan.

Perilaku perbankan yang memberikan prioritas penyaluran kredit pada sektor-sektor unggulan menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah harus berusaha maksimal menampilkan strategi pembangunan ekonomi yang berfokus pada pengembangan dan pembangunan sumber daya ekonomi serta pengembangan sektor unggulan (*resource best strategy*). Strategi yang tepat akan meningkatkan kinerja perekonomian yang tentu saja akan menjadi stimulus bagi perbankan untuk menyalurkan kredit.

Pada era otonomi daerah, peran dan tanggung jawab pemerintah daerah menjadi sangat dominan. Pada dasarnya otonomi daerah bertujuan untuk memberdayakan daerah dan masyarakatnya, sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola sumber daya secara optimal berdasarkan kondisi daerah. Peran daerah yang sangat besar di era otonomi daerah mendorong penulis tertarik untuk meneliti interaksi perbankan dengan sektor unggulan pada tingkat daerah. Daerah yang dipilih dalam penelitian ini adalah provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur karena keempat daerah tersebut memberikan distribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Total PDRB keempat provinsi ini setiap tahunnya selalu lebih dari 50% menyumbang pada PDB (Grafik 1.4.).

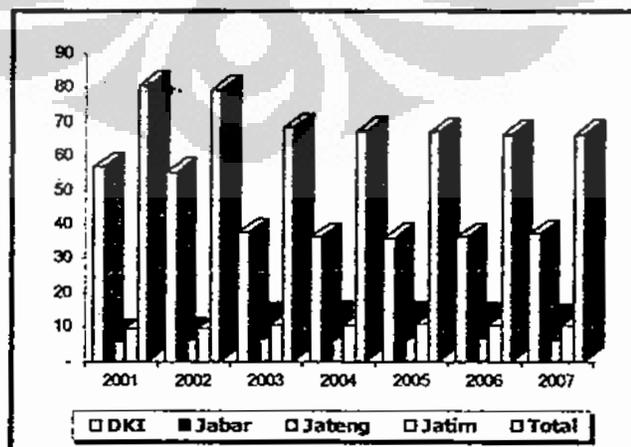
Grafik 1.4. Perkembangan Pangsa PDRB (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara komposisi kredit perbankan juga memperlihatkan bahwa daerah yang paling besar menerima pembiayaan dari kredit perbankan adalah keempat daerah tersebut. Grafik 1.5. menunjukkan bahwa kredit pada provinsi DKI Jakarta mencapai 80,65% pada tahun 2001. Jumlah tersebut terus menurun menjadi 66,46% pada tahun 2007. Ketika penyaluran kredit di provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan, ternyata penyaluran kredit pada provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan mulai memperluas area pelayanannya ke daerah-daerah. Perbankan juga telah menangkap potensi daerah yang terus berkembang setelah otonomi daerah sehingga sangat membutuhkan pembiayaan dari perbankan.

Grafik 1.5. Perkembangan Pangsa Kredit Perbankan (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti ingin melihat bagaimana interaksi antara kredit perbankan terhadap sektor unggulan provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur? Apakah kredit yang disalurkan perbankan memberikan pengaruh signifikan terhadap perkembangan suatu sektor sehingga dapat menjadi sektor unggulan di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur? Sebaliknya apakah perkembangan sektor unggulan melalui peningkatan output memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan penyaluran kredit perbankan? Oleh karena itu penulis ingin melakukan **ANALISIS INTERAKSI ANTARA KREDIT PERBANKAN DAN SEKTOR UNGGULAN TAHUN 2001 – 2007 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, JAWA BARAT, JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR.**

1.2. Identifikasi Permasalahan

Peran perbankan sebagai lembaga intermediasi telah menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari naiknya jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan. Tetapi perbaikan tersebut masih belum optimal karena dunia perbankan memiliki persepsi resiko yang tinggi atas penyaluran kredit terhadap dunia usaha. Persepsi ini muncul karena pasca krisis tahun 1997 kondisi perekonomian dan sektor riil masih belum stabil.

Pada era otonomi daerah, setiap daerah akan berusaha meningkatkan produktivitas seluruh sektor-sektor ekonomi. Sektor-sektor unggulan akan semakin dioptimalkan sementara sektor lain akan dipacu pertumbuhannya agar juga menjadi sektor unggulan di daerah. Dengan optimalisasi sektor-sektor tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat sehingga kepercayaan perbankan untuk menyalurkan dananya akan semakin besar.

Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah membutuhkan sumber pembiayaan. Ada beberapa alternatif sumber pembiayaan tetapi preferensi masyarakat cenderung ke perbankan. Ketika kebutuhan pembiayaan perbankan semakin tinggi, perbankan

justru mengurangi penyaluran kreditnya karena kondisi perekonomian yang kurang stabil. Perbankan memilih menyalurkan dana kepada sektor-sektor yang kinerjanya baik untuk menjamin pengembalian dana yang telah disalurkan. Padahal melihat fungsinya yang sangat penting perbankan diharapkan dapat menyalurkan dananya kepada seluruh sektor sehingga kinerja sektor tersebut juga meningkat.

Dari latar belakang masalah penyaluran kredit perbankan yang ada di daerah, masalah dalam penelitian ini adalah interaksi antara kredit yang disalurkan perbankan terhadap sektor unggulan provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apakah kredit perbankan menjadi stimulus untuk pertumbuhan sektor di keempat provinsi sehingga sektor tersebut memperoleh tambahan sumber pembiayaan untuk menjadi salah satu sektor unggulan? Atau justru sebaliknya kredit perbankan meningkat ketika terjadi peningkatan output suatu sektor unggulan. Sehingga dapat diketahui apakah penyaluran kredit perbankan dipengaruhi oleh output sektor unggulan provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sektor-sektor unggulan di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan apakah sektor unggulan telah menjadi prioritas bagi penyaluran kredit perbankan pada provinsi tersebut?
2. Mengetahui interaksi antara kredit perbankan dan sektor-sektor unggulan di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apakah penyaluran kredit perbankan meningkat ketika terjadi peningkatan output sektor-sektor unggulan di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, atau sebaliknya penyaluran kredit perbankan dapat mendorong output suatu sektor tumbuh menjadi sektor unggulan.

1.4. Hipotesa

Hipotesa untuk kredit yang diberikan perbankan pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah:

- a. Sektor unggulan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kredit perbankan. Ketika output sektor unggulan di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur meningkat, maka penyaluran kredit perbankan akan meningkat.
- b. Kredit perbankan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sektor unggulan di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketika penyaluran kredit perbankan meningkat maka output sektor unggulan juga akan meningkat.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan fokus pada ruang lingkup provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemilihan daerah dilakukan karena provinsi tersebut memberikan proporsi terbesar dalam PDB. Total PDRB keempat provinsi menyumbang lebih lebih dari 50% dari total PDB. Total PDRB juga mengalami peningkatan yang pesat pada keempat provinsi. Pemilihan daerah juga dilatarbelakangi oleh komposisi penyaluran kredit dimana keempat provinsi ini merupakan daerah yang paling besar menerima penyaluran kredit perbankan.

Penelitian ini dilakukan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007. Restrukturisasi perbankan pada dasarnya mulai menunjukkan hasil sejak tahun 2000, tetapi stabilitas perkembangan perbankan mulai terlihat sejak tahun 2001.

1.6. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian akan dijelaskan lebih lanjut pada bab tersendiri yaitu bab IV. Tetapi secara garis besar, berdasarkan tujuan

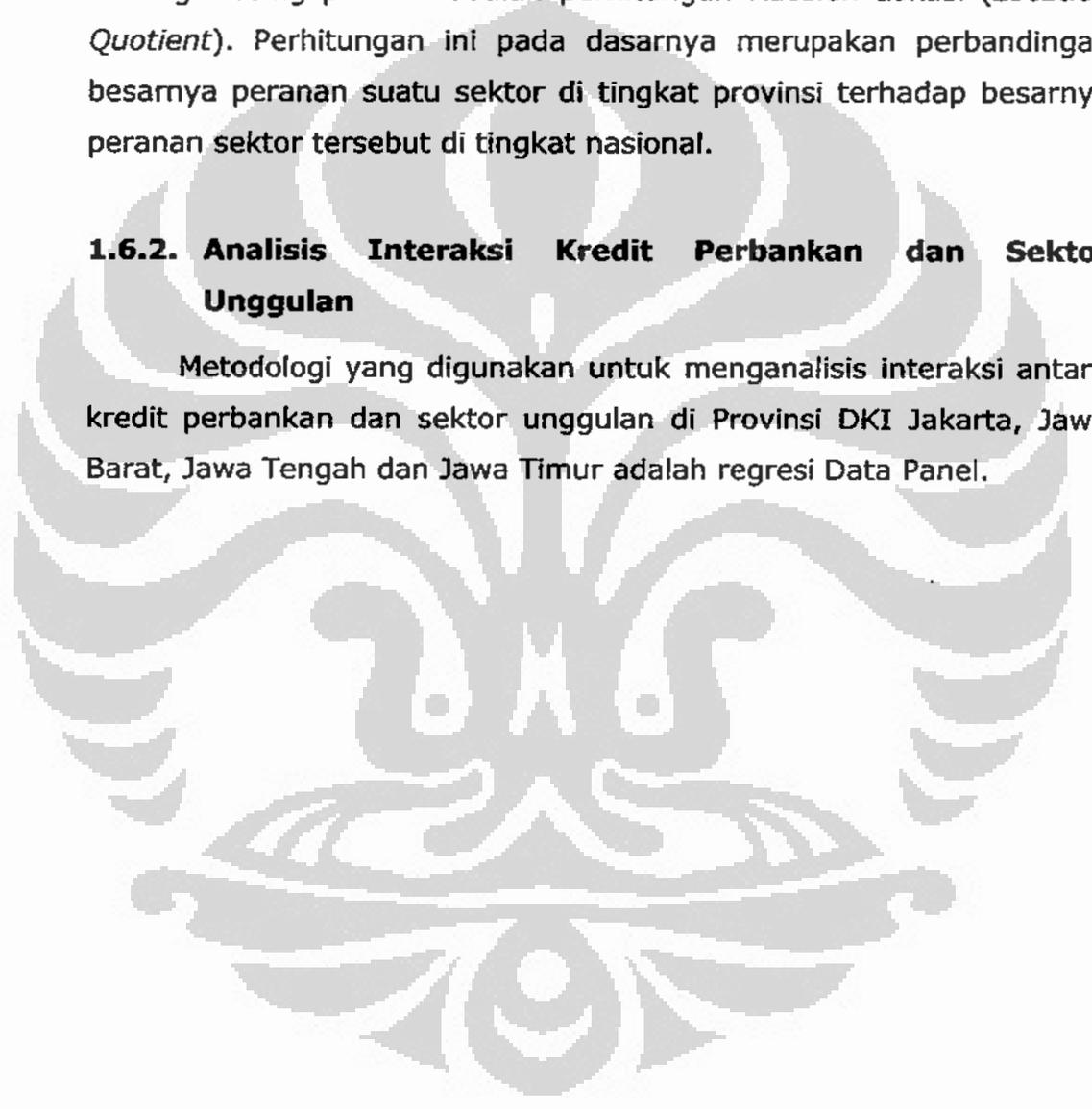
penelitian, maka analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu:

1.6.1. Analisis Sektor Unggulan

Analisa yang akan digunakan untuk melihat sektor unggulan masing-masing provinsi adalah perhitungan Kuosien Lokasi (*Location Quotient*). Perhitungan ini pada dasarnya merupakan perbandingan besarnya peranan suatu sektor di tingkat provinsi terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat nasional.

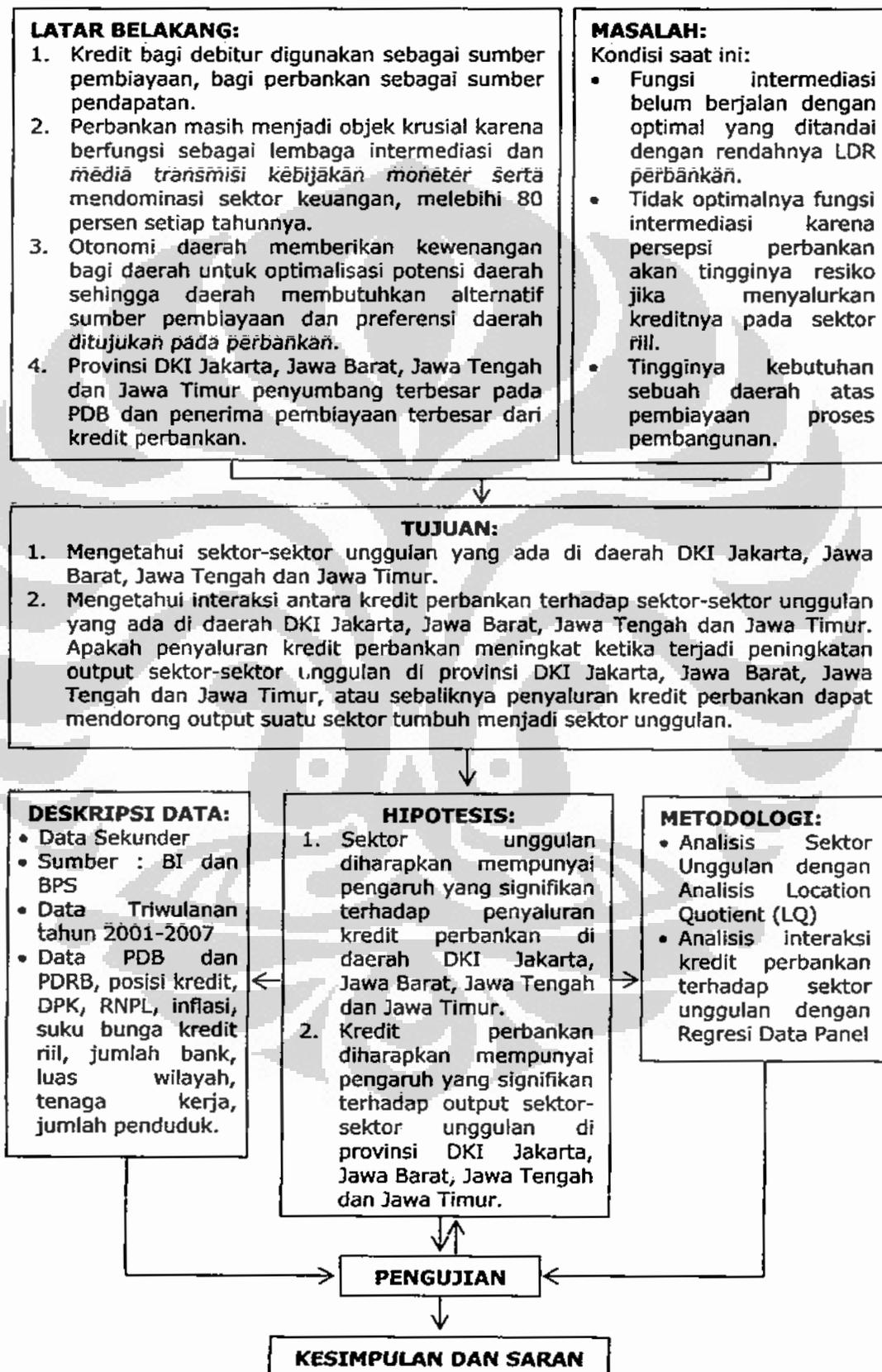
1.6.2. Analisis Interaksi Kredit Perbankan dan Sektor Unggulan

Metodologi yang digunakan untuk menganalisis interaksi antara kredit perbankan dan sektor unggulan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah regresi Data Panel.



1.7. Kerangka Berpikir Penelitian

Gambar. 1.1. Kerangka Berpikir Penelitian



1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah melihat dan memahami kerangka rencana penulisan tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, hipotesis, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, kerangka berpikir penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II KERANGKA TEORITIS

Bab ini memaparkan tinjauan literatur yang relevan dengan topik penelitian, meliputi defenisi dan fungsi bank dalam perekonomian, intermediasi bank, kredit perbankan, teori pertumbuhan ekonomi wilayah, metode penentuan keunggulan daerah dan hubungan kredit perbankan dengan sektor unggulan. Bab ini juga akan memaparkan penelitian terdahulu tentang kredit perbankan misalnya tentang intermediasi perbankan, penawaran dan permintaan kredit dan fenomena *credit crunch* di Indonesia.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang analisis yang digunakan meliputi analisis Location Quotient dan Analisis Regresi. Analisis regresi mencakup sumber dan karakteristik data, spesifikasi model, teknik estimasi regresi majemuk panel data, uji statistika dan pengujian asumsi *Ordinary Least Square (OLS)*.

Bab IV GAMBARAN UMUM WILAYAH

Bab ini akan memberikan deskripsi tentang gambaran umum wilayah dan pertumbuhan ekonomi provinsi di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hasil perhitungan LQ dan analisisnya dijelaskan dalam bab ini. Sementara analisis deskriptif terhadap

penyaluran kredit perbankan pada keempat provinsi juga akan dijelaskan dalam bab ini.

Bab V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil dan pembahasan atas hasil regresi. Tahapan-tahapan dalam analisis regresi akan dilakukan pada bab ini misalnya pemeriksaan terhadap pelanggaran asumsi multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Eksplorasi lebih lanjut juga akan dilakukan terhadap variabel-variabel yang berpengaruh signifikan dalam model pada keempat provinsi.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memberikan kesimpulan atas penelitian dan memberikan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian. Saran tersebut berupa saran kebijakan yang diharapkan memberikan kontribusi bagi para pengambil kebijakan publik terutama yang berkenaan dengan penyaluran kredit perbankan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Definisi dan Fungsi Bank dalam Perekonomian

Keberadaan Bank dalam perekonomian merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari karena bank telah menyentuh seluruh kehidupan masyarakat. Pada tingkat yang lebih makro, bank juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sebuah negara.

Pada kamus besar Bahasa Indonesia, bank didefinisikan sebagai badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹ Sementara dalam undang-undang, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Definisi perbankan telah mendeskripsikan bahwa bank merupakan bagian dari lembaga keuangan yang berfungsi menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana (penyimpan dana atau kreditur) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam dana atau debitur). Usaha perantara tersebut menjadi landasan bagi bank untuk disebut sebagai lembaga intermediasi.

Selain sebagai lembaga intermediasi, bank juga berfungsi dalam lalu lintas pembayaran. Bank dibutuhkan dalam masyarakat untuk memperlancar aktivitas pembayaran. Sistem pembayaran melalui jasa bank pada dasarnya mampu memperkecil biaya transaksi sehingga memberikan nilai tambah yang lebih besar dalam perekonomian.

1 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005, Jakarta, hal. 103

2 *Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan*

Fungsi selanjutnya dari bank adalah sebagai media dalam mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral. Kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain dilakukan dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan atau menentukan tingkat suku bunga. Hampir seluruh proses perputaran uang dalam perekonomian berlangsung melalui bank karena dalam upaya menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan pelayanan sistem pembayaran, bank berperan dalam menciptakan uang berupa uang giral dan uang kuasi. Dalam konteks inilah mekanisme transmisi kebijakan moneter dari bank sentral ke perbankan dan selanjutnya ke perekonomian dapat berjalan.

2.2. Intermediasi Bank: Permintaan dan Penawaran Kredit

Salah satu jasa yang diberikan perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya adalah penyaluran kredit. Seperti halnya pasar komoditas, pasar kredit juga terjadi karena adanya penawaran dan permintaan kredit dimana pihak yang mengalami surplus dana akan memberikan penawaran sementara pihak yang mengalami defisit dana akan mengajukan permintaan.

Secara makro, dari sisi permintaan (*demand side*), penyaluran kredit dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian dan suku bunga kredit. Ketika aktivitas perekonomian meningkat permintaan terhadap kredit akan meningkat. Sebaliknya jika perekonomian melemah, permintaan terhadap kredit juga akan mengalami penurunan. Sementara untuk suku bunga, jika suku bunga meningkat, maka permintaan terhadap kredit akan menurun karena bagi debitur kredit adalah biaya yang harus ditanggung atas fasilitas kredit yang digunakan. Sebaliknya ketika suku bunga turun, maka permintaan kredit justru akan meningkat.

Dari sisi penawaran (*supply side*), penyaluran kredit dipengaruhi oleh dua hal yaitu pertama, kemampuan bank untuk menyalurkan kredit. Kemampuan mengandung arti bahwa kredit yang disalurkan

sangat tergantung pada kondisi internal bank, yang mencakup kualitas aset perbankan, dana pihak ketiga, rasio non performing loan, permodalan, jaringan kantor bank, tingkat efisiensi bank berupa pengelolaan biaya operasional (BOPO) dan ketersediaan dana untuk disalurkan (*loanable fund*). Ketika kualitas aset perbankan baik, dana pihak ketiga besar, permodalan juga baik, dan jaringan kantor bank luas, maka penawaran kredit perbankan cenderung meningkat. Sebaliknya ketika elemen diatas kecil atau melemah, maka penawaran juga cenderung menurun. Berbeda halnya dengan *non performing loan* (NPL), penawaran kredit perbankan justru berbanding terbalik dengan rasio *non performing loan*. Artinya penawaran kredit akan menurun jika rasio *non performing loan* meningkat dan akan meningkat jika rasio tersebut turun.

Faktor kedua yang memengaruhi penawaran kredit adalah kemauan sebuah bank. Dalam hal ini bank akan merealisasikan kreditnya jika kondisi-kondisi tertentu telah terpenuhi. Oleh karena itu kemauan tersebut cenderung merupakan faktor eksternal meliputi pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat suku bunga dan tingkat inflasi. Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, perbankan akan meningkatkan penawaran kreditnya dengan rasionalisasi bahwa kredit yang disalurkan akan kembali seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Ketika suku bunga meningkat, perbankan juga akan meningkatkan penawaran kreditnya dengan harapan bahwa insentif bunga yang didapatkan akan semakin besar demi kelangsungan hidup perbankan tersebut. Berbeda halnya dengan inflasi, justru ketika tingkat inflasi tinggi, bank akan menurunkan penawaran kredit karena inflasi akan memacu peningkatan harga-harga sehingga debitur diprediksi akan kesulitan untuk mengembalikan kredit. Sementara jika pertumbuhan ekonomi melambat, suku bunga rendah dan inflasi tinggi, perbankan akan sangat mempertimbangkan penawaran kreditnya demi memperkecil resiko.

2.3. Kredit Perbankan

Kegiatan produksi, investasi dan konsumsi oleh masyarakat dan pemerintah pada umumnya membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan tersebut. Semakin tinggi aktivitas ekonomi sebuah negara atau suatu daerah maka kebutuhan akan pembiayaan akan semakin besar. Tetapi kebutuhan dana tersebut tidak selalu dapat dipenuhi. Dalam kondisi ini, peranan kredit perbankan menjadi sangat krusial bagi keberlanjutan usaha masyarakat dan pemerintah. Semakin tinggi aktivitas ekonomi dan pembangunan, kebutuhan kredit perbankan juga akan semakin tinggi. Maka dana yang diperlukan bagi aktivitas ekonomi dalam hal ini kredit perbankan dapat disebut juga sebagai faktor produksi yang sejajar dengan faktor-faktor produksi lain seperti sumber tenaga kerja, peralatan mesin-mesin, bahan baku/bahan penolong, kemampuan teknologi dan manajemen sebagai suatu sumber ekonomi yang langka.³

2.3.1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit memiliki dimensi yang beraneka ragam. Dari aspek etimologi kata, istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credo*, yang artinya saya percaya atau saya menaruh kepercayaan, kata kerja dan kata bendanya masing-masing menjadi *credere* dan *creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran⁴.

Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, kredit memiliki arti yang lebih luas. Beberapa pengertian kredit antara lain:

1. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran

3 Teguh Pudjo Mulyono, Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil, 2001, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 1.

4 Dana F. Kellerman "The New Grolier Webster International Dictionary", Grolier Inc., New York, 1971, hal 237 dalam Teguh Pudjo Mulyono, Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil, 2001, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 9.

akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.⁵

2. Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor/atau pemberi pinjaman atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.⁶
3. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁷

Dari rumusan definisi di atas, beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Adanya suatu penyerahan uang/tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan harapan pinjaman ini akan menghasilkan suatu tambahan nilai pokok pinjaman berupa bunga.
2. Proses kredit didasarkan pada suatu perjanjian atas dasar kepercayaan dengan kesepakatan bahwa kedua belah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing.
3. Dalam pemberian kredit terkandung kesepakatan pelunasan utang pokok dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

5 Eric L. Kohler "A dictionary for accountants, 3rd edition, Prentice Hal-Inc, New York, 1964 dalam Teguh Pudjo Mulyono, Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial, 2001, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, hal: 10

6 Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A., Andria Permata Veithzal, B. Acct., M.B.A., Ferry N. Idroes, SE., M.M., *Bank and Financial Institution Management*, 2007, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 438

7 Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

2.3.2. Unsur Kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, artinya prestasi yang diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur dalam kredit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Terdapat kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas *credit rating* penerima kredit.
3. Terdapat persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad kredit), atau berupa instrumen (*credit instrument*).
4. Terdapat penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Terdapat unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial kredit. Kredit ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun penerima kredit. Misalnya, penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan kredit karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
6. Terdapat unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak pemberi kredit maupun pihak penerima kredit. Risiko di pihak penerima kredit adalah risiko bayar gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersil) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak debitur adalah adanya kecurangan dari pihak kreditur, yaitu berupa pemberi kredit yang semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk

mencaplok perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan.

7. Terdapat unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal (*cost of capital*), biaya umum (*overhead cost*), risk premium, dan sebagainya. Jika *credit rating* penerima kredit tinggi, *risk premium* dapat dikurangi dengan *safety discount*.

2.3.3. Tujuan kredit

Pada dasarnya dua tujuan yang saling berkaitan dari kredit, sebagai berikut.

- a. *Profitability*, yaitu untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) suatu kredit sehingga unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

2.3.4. Fungsi Kredit

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi kredit dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut: ⁸

- a. Meningkatkan utilitas (daya guna) dari modal/uang. Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas atau memperluas usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.
- b. Meningkatkan utilitas (daya guna) suatu barang. Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga utilitas dari bahan tersebut dapat meningkat.
- c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit yang disalurkan melalui rekening koran, mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel, *promise* dan sebagainya melalui kredit. Peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha. Dengan demikian, penggunaan uang akan semakin membaik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.
- d. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu selalu berusaha memenuhi kegiatannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi peningkatan usaha tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Oleh karena itu, manusia berusaha dengan berbagai upaya untuk memenuhi kekurangan kemampuannya.
- e. Alat stabilisasi ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor,

⁸ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A., Andria Permata Veithzal, B. Acct., M.B.A., Ferry N. Idroes, SE., M.M., *Bank and Financial Institution Management*, 2007, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 438

rehabilitasi sarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan arus inflasi, terutama untuk usaha pembangunan ekonomi, kredit bank memegang peranan yang penting. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahannya ke sektor-sektor produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Dengan kata lain, setiap kredit harus benar-benar diarahkan untuk menambah *flow of goods* serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata ke seluruh lapisan masyarakat.

- f. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh kredit tentu saja berusaha meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan laba. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti dikembalikan kepada struktur permodalan, peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat, berarti pajak perusahaan akan terus bertambah.
- g. Sebagai alat peningkatan hubungan ekonomi internasional. Bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan, yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.

2.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Teori tentang pertumbuhan wilayah atau regional berasal dari teori yang dikutip dari ekonomi makro dengan mengubah batas wilayah, yang kemudian berkembang menjadi spesifik dalam lingkup ekonomi regional. Oleh karena itu dalam memahami konsep

pertumbuhan ekonomi regional, beberapa teori pertumbuhan ekonomi dalam ruang lingkup nasional atau negara dapat dipergunakan.

Potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya fisik atau kekayaan alam berupa tanah dan kandungan mineral yang terkandung di dalamnya dan sumber daya manusia berupa jumlah penduduk serta tingkat keterampilan dan pendidikannya.

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi, ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu, pertama, akumulasi modal. Akumulasi modal berlangsung jika sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali untuk memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari, yang dapat dilakukan dengan investasi langsung terhadap barang modal produktif secara fisik. Investasi produktif yang bersifat langsung juga harus dilengkapi dengan investasi terhadap fasilitas-fasilitas penunjang seperti infrastruktur ekonomi dan sosial misalnya pembangunan jalan raya, penyediaan listrik, air bersih, pembangunan fasilitas komunikasi dan sebagainya. Kedua, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Secara tradisional, peningkatan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi karena akan meningkatkan jumlah tenaga produktif sementara peningkatan pertumbuhan penduduk akan meningkatkan ukuran pasar domestik sebuah negara. Ketiga, faktor kemajuan teknologi. Menurut para ahli perkembangan teknologi merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting karena merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya suatu pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

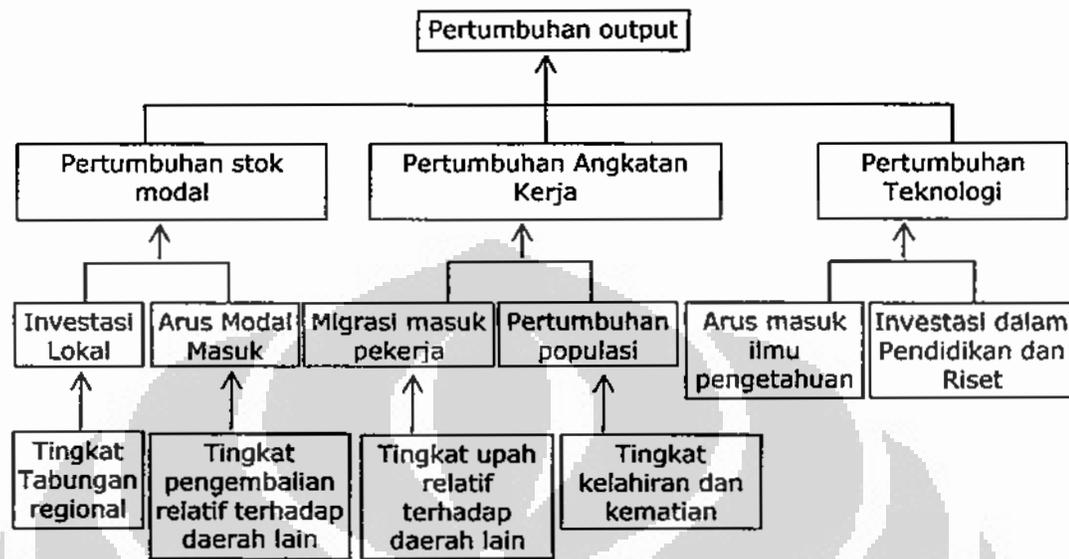
Mekanisme perekonomian yang mementingkan peningkatan investasi demi mempercepat pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui model pertumbuhan Harrod-Domar. Model pertumbuhan Harrod-Domar menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) ditentukan secara bersama-sama oleh rasio

tabungan nasional dan rasio modal-output nasional. Secara spesifik model ini juga menerangkan bahwa ketika intervensi pemerintah tidak ada dalam perekonomian, maka tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan berbanding lurus dengan rasio tabungan dan akan berbanding terbalik dengan rasio modal-output. Maka secara sederhana teori ini menyatakan bahwa jika sebuah negara ingin mengalami pertumbuhan ekonomi, maka setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan GNP.

Pentingnya akumulasi modal dalam pertumbuhan ekonomi memunculkan beberapa kritik karena akumulasi modal melalui peningkatan tabungan dan investasi hanyalah syarat penting (*necessary condition*) dan bukan syarat cukup (*sufficient condition*) bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga memerlukan faktor-faktor lain seperti kecakapan manajerial, tenaga kerja yang terdidik dan terlatih, kemampuan perencanaan, tersedianya transportasi yang memadai serta birokrasi pemerintahan yang efisien.

Kritik tersebut kemudian mendorong Robert Solow, salah seorang tokoh neoklasik yang terkenal, untuk melakukan pengembangan terhadap formulasi Harrod Domar. Robert Solow menambahkan faktor kedua yaitu tenaga kerja dan mulai memperkenalkan variabel independen ketiga yaitu teknologi. Berbeda dengan model Harrod-Domar, model Solow berpendapat bahwa pada jangka panjang pertumbuhan sepenuhnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber-sumber pertumbuhan regional menurut perspektif neoklasik dapat dilihat pada gambar. 2.1

Gambar 2.1. Sumber-sumber Pertumbuhan Regional :Perspektif Neoklasik⁹



Ternyata teori neoklasik masih memunculkan ketidakpuasan sehingga mendorong lahirnya teori baru yaitu teori pertumbuhan baru. Teori ini mencoba menjelaskan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar negara. Robert Lucas dari Universitas Chicago mengemukakan fenomena dunia yang tidak sesuai dengan teori pertumbuhan neoklasik misalnya adanya perbedaan upah antar negara dan juga migrasi penduduk antar negara.

Paul Romer, ekonom Universitas California-Barkeley, percaya bahwa jika teknologi adalah endogen atau dijelaskan dalam model, para ekonom akan bisa menjelaskan hal-hal yang gagal diterangkan dalam model pertumbuhan neoklasik (dalam model neoklasik, teknologi diasumsikan eksogen). Ketika tingkat teknologi diperbolehkan bervariasi, maka fenomena dimana negara maju mempunyai tingkat yang lebih tinggi daripada negara berkembang dapat dijelaskan. Dengan teknologi yang bisa berbeda-beda tersebut, konvergensi antara negara maju dan negara berkembang akan ditentukan oleh kecepatan persebaran ilmu pengetahuan. Teori baru seperti Romer menganggap bahwa inovasi dan perubahan teknologi

⁹ Armstrong, Harvey dan Jim Taylor (2000), "Regional Economics and Policy", Third Ed., Massachusetts: Blackwell Publishers Inc.

yang meningkatkan produktivitas kapital dan tenaga kerja adalah faktor utama bagi proses pertumbuhan.

Teori ini juga mendapat kritik dari beberapa ahli karena tidak dapat diterapkan pada negara berkembang. Beberapa faktor penting yang sering menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang kurang diperhatikan misalnya inefisiensi yang bersumber dari kelemahan infrastruktur, struktur kelembagaan yang tidak memadai, serta pasar barang dan modal yang jauh dari sempurna.

2.5. Metode Penentuan Keunggulan Daerah

Keunggulan daerah dapat diukur dari kekuatan potensi ekonomi sektoral daerah itu sendiri (*strength*) dan dapat dilihat juga dari ukuran keterkaitan ekonomi (*economic linkage*) yang menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan sekitarnya. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan keunggulan daerah adalah :

2.5.1. Analisis Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menggambarkan peranan dan sumbangan dari masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB, yang dalam lingkup lebih jauh akan memperlihatkan bagaimana suatu perekonomian mengalokasikan sumber-sumber ekonomi ke berbagai sektor.

Metode untuk menghitung peranan sektor pada tahun tertentu adalah:

$$S_{it} = \frac{X_{it}}{PDRB_t} \times 100\% \quad (2.1.)$$

Dimana :

- Sit = peranan sektor i pada tahun t
- Xit = NTB sektor i pada tahun t
- PDRBt = PDRB tahun t

Data yang diperlukan untuk menghitung rasio tersebut adalah PDRB menurut lapangan usaha.

2.5.2. Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting untuk menganalisis perekonomian suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output yang selanjutnya akan menghasilkan aliran balas jasa terhadap pemilik faktor produksi.

Suatu perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB/PDRB.

Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data PDB/PDRB yang digunakan adalah PDB/PDRB atas dasar harga konstan. Penggunaan harga konstan dimaksudkan agar pertumbuhan PDB benar-benar hanya mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian pada periode tertentu.

Metode untuk menghitung tingkat pertumbuhan pada waktu tertentu adalah:

$$r_{t-1,t} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \quad (2.2.)$$

Dimana :

$R_{t-1,t}$ = tingkat pertumbuhan

$PDRB_t$ = PDRB pada tahun t

$PDRB_{t-1}$ = PDRB tahun t-1

2.5.3. Analisis Location Quotient (LQ)

Pada dasarnya pendekatan ini memberikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor di suatu daerah dengan kemampuan sektor yang sama di daerah yang lebih luas. John Glasson mengatakan bahwa dalam bahasa akademi, perekonomian regional dapat dibagi menjadi 2 sektor yaitu sektor basis dan non basis. Dasar pemikiran teknik ini adalah teori *economic base* yang intinya adalah industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan ke luar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut akan menaikkan permintaan terhadap output sektor basis yang selanjutnya juga akan mendorong kenaikan investasi pada sektor yang bersangkutan. Sementara sektor non basis adalah sektor yang hanya mampu menyediakan barang-barang yang dibutuhkan orang-orang yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Pada daerah tersebut tidak terjadi kegiatan ekspor ke daerah lain sehingga lingkup pasar terutama hanya bersifat lokal.

Pentingnya sektor basis dalam perekonomian menyebabkan sektor ini perlu dikembangkan di suatu daerah. Maka hal yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi sektor basis. Mengidentifikasi sektor unggulan suatu daerah dapat dilakukan dengan analisis *Location Quotient* (kuosien lokasi) atau disingkat LQ. *Location Quotient* adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya sektor tersebut secara nasional. Variabel yang dapat diperbandingkan adalah nilai tambah dari masing-masing sektor.

Berikut rumus yang akan digunakan untuk menghitung LQ sebuah sektor pada sebuah provinsi:

$$LQ_{it} = \frac{\frac{Xit_{prop.}}{PDRBt_{prop.}}}{\frac{Xit_{nas.}}{PDRBt_{nas.}}} \quad (2.3.)$$

Dimana:

LQ_{it} : *Location Quotient* suatu sektor i pada tahun t .

$Xit_{prop.}$: Nilai tambah sektor i provinsi pada tahun t

$PDRB_{prop.}$: Produk Domestik Regional Bruto provinsi pada tahun t

Xit_{nas} : Nilai tambah sektor i pada tahun t di tingkat nasional

$PDRBt_{nas}$: Produk Domestik Regional Bruto nasional pada tahun t

i : Jumlah individu yaitu 4 provinsi.

t : Indeks periode waktu dari tahun 2000 sampai 2007.

Perhitungan LQ akan dilakukan pada keempat provinsi untuk melihat sektor-sektor yang merupakan sektor unggulan. Jika hasil perhitungan menghasilkan nilai $LQ > 1$, sektor tersebut adalah sektor unggulan. Artinya peranan suatu sektor lebih dominan dari peranan sektor tersebut secara nasional. Hal ini dapat dijadikan petunjuk bahwa sektor tersebut mengalami surplus sehingga daerah melakukan ekspor ke luar daerah. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif untuk sektor tersebut. Sementara jika $LQ < 1$ peranan suatu sektor lebih kecil dari peranan sektor tersebut secara nasional sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan.

Analisis LQ, jika diperhatikan dari rumus tersebut terlihat sangat sederhana dan kurang memberikan manfaat. Analisis tersebut akan lebih memberikan manfaat jika dilanjutkan dengan melihat kecenderungan suatu sektor dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu analisis LQ ini akan dilanjutkan untuk melihat kecenderungan sebuah sektor dari tahun 2000 sampai tahun 2007.

2.6. Hubungan Kredit Perbankan dengan Sektor Unggulan

Hubungan antara perkembangan sektor perbankan terhadap sektor unggulan dapat dianalisa berdasarkan fungsi perbankan sebagai "*intermediary saving*". Akumulasi dana yang dihimpun dunia perbankan selanjutnya disalurkan dalam bentuk kredit kepada investor untuk melakukan investasi dimana investasi akan mendorong terjadinya peningkatan aktivitas perekonomian.

Peningkatan aktivitas ekonomi selanjutnya akan mendorong daerah melakukan spesialisasi. Daerah akan cenderung meningkatkan aktivitas sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam perekonomian daerah sehingga menimbulkan perbedaan tingkat pertumbuhan antar sektor. Perbedaan tersebut akan semakin mendorong terjadinya transfer sumber-sumber keuangan dari sektor yang lambat pertumbuhannya ke sektor yang cepat pertumbuhannya. Perbankan pada akhirnya cenderung membiayai sektor-sektor unggulan di sebuah wilayah. Perilaku kecenderungan ini juga akan menyebabkan peningkatan output sebuah sektor menjadi semakin tinggi.

Sebagai lembaga yang membantu proses transfer dana dari pihak surplus kepada pihak yang defisit, perbankan telah membantu proses terjadinya pengintegrasian ekonomi serta menyebabkan meningkatnya kegiatan ekonomi. Ketika pertumbuhan output suatu sektor ekonomi meningkat, maka makin besar pula permintaan terhadap pembiayaan eksternal. Naiknya kebutuhan terhadap pembiayaan eksternal bermakna naiknya permintaan terhadap jasa-jasa perantara keuangan yang pada gilirannya juga akan mendorong peningkatan kinerja perbankan itu sendiri.

2.7. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian yang langsung melihat analisis antara sektor unggulan dan kredit perbankan belum ada. Tetapi penelitian-penelitian terdahulu tentang intermediasi ataupun disintermediasi

perbankan dapat digunakan sebagai justifikasi untuk pemilihan variabel-variabel yang akan diestimasi dalam model yang akan dikembangkan.

Beberapa peneliti telah mengkaji terjadinya disintermediasi perbankan di beberapa negara, diantaranya Ghosh dan Ghosh (1999), Juda Agung dkk (2001), dan Lukman Hakim (2004).

Ghosh dan Ghosh (1999)¹⁰ menguji disintermediasi perbankan di negara Asia yang mengalami krisis tahun 1997 yaitu Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand. Penelitian ini menguji disintermediasi melalui fungsi penawaran dan permintaan kredit. Interval waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah periode Januari 1992 s.d. Juni 1998. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa fungsi penawaran kredit dipengaruhi oleh suku bunga riil, kapasitas pemberian kredit bank komersial (*lending capacity*), dan *current output*. Sementara fungsi permintaan kredit dipengaruhi oleh suku bunga riil, *current output*, *output gap*, harga saham, dan inflasi. Kesimpulan studi menyatakan bahwa meskipun penawaran kredit kepada sektor swasta menurun namun permintaan kredit menurun lebih tajam yang mengindikasikan kecilnya fenomena "credit crunch" di negara Asia setelah krisis.

Sementara Juda Agung dan kawan-kawan (2001)¹¹ juga menguji secara empiris terjadinya disintermediasi perbankan di Indonesia setelah krisis 1997. Interval waktu penelitian ini adalah periode Juni 1993 s.d. Desember 2000. Disintermediasi perbankan yang terjadi juga diteliti melalui model permintaan dan penawaran kredit. Dalam penelitiannya fungsi penawaran kredit dipengaruhi oleh kapasitas kredit, suku bunga kredit, rasio modal terhadap aset, dan *non-performing Loan* (NPL). Sedangkan permintaan kredit dipengaruhi oleh Produk Domestik Bruto (PDB) dan suku bunga kredit. Hasil studi menunjukkan bahwa setelah krisis tahun 1997 s.d. pertengahan 2000

10 Gosh, A. dan Ghosh, S. (1999), *East Asia in the Aftermath: Was There a Crunch?*, IMF Working Paper 1999/38, Maret 1999

11 Agung, J., B. Kusmiarso, B. Pramono, E.G. Hutapea, A. Prasmuko dan N.J. Prastowo. 2001. *Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis : Fakta, Penyebab dan Implikasi Kebijakan*. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia.

menurunnya penyaluran kredit lebih disebabkan oleh penawaran kredit yang mengindikasikan adanya fenomena "*credit crunch*".

Selanjutnya Lukman Hakim (2004)¹² juga menguji secara empiris terjadinya disintermediasi perbankan di Indonesia setelah krisis 1997. Lukman Hakim kembali menguji disintermediasi perbankan melalui fungsi penawaran dan permintaan kredit. Fungsi penawaran kredit dipengaruhi oleh Produk Domestik Bruto (PDB), total simpanan (*deposito*), dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sementara permintaan kredit dipengaruhi oleh Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga SBI dan suku bunga kredit. Hasil studi menemukan hubungan antar variabel yang sebagian besar tidak sesuai dengan teori ekonomi. Hal ini terjadi karena pembangunan spesifikasi model persamaan yang tidak akurat. Suku bunga SBI yang dimaksudkan oleh Bank Indonesia untuk memengaruhi *behaviour* bank dalam menyalurkan kredit seharusnya lebih cocok dimasukkan dalam persamaan penawaran kredit, bukan persamaan permintaan kredit.

Muliaman D. Hadad, dan kawan-kawan (2004)¹³ menguji secara empiris permintaan dan penawaran kredit konsumsi rumah tangga di Indonesia. Model panel permintaan kredit konsumsi di tingkat provinsi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga kredit konsumsi, jumlah kantor bank, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran. Sementara model panel penawaran kredit konsumsi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga kredit konsumsi, jumlah kantor bank (kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Rasio *Non Performing Loan*, dana pihak ketiga dan tingkat pengangguran. Hasil studi menemukan hubungan positif antara variabel PDRB dengan kredit konsumsi, dan semakin terkonsentrasi jumlah bank maka semakin tinggi tingkat persaingan dalam penyaluran kredit konsumsi.

12 Hakim, Lukman, 2004, Perbandingan Peranan Jalur Kredit pada Masa Sebelum dan Ketika Krisis Ekonomi 1990.1 – 2000.4. dalam Lukman Hakim, B. Santosa, dan E. Setyaningrum (Editor). *Beberapa Agenda Perekonomian Indonesia Kritik dan Solusi*. Dewan Riset Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta.

13 Hadad, MD, 2004, Model dan Estimasi Permintaan dan Penawaran Kredit Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Jakarta

I Gde Yadna Kusuma (2006)¹⁴ menguji secara empiris penyaluran kredit perbankan melalui fungsi penawaran kredit. Pada penelitian ini, perbankan dikategorikan berdasarkan aset, yaitu bank dengan aset kurang dari 1 triliun, 1 triliun sampai 10 triliun dan lebih besar dari 10 triliun. Fungsi penyaluran kredit dipengaruhi oleh variabel *Loanable Fund*, *NPL*, *Current Asset Ratio (CAR)*, tingkat efisiensi (*BOPO*), Suku Bunga SBI dan suku bunga kredit. Hasil menunjukkan bahwa perkembangan kredit bank dengan aset kurang dari 1 triliun secara signifikan dipengaruhi oleh variabel *NPL*, *CAR*, suku bunga SBI dan suku bunga kredit. Bank yang memiliki aset 1 triliun sampai 10 triliun, variabel yang signifikan memengaruhi perkembangan kredit adalah *Loanable fund*, *NPL*, *CAR*, *BOPO* dan suku bunga kredit. Perkembangan kredit pada bank yang memiliki aset lebih besar dari 10 triliun dipengaruhi oleh *NPL* dan suku bunga kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Dewi Butar-butur menguji faktor yang memengaruhi sektor basis kota Batam tahun 1988 s.d. tahun 2004. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor unggulan di kota Batam adalah sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel dan restoran. Untuk melihat faktor yang memengaruhi sektor basis di kota Batam, penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan variabel jumlah tenaga kerja, luas lahan, jumlah perusahaan, investasi swasta, investasi pemerintah dan kredit perbankan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel luas wilayah dan tenaga kerja signifikan memengaruhi seluruh sektor unggulan di kota Batam. Variabel kredit perbankan hanya signifikan memengaruhi sektor listrik, gas dan air bersih. Sementara variabel jumlah perusahaan signifikan memengaruhi sektor perdagangan, hotel dan restoran.¹⁵

14 Kusuma, I Gde Yadna, Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kredit perbankan di Indonesia tahun 2000-2004, Tesis, 2006, Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

15 Butar-butur, Ade Devi, Faktor-faktor yang mempengaruhi sektor-sektor basis ekonomi di kota Batam periode 1988-2002, Tesis, 2004, Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1. Provinsi DKI Jakarta

DKI Jakarta merupakan provinsi yang strategis karena statusnya sebagai ibukota negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1964 tanggal 31 Agustus 1964, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya dinyatakan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan implikasi bahwa DKI Jakarta berfungsi sebagai pusat pemerintahan.

Provinsi DKI Jakarta yang merupakan dataran rendah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan Banten serta Laut Jawa. Secara Administratif, DKI Jakarta terdiri dari 5 (lima) kotamadya, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Provinsi ini juga memiliki 1 kabupaten administratif yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu. Provinsi yang memiliki luas daratan sebesar 664 km² ini terdiri dari 43 kecamatan dan 265 kelurahan. Luas wilayah DKI Jakarta sebagian besar digunakan untuk pemukiman yang mencapai 43.788,57 ha serta daerah industri seluas 4.417,87 ha.

Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2001, PDRB DKI Jakarta mencapai 238,6 triliun dan di tahun 2007 mencapai 332,6 triliun. Sementara jika dilihat dari pertumbuhan, provinsi ini mengalami pertumbuhan setiap tahunnya kecuali tahun 2006. Tahun 2005 pertumbuhan DKI Jakarta tercatat sebesar 6,01% tetapi di tahun 2006 turun sebesar 0,11% sehingga pertumbuhan tercatat sebesar 5,9%. Tahun 2007 pertumbuhan kembali meningkat menjadi 6,39% (Tabel 3.1.).

Tabel 3.1. Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan DKI Jakarta

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Pertumbuhan	Δ Pertumbuhan
2001	238,656,137.26	4.71	
2002	250,331,156.56	4.89	0.18
2003	263,624,241.91	5.31	0.42
2004	278,524,822.21	5.65	0.34
2005	295,270,543.61	6.01	0.36
2006	312,700,302.84*	5.90	(0.11)
2007	332,681,739.00**	6.39	0.49

Sumber: Badan Pusat Statistik

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Diantara sembilan sektor ekonomi, sektor keuangan merupakan motor penggerak utama perekonomian DKI Jakarta. Proporsi terbesar pada PDRB DKI Jakarta berasal dari sektor ini yang mencapai 32,72% dari total PDRB pada tahun 2001 dan 29,59% pada tahun 2007. Hal ini terjadi karena bank di DKI Jakarta memiliki jumlah kantor yang banyak sehingga infrastruktur dan jaringan kerja perbankan juga semakin luas. Kelengkapan sarana ini menjadi pendukung berkembangnya peningkatan penyaluran kredit dan penghimpunan dana sehingga sektor keuangan berkembang pesat sebagai penggerak perekonomian di DKI Jakarta.

Tabel 3.2. Distribusi sektor ekonomi PDRB DKI Jakarta

Tahun	Sektor								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
2001	0.16	0.53	17.57	0.65	10.24	20.16	6.05	32.72	11.93
2002	0.14	0.49	17.52	0.66	10.10	20.62	6.48	32.20	11.79
2003	0.11	0.40	17.47	0.66	9.98	20.87	6.92	31.79	11.79
2004	0.10	0.35	17.49	0.66	9.86	21.13	7.38	31.34	11.67
2005	0.10	0.31	17.33	0.67	9.85	21.50	7.89	30.78	11.57
2006	0.09	0.30	17.16	0.66	9.97	21.65	8.51	30.15	11.52
2007	0.09	0.28	16.88	0.66	10.08	21.78	9.17	29.59	11.48

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Catatan: I: sektor pertanian, II: sektor pertambangan, III: sektor industri pengolahan, IV: sektor listrik, gas dan air bersih, V: sektor bangunan, VI: sektor perdagangan, VII: sektor transportasi dan komunikasi, VIII: sektor keuangan dan persewaan, IX: sektor jasa

Sektor berikutnya yang memiliki pangsa terbesar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan dengan nilai untuk masing-masing sektor tersebut sebesar 21,78% dan 16,88% pada tahun 2007 (Tabel 3.2.). Meningkatnya kegiatan bongkar muat menjadi indikasi pertumbuhan di sub sektor

perdagangan. Sementara sub sektor hotel juga meningkat sebagaimana diindikasikan dari tingkat hunian hotel dan kedatangan turis di Jakarta yang cenderung meningkat.

Berdasarkan perhitungan LQ, yang termasuk dalam sektor unggulan adalah sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor transportasi dan komunikasi; sektor keuangan dan persewaan serta sektor jasa. (tabel 3.3.) Walaupun sektor industri memberikan pangsa terbesar ketiga, jika dilihat dari potensi relatif dengan nasional, sektor industri di wilayah Jakarta bukanlah sektor unggulan.

Tabel. 3.3. Perhitungan Location Quotient DKI Jakarta

Sektor	Tahun						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pertambangan	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03
Industri	0.63	0.63	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61
Listrik	1.05	1.03	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
Bangunan	1.90	1.84	1.80	1.75	1.69	1.66	1.64
Perdagangan	1.24	1.24	1.27	1.28	1.29	1.28	1.27
Transportasi	1.18	1.24	1.28	1.27	1.26	1.26	1.25
Keuangan	3.95	3.83	3.68	3.57	3.43	3.34	3.27
Jasa	1.28	1.28	1.27	1.28	1.26	1.26	1.24

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

3.2. Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50' - 7°50' LS dan 104°48' - 104°48 BT dengan batas-batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa bagian barat dan DKI Jakarta di utara, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, antara Samudra Indonesia di Selatan dan Selat Sunda di barat. Dengan daratan dan pulau-pulau kecil (48 Pulau di Samudera Indonesia, 4 Pulau di Laut Jawa, 14 Pulau di Teluk Banten dan 20 Pulau di Selat Sunda), luas wilayah Jawa Barat 44.354,61 Km² atau 4.435.461 Ha.

Secara historis Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1950 dengan Bandung sebagai ibukotanya. Dengan terbentuknya Provinsi Banten pada bulan

Nopember tahun 2000, maka jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat terdiri dari 16 Kabupaten, yaitu Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan dan 9 Kota, yaitu Bandung, Bogor, Sukabumi, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar.

Provinsi ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia karena hampir 60% industri pengolahan di Indonesia berlokasi di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Jakarta sebagai ibukota negara. Selain itu, Jawa Barat memiliki lahan yang subur berasal dari endapan vulkanis serta banyaknya aliran sungai sehingga cocok digunakan sebagai lahan pertanian.

Pada tahun 2001, total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat mencapai Rp. 203,3 triliun dan meningkat menjadi Rp. 284,3 triliun tahun 2007. PDRB Jawa Barat mencatat pertumbuhan setiap tahunnya kecuali tahun 2005 dan 2006. Pada tahun 2004 pertumbuhan provinsi ini mencapai 5,61% tetapi turun menjadi 5% pada tahun 2005 dan 4,93% pada tahun 2006 (Tabel 3.4.).

Tabel. 3.4. Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Jawa Barat

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Pertumbuhan	Δ Pertumbuhan
2001	203,368,999.98	3.89	
2002	211,391,590.41	3.94	0.05
2003	221,627,859.88	4.84	0.90
2004	234,067,638.74	5.61	0.77
2005	245,779,061.75	5.00	(0.61)
2006	257,906,020.75*	4.93	(0.07)
2007	284,339,405.86**	10.25	5.32

Sumber: Badan Pusat Statistik

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Distribusi terbesar PDRB Jawa Barat datang dari sektor industri pengolahan dengan persentase sebesar 42,26% dari total PDRB pada tahun 2007 (Tabel 3.4.). Hal ini terjadi karena di Provinsi Jawa Barat terdapat 27 kawasan industri yang tersebar di 4 kabupaten yaitu 18 kawasan industri di Kabupaten Bekasi, 2 kawasan di Kabupaten Bogor, 2 kawasan di Kabupaten Cirebon dan 5 kawasan terletak di Kabupaten Karawang. Sementara untuk menunjang aktivitas perekonomian

provinsi ini didukung oleh 9 pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Muara Gembong, Pangandaran, Kejawanan, Muara Gebang, Eretan, Indramayu, Pamanukan dan Pelabuhan Ratu serta Pelabuhan Cirebon yang merupakan pelabuhan terpanjang dengan 1.214 m. Jawa Barat juga didukung 3 bandar udara yaitu Bandar Udara Nusa Wiru di Kabupaten Ciamis, Bandar Udara Penggung di Cirebon, dan Bandar Udara Husein Sastranegara di Bandung.

Tabel 3.5. Distribusi sektor ekonomi PDRB Jawa Barat

Tahun	Sektor								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
2001	14.53	8.24	40.81	2.05	2.53	17.90	3.90	2.89	7.15
2002	13.81	8.00	40.70	2.08	2.64	18.28	4.01	3.07	7.41
2003	13.50	7.68	41.21	2.01	2.70	17.69	4.21	3.14	7.86
2004	13.58	7.32	40.18	2.06	2.82	17.86	4.39	3.10	8.69
2005	13.17	7.02	41.04	2.10	3.17	17.50	4.19	3.08	8.73
2006	13.36	6.74	40.44	2.23	3.15	19.62	4.34	2.97	7.14
2007	11.85	6.16	42.26	2.14	3.12	20.44	4.33	3.02	6.68

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Catatan: I: sektor pertanian, II: sektor pertambangan, III: sektor industri pengolahan, IV: sektor listrik, gas dan air bersih, V: sektor bangunan, VI: sektor perdagangan, VII: sektor transportasi dan komunikasi, VIII: sektor keuangan dan persewaan, IX: sektor jasa

Sektor yang juga memberikan distribusi besar pada perekonomian adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan persentase sebesar 20,44% dari Total PDRB pada tahun 2007. Pertumbuhan perekonomian Jawa Barat tidak bisa dilepaskan dari sektor pertanian, dimana distribusi PDRB sektornya sangat besar yaitu mencapai 11,85% pada tahun 2007. Meskipun proporsinya terhadap PDRB total mengalami penurunan, namun sektor ini masih menjadi penyumbang ketiga terbesar dalam perekonomian Jawa Barat. Komoditas utama pada sektor pertanian yang menonjol yaitu pada tanaman padi, yang merupakan penyumbang terbesar stok pangan nasional dengan kontribusi sebesar 18%, dengan total produksi pada tahun 2007 sebesar 10,1 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).

Berdasarkan perhitungan LQ, sektor unggulan di wilayah Jawa Barat statis pada 3 sektor yaitu sektor industri, sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor perdagangan hotel dan restoran (tabel. 3.6.).

Tabel. 3.6. Perhitungan Location Quotient Jawa Barat

Sektor	Tahun						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	0.93	0.90	0.89	0.91	0.91	0.94	0.86
Pertambangan	0.71	0.71	0.72	0.76	0.74	0.74	0.71
Industri	1.48	1.46	1.47	1.42	1.46	1.45	1.54
Listrik	3.27	3.17	3.06	3.14	3.17	3.36	3.11
Bangunan	0.46	0.47	0.48	0.49	0.54	0.52	0.50
Perdagangan	1.10	1.13	1.09	1.09	1.04	1.16	1.18
Transportasi	0.80	0.79	0.78	0.75	0.67	0.64	0.60
Keuangan	0.34	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32	0.32
Jasa	0.77	0.80	0.85	0.94	0.95	0.77	0.72

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

3.3. Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang letaknya cukup strategis karena berada di daratan padat Pulau Jawa, diapit oleh dua provinsi besar Jawa Barat dan Jawa Timur, dan satu daerah istimewa Yogyakarta. Letaknya antara $5^{\circ} 40''$ – $8^{\circ} 30''$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ} 30''$ – $111^{\circ} 30''$ Bujur Timur. Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km. Sepanjang bagian utara dan selatan terbentang pantai yang cukup panjang. Dengan luas wilayah kurang lebih 3.254.412 Ha, secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 Kabupaten dan 6 Kota dengan 565 Kecamatan 8.566 desa/kelurahan. Daerah yang terluas adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 2.13.851 Ha atau sekitar 6,57 persen dari luas total Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Kota Magelang merupakan daerah yang memiliki wilayah paling kecil yaitu hanya seluas 1.812 Ha.

Pada tahun 2001, total PDRB Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp. 118,8 triliun dan meningkat menjadi Rp. 159,1 triliun pada tahun 2007. Pada tahun 2001 PDRB Jawa Tengah mencatat pertumbuhan sebesar 3,59%. Tetapi pada tahun 2002 PDRB mengalami penurunan sebesar 0,03% sehingga PDRB Jawa Tengah mengalami pertumbuhan hanya sebesar 3,55%. PDRB Jawa Tengah kembali mengalami pertumbuhan sampai tahun 2005. Tetapi tahun 2006 PDRB mengalami

penurunan kembali dari 5,35% pada tahun 2005 menjadi 5,33% pada tahun 2006 (Tabel 3.7.).

Tabel. 3.7. Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Jawa Tengah

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Pertumbuhan	Δ Pertumbuhan
2001	118,816,400.29	3.59	
2002	123,038,541.13	3.55	(0.03)
2003	129,166,462.45	4.98	1.43
2004	135,786,872.31	5.13	0.14
2005	143,051,213.88	5.35	0.22
2006	150,677,918.00*	5.33	(0.02)
2007	159,133,206.00**	5.61	0.28

Sumber: Badan Pusat Statistik

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Distribusi terbesar PDRB Jawa Tengah berasal dari sektor industri pengolahan dengan persentase sebesar 31,99% dari total PDRB pada tahun 2007 (Tabel 3.7.). Sektor berikutnya yang memberikan distribusi terbesar adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan persentase sebesar 21,05% dari Total PDRB pada tahun 2007.

Distribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan yang sangat dominan di daerah Jawa Tengah disebabkan oleh adanya dukungan sarana dan prasarana. Perhubungan darat yang terdiri dari lalu lintas angkutan jalan raya dan angkutan kereta api merupakan sarana vital dalam menunjang kelancaran arus penumpang maupun distribusi barang di daerah Jawa Tengah. Prasarana perhubungan laut di Jawa Tengah terutama dilayani oleh lima pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap, Pelabuhan Tegal, Pelabuhan Jepara dan Pelabuhan Juwana. Pelabuhan Tanjung Emas merupakan pintu gerbang kegiatan bongkar muat komoditas perdagangan baik dalam mendukung perdagangan domestik maupun internasional. Prasarana angkutan udara dilakukan melalui lima pelabuhan udara, yaitu pelabuhan udara Ahmad Yani di Semarang, Adi Sumarmo di Surakarta, Tunggul Wulung di Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa di Jepara. Dari keempat pelabuhan udara tersebut, pelabuhan udara Adi Sumarmo dan Ahmad Yani merupakan pelabuhan udara domestik sekaligus internasional, sedangkan

pelabuhan udara Tunggul Wulung dan Karimunjawa terutama melayani angkutan barang untuk keperluan industri di daerah Cilacap dan daerah Jepara.

Tabel 3.8. Distribusi sektor ekonomi PDRB Jawa Tengah

Tahun	Sektor								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
2001	22.78	0.96	31.11	0.76	4.59	22.72	4.52	3.78	8.78
2002	22.23	1.00	31.28	0.73	4.66	21.73	4.69	3.72	9.95
2003	22.53	1.00	31.85	0.79	4.97	21.37	4.77	3.68	9.03
2004	21.03	1.00	32.01	0.76	5.35	21.42	4.82	3.60	10.02
2005	21.07	0.98	32.40	0.78	5.49	20.87	4.79	3.55	10.06
2006	20.92	1.02	32.23	0.82	5.57	21.01	4.89	3.54	10.01
2007	20.55	1.11	31.99	0.85	5.61	21.05	4.93	3.59	10.32

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Catatan: I: sektor pertanian, II: sektor pertambangan, III: sektor industri pengolahan, IV: sektor listrik, gas dan air bersih, V: sektor bangunan, VI: sektor perdagangan, VII: sektor transportasi dan komunikasi, VIII: sektor keuangan dan persewaan, IX: sektor jasa

Pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah juga tidak bisa dilepaskan dari sektor pertanian, yang terlihat dari distribusi PDRB sektornya yaitu sebesar 20,55% pada tahun 2007 (Tabel 3.8.). Struktur daratan Provinsi Jawa Tengah bergunung-gunung, membujur sejajar dengan arah panjang pulau Jawa, baik di bagian tengah maupun daerah pantai utara dan pantai selatan, dan terdapat beberapa gunung yang masih aktif. Banyaknya daerah pegunungan dengan tanah yang cukup subur tersebut sangat cocok untuk budidaya tanaman hortikultura. Selain itu, antara barisan pegunungan terdapat dataran subur karena dialiri oleh 7 sungai yang memberikan pengairan terutama pada tanaman padi. Dengan luas lahan persawahan yang ada, produksinya mampu mendukung pemenuhan kebutuhan beras di Jawa Tengah, bahkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan beras nasional.

Berdasarkan perhitungan LQ dari tahun 2001 sampai tahun 2007, sektor unggulan di wilayah Jawa Tengah adalah sektor pertanian; sektor industri; sektor listrik, gas dan air minum; sektor perdagangan hotel dan restoran; dan sektor jasa (tabel. 3.9.). Tetapi pada tahun 2002, sektor jasa tidak termasuk pada sektor unggulan.

Tabel. 3.9. Perhitungan Location Quotient Jawa Tengah

Sektor	Tahun						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	1.42	1.46	1.38	1.41	1.44	1.45	1.45
Pertambangan	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13
Industri	1.13	1.14	1.14	1.14	1.15	1.15	1.17
Listrik	1.17	1.21	1.16	1.19	1.25	1.29	1.22
Bangunan	0.84	0.89	0.94	0.94	0.94	0.92	0.92
Perdagangan	1.34	1.32	1.32	1.28	1.25	1.24	1.24
Transportasi	0.96	0.94	0.89	0.82	0.78	0.73	0.70
Keuangan	0.44	0.42	0.40	0.39	0.38	0.39	0.39
Jasa	1.07	0.98	1.09	1.09	1.09	1.12	1.12

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

3.4. Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur terletak di ujung timur Pulau Jawa dengan wilayah yang mencakup Pulau Madura dan Bawean. Provinsi Jawa Timur terletak pada $111^{\circ} 0'$ hingga $114^{\circ} 4'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 12'$ hingga $8^{\circ} 48'$ Lintang Selatan. Sesuai letak geografisnya, sebelah utara provinsi ini berbatasan dengan provinsi Kalimantan Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan pulau Bali dan disebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah provinsi ini mencapai 46.428,57 Km². Secara administratif, Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dengan Surabaya sebagai ibukota provinsi.

Pada tahun 2001, total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur mencapai Rp. 210,4 triliun dan meningkat menjadi Rp. 287,4 triliun pada tahun 2007. Pertumbuhan PDRB Jawa Timur selalu meningkat setiap tahunnya kecuali tahun 2006 yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,09%. (Tabel 3.10.).

Tabel. 3.10. Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Jawa Timur

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Pertumbuhan	Δ Pertumbuhan
2001	210,448,570.18	3.76	
2002	218,452,389.09	3.80	0.05
2003	228,884,458.54	4.78	0.97
2004	242,228,892.17	5.83	1.05
2005	256,374,726.79	5.84	0.01
2006	271,113,469.93*	5.75	(0.09)
2007	287,466,788.00**	6.03	0.28

Sumber: Badan Pusat Statistik

* Angka sementara ** Angka sangat sementara

Sektor yang memberikan pangsa terbesar pada perekonomian provinsi Jawa Timur adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai 30,10% (Tabel 3.10.). Untuk mendukung roda perekonomian dan kegiatan investasi, di provinsi ini telah tersedia moda transportasi yang cukup baik, baik darat, laut maupun udara. Provinsi ini memiliki 29 pelabuhan laut baik besar maupun kecil, dengan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pelabuhan terbesar yang memiliki panjang dermaga 8.644 m, disusul Pelabuhan Gresik (1.115 m) dan Pelabuhan Tanjung Wangi (770 m). Terdapat pula 5 pelabuhan penyeberangan yang tersebar di 5 kabupaten/kota meliputi: penyeberangan Ujung-Kamal di Kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan, penyeberangan Jangkar di Kabupaten Situbondo dan penyeberangan Kalianget di Kabupaten Kalianget serta penyeberangan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi. Untuk transportasi udara terdapat 2 bandar udara yang tersebar di 2 kabupaten, yaitu Bandara Internasional Juanda yang terletak di Kabupaten Sidoarjo dan Bandara Abdurahman Saleh di Kabupaten Malang.

Tabel 3.11. Distribusi sektor ekonomi PDRB Jawa Timur

Tahun	Sektor								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
2001	19.74	2.06	29.79	1.53	4.01	24.39	5.23	4.60	8.64
2002	19.26	2.04	29.39	1.26	3.90	25.41	5.15	5.01	8.59
2003	18.93	2.02	28.11	1.44	3.80	26.52	5.61	4.99	8.60
2004	18.41	1.97	28.02	1.59	3.69	27.31	5.66	4.86	8.49
2005	17.89	1.90	27.87	1.72	3.55	28.19	5.71	4.86	8.30
2006	17.44	1.96	27.55	1.73	3.47	29.08	5.66	4.94	8.17
2007	17.18	2.00	26.84	1.71	3.33	30.10	5.72	5.00	8.12

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Catatan: I: sektor pertanian, II: sektor pertambangan, III: sektor industri pengolahan, IV: sektor listrik, gas dan air bersih, V: sektor bangunan, VI: sektor perdagangan, VII: sektor transportasi dan komunikasi, VIII: sektor keuangan dan persewaan, IX: sektor jasa

Sektor kedua yang memberikan sumbangan besar pada PDRB adalah sektor industri pengolahan (26,84%) dan diikuti dengan sektor pertanian (17,18%) pada peringkat ketiga (tabel 3.11.). Besarnya sumbangan sektor industri terjadi karena selain moda transportasi yang telah cukup baik, masih terdapat infrastruktur penunjang lainnya

misalnya adanya kawasan industri. Provinsi Jawa Timur memiliki 23 kawasan industri yang tersebar pada 8 kabupaten dan 2 kota antara lain di Kabupaten Bondowoso, Gresik, Jombang, Lamongan, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Kota Madiun dan Kota Surabaya. Sementara untuk sektor pertanian, provinsi Jawa Timur memiliki beberapa komoditi unggulan. Sektor pertanian melalui subsektor tanaman pangan, perkebunan dan sub sektor perikanan mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian provinsi ini. Komoditi yang dihasilkannya antara lain padi, kelapa, tebu, jambu mente, kopi, cengkeh, tembakau, karet dan kakao. Untuk sub sektor perikanan, terdiri atas perikanan laut, perairan umum dan perikanan budidaya.

Sektor unggulan di wilayah Jawa Timur tidak statis sepanjang tahun. Sektor industri masih menjadi sektor unggulan sampai dengan tahun 2003. Tetapi pada tahun 2004, sektor ini tidak dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan karena tidak melakukan ekspor dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan daerah Jawa Timur yang ditandai dengan nilai LQ sebesar 1. Sementara sektor transportasi menjadi sektor unggulan dari tahun 2001 s.d. tahun 2004. Sektor yang selalu menjadi sektor unggulan di Jawa Timur adalah sektor pertanian, listrik dan perdagangan (Tabel. 3.12.).

Tabel. 3.12. Perhitungan Location Quotient Jawa Timur

Sektor	Tahun						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Pertanian	1.26	1.23	1.23	1.21	1.20	1.20	1.21
Pertambangan	0.17	0.18	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22
Industri	1.07	1.06	1.01	1.00	0.98	0.98	0.96
Listrik	2.53	2.01	2.20	2.42	2.62	2.61	2.57
Bangunan	0.73	0.70	0.68	0.65	0.61	0.59	0.55
Perdagangan	1.51	1.57	1.64	1.68	1.72	1.73	1.78
Transportasi	1.12	1.06	1.11	1.04	0.98	0.91	0.85
Keuangan	0.55	0.59	0.57	0.55	0.53	0.54	0.54
Jasa	0.93	0.93	0.93	0.92	0.90	0.89	0.88

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian dalam bab ini dilakukan untuk menguji secara empiris interaksi antara kredit yang disalurkan perbankan dengan sektor unggulan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

4.1. Sumber dan Karakteristik Data

Analisis yang dilakukan terlebih dahulu adalah mencari sektor unggulan pada provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan interval waktu antara tahun 2001 s.d. 2007 (7 tahun) sehingga total observasi sebanyak 112 observasi (7 tahun x 4 triwulan x 4 provinsi)

Data yang digunakan, sumber data dan spesifikasi untuk mencari sektor unggulan adalah sebagai berikut:

- PDB dengan harga konstan tahun 2000. Data PDB triwulanan berasal dari Indikator Ekonomi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari berbagai tahun laporan PDB.
- PDRB dengan harga konstan tahun 2000. Data PDRB DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur berasal dari Jakarta dalam Angka, Jawa Barat dalam Angka, Jawa Tengah dalam Angka dan Jawa Timur dalam Angka yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk masing-masing tahun laporan PDRB. Data yang tersedia merupakan data tahunan, maka untuk mendapat data triwulanan, data PDB tahunan akan digunakan sebagai pembagi. Selanjutnya untuk mendapatkan PDRB riil triwulanan pada masing-masing provinsi, persentase hasil pembagi tersebut dikalikan dengan data PDB triwulanan.

Perhitungan PDRB triwulan provinsi A:

$$PDRB_{\text{triwulan provinsi A}} = \frac{PDRB_{\text{tahunan provinsi A}}}{PDB_{\text{tahunan}}} \times PDB_{\text{triwulan}} \quad (4.1)$$

Sementara untuk melihat interaksi antara sektor unggulan dan kredit perbankan, penelitian ini menggunakan data panel, yaitu kombinasi dari *cross section* dan *time series* 4 provinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan periode antara tahun 2001 s.d. 2007.

Data yang digunakan, sumber data dan spesifikasi untuk melihat interaksi antara kredit perbankan dan sektor unggulan adalah sebagai berikut:

- Total kredit, yang dinotasikan dengan CR, merupakan posisi (*outstanding*) kredit rupiah dan valuta asing bank umum per akhir triwulan yang disalurkan oleh perbankan di 4 provinsi. Sumber data berasal dari Laporan Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dari masing-masing provinsi.
- Jumlah kantor bank, yang dinotasikan dengan KB, merupakan data jumlah kantor bank umum yang terdiri dari Kantor Pusat, kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang berasal dari Statistik Ekonomi Keuangan Daerah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dari berbagai edisi untuk 4 provinsi.
- Suku bunga kredit riil, yang dinotasikan dengan SB, merupakan perhitungan rata-rata tertimbang Kredit Investasi riil (KI), Kredit Modal Kerja riil (KMK) dan Kredit Konsumsi riil (KK) Indonesia. Sumber data suku bunga kredit modal kerja, investasi dan konsumsi berasal dari Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dari berbagai edisi.

Rumus SB suatu provinsi :

$$SB = \frac{((SB_{KI} - I) \times Ot_{KI}) + ((SB_{KMK} - I) \times Ot_{KMK}) + ((SB_{KK} - I) \times Ot_{KK})}{Ot_{KI} + Ot_{KMK} + Ot_{KK}} \quad (4.2)$$

Dimana:

- SB_{KI} = Suku bunga kredit investasi
- SB_{KMK} = Suku bunga kredit modal kerja
- SB_{KK} = Suku bunga kredit konsumsi
- I = Inflasi
- Ot_{KI} = Posisi kredit investasi
- Ot_{KMK} = Posisi kredit modal kerja
- Ot_{KK} = Posisi kredit konsumsi

- Simpanan Dana Pihak Ketiga rupiah dan valuta asing yang dihimpun oleh Bank Umum, yang dinotasikan dengan DPK, merupakan simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari Giro, Tabungan dan Simpanan berjangka. Data DPK triwulanan 4 provinsi diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dari berbagai edisi.
- Rasio Non Performing Loan, yang dinotasikan dengan RNPL adalah rasio antara kredit dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (NPL) dengan total kredit. Sumber data NPL dan total kredit berasal dari Statistik Perbankan Indonesia yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dari berbagai edisi untuk 4 provinsi.

Perhitungan Rasio Non Performing Loan:

$$RNPL = \frac{\text{Kredit kurang lancar, diragukan dan macet (NPL)}}{\text{Total kredit}} \quad (4.3)$$

- Inflasi, yang dinotasikan dengan INF, merupakan data inflasi triwulanan yang bersumber dari Laporan Kebijakan Moneter yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia dari berbagai edisi. Data berasal dari BPS.

- PDRB sektor unggulan, yang dinotasikan dengan PDRBSU, merupakan penjumlahan PDRB sektor unggulan triwulanan yang telah dihitung dan diidentifikasi dari analisis *Location Quotient* (LQ). Data PDRB sektor berasal dari PDRB provinsi-provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha dari berbagai edisi yang dipublikasikan oleh BPS.
- Panjang Jalan, yang dinotasikan dengan PJ, merupakan data panjang jalan nasional dan provinsi yang bersumber dari Statistik Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Bina Marga. Data tahun 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 375/Kpts/M/2004 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3 dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 376/Kpts/M/2004 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.
- Jumlah tenaga kerja, yang dinotasikan dengan TK, merupakan data jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut provinsi yang dipublikasikan dalam data statistik Indonesia oleh Badan Pusat Statistik. Karena data Tenaga Kerja merupakan data tahunan, data tersebut kemudian diinterpolasi menjadi data triwulanan.
- Upah Minimum Regional, yang dinotasikan dengan UMR, merupakan perkembangan Upah Minimum Regional per bulan per provinsi. Data bersumber dari Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2007 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Karena data UMR merupakan data tahunan, data tersebut kemudian digunakan menjadi data triwulanan. Data berasal dari BPS.
- Luas Wilayah, yang dinotasikan dengan LW, merupakan data luas wilayah yang berasal dari Angka-angka Sektor Riil Bank Indonesia. Data luas daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10 tahun 1998, tanggal 8 Juni 1998 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2005, tanggal 18 April 2005.

- Jumlah Penduduk, yang dinotasikan dengan GOP, merupakan data persebaran penduduk Indonesia menurut provinsi yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada Angka-angka Sektor Riil. Data yang bersumber dari BPS tersebut adalah data tahunan oleh karena itu data kemudian diinterpolasi untuk mendapatkan data triwulan.

Sumber dan karakteristik data yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Sumber dan Karakteristik Data

Variabel	Keterangan	Sumber
Total kredit (CR)	Posisi kredit triwulanan bank umum	Laporan Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia
Jumlah kantor bank (JKB)	Jumlah kantor bank umum	Statistik Ekonomi Keuangan Daerah, Bank Indonesia
Suku bunga (SB)	Rata-rata tertimbang suku bunga KMK, KI dan KK	Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia
Dana pihak ketiga (DPK)	Terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka	Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia
Rasio Non Performing Loan (RNPL)	Rasio kredit dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (NPL) dengan total kredit	Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia
Inflasi	Data inflasi daerah	Laporan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia
PDRB sektor unggulan (PDRBSU)	Jumlah PDRB sektor unggulan yang diidentifikasi dalam analisis LQ	PDRB provinsi-provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha, Badan Pusat Statistik
Panjang jalan (PJ)	Panjang jalan nasional dan Provinsi	Statistik Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Bina Marga
Tenaga kerja (TK)	Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut provinsi	Data statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik
Jumlah penduduk (GOP)	Persebaran penduduk Indonesia menurut provinsi	Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2007, Bank Indonesia
Luas wilayah (LW)	Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 10 tanggal 8 Juni 1998 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 tanggal 18 April 2005	Angka-angka Sektor Riil Bank Indonesia, Bank Indonesia
Upah Minimum Regional (UMR)	Perkembangan UMR per bulan per provinsi	Angka-angka Sektor Riil, Bank Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, diolah

4.2. Spesifikasi Model

Penawaran kredit secara riil (L^S) ditentukan oleh kemampuan dan kemauan bank. Kemampuan bank sangat tergantung pada kondisi internal bank yang mencakup aset, Dana Pihak Ketiga, Rasio NPL, permodalan (CAR), tingkat efisiensi (BOPO) dan ketersediaan dana yang disalurkan. Sementara Permintaan kredit (L^D) ditentukan oleh GDP riil dan suku bunga kredit.

Pada penelitian Gosh dan Gosh (1999), fungsi penawaran kredit dipengaruhi oleh suku bunga riil, kapasitas pemberian kredit bank komersial (*lending capacity*) dan *current output*. Permintaan kredit dipengaruhi oleh suku bunga riil, *current output* dan *output gap*, harga saham dan inflasi. Sementara variabel penawaran kredit pada penelitian Juda Agung dan kawan-kawan (2001) adalah kapasitas kredit, suku bunga kredit, rasio modal terhadap aset dan NPL. Sedangkan permintaan kredit dipengaruhi oleh PDB dan inflasi. Pada penelitian Muliaman D. Hadad, permintaan kredit provinsi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga kredit konsumsi, jumlah kantor bank, PDRB, pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran. Model panel penawaran kredit dipengaruhi oleh tingkat suku bunga kredit konsumsi, jumlah kantor bank, rasio NPL, DPK dan tingkat pengangguran.

Variabel pada penelitian ini merupakan kombinasi dari variabel-variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu. Berbeda dari penelitian Gosh dan Gosh, penelitian ini memasukkan faktor-faktor mikro misalnya DPK, NPL dan ketersediaan jaringan kantor bank. Variabel NPL digunakan pada penelitian Juda Agung dan Muliaman. Tetapi variabel DPK dan jumlah kantor bank digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Muliaman.

Variabel suku bunga kredit pada penelitian adalah rata-rata tertimbang dari suku bunga kredit baik kredit investasi, modal kerja dan konsumsi. Berbeda dengan penelitian Juda Agung yang hanya menggunakan rata-rata tertimbang suku bunga kredit modal kerja dan kredit investasi.

Pemilihan variabel model pada penelitian ini berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran kredit. Tetapi berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini tidak membedakan penyaluran kredit berdasarkan penawaran dan permintaan kredit karena determinan permintaan kredit juga merupakan determinan pada penawaran kredit. Berbeda dengan penelitian terdahulu, misalnya Gosh dan Gosh dan Juda Agung yang membedakan disintermediasi perbankan berdasarkan fungsi permintaan dan penawaran. Penyusunan model berdasarkan fungsi permintaan dan penawaran pada dasarnya dilakukan untuk melihat fenomena *credit crunch* di Indonesia. Perbedaan lain yang sangat mendasar pada penelitian ini dengan penelitian lain adalah penggunaan variabel PDRB sektor unggulan sesuai dengan tujuan penelitian.

Maka model yang dikembangkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\ln Cr_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln DPK_{it} + \beta_2 \ln KB_{it} + \beta_3 SB_{it} + \beta_4 RNLP_{it} + \beta_5 INF_{it} + \beta_6 \ln PDRBSU_{it} + \varepsilon_{it} \quad (4.4)$$

Dimana:

- CR = Kredit perbankan rupiah dan valuta asing Bank Umum (dalam juta rupiah)
- DPK = Dana Pihak Ketiga Bank Umum (dalam juta rupiah)
- KB = Jumlah Kator Bank (dalam unit)
- SB = Rata-rata tertimbang Suku Bunga KI, KMK dan KK (dalam persen)
- RNLP = Rasio *Non Performing Loans* (dalam persen)
- INF = Inflasi (dalam persen)
- PDRBSU = Jumlah Produk Domestik Regional Bruto sektor unggulan menurut angka konstan tahun 2000 (dalam juta rupiah)
- i = Provinsi
- t = Tahun

Persamaan di atas menggunakan model Logaritma Natural (Ln). Model Logaritma Natural digunakan untuk mengetahui dampak perubahan variabel bebas terhadap variabel terikat dalam konteks elastisitasnya. Elastisitas adalah *degree of responsiveness* atau derajat kepekaan suatu variabel. Angka elastisitas adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu variabel tak bebas akan berubah sebagai reaksi atas perubahan satu persen variabel bebas. Tetapi variabel suku bunga, NPL dan inflasi tidak menggunakan model Logaritma Natural (Ln) karena ketiga variabel diatas sudah dalam bentuk persentase.

Secara teoritis, hubungan antara variabel bebas dengan penyaluran kredit diharapkan sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) diharapkan memiliki hubungan positif dengan penyaluran kredit perbankan. Peningkatan dana pihak ketiga memperlihatkan peningkatan penghimpunan dana, yang juga akan meningkatkan sumber pendanaan. Kondisi ini akan meningkatkan kemampuan penyaluran kredit perbankan.
2. Kantor Bank (KB) diharapkan memiliki hubungan positif dengan penyaluran kredit perbankan. Peningkatan jumlah kantor bank memperlihatkan bahwa jaringan dan infrastruktur perbankan meningkat. Peningkatan infrastruktur ini akan menjadi faktor yang dapat membantu aktivitas operasional perbankan. Jumlah kantor bank yang semakin besar juga menunjukkan semakin terkonsentrasinya perbankan di suatu daerah. Konsentrasi perbankan akan mendorong terjadinya kompetisi sehingga perbankan akan semakin aktif menawarkan kredit. Maka jika jumlah kantor bank meningkat, penyaluran kredit perbankan juga akan meningkat.
3. Suku bunga kredit (SB) diharapkan memiliki hubungan negatif dengan penawaran kredit. Mekanisme penawaran dan permintaan kredit akan bekerja pada pasar kredit. Pada pasar kredit, jika harga meningkat, yang ditunjukkan dengan kenaikan suku bunga, maka permintaan terhadap kredit akan turun.

4. Rasio *Non Performing Loans* (NPL) diharapkan memiliki hubungan negatif dengan penawaran kredit. Jika kredit kurang lancar, diragukan dan macet meningkat maka bank akan cenderung berhati-hati (prinsip kehati-hatian) atau bahkan mengurangi penyaluran kreditnya sehingga jumlah kredit akan menurun. Peningkatan NPL juga akan menuntut perbankan untuk meningkatkan cadangan penghapusan terhadap kredit-kredit tersebut, sehingga kapasitas dan kemampuan bank untuk menyalurkan kredit akan menurun.
5. Inflasi (INF) diharapkan memiliki hubungan negatif dengan penyaluran kredit. Jika inflasi naik maka penyaluran kredit akan turun dan sebaliknya jika inflasi turun maka penyaluran kredit akan naik. Hal ini terjadi karena inflasi mencerminkan kenaikan harga-harga relatif barang dan jasa secara terus menerus yang kemudian akan berdampak terhadap dunia usaha dan kondisi perekonomian. Kondisi ini akan mendorong perbankan lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian (prinsip prudensial) untuk menyalurkan kreditnya.
6. Produk Domestik Regional Bruto sektor unggulan (PDRBSU) diharapkan memiliki hubungan positif dengan penyaluran kredit. Peningkatan kinerja suatu sektor akan menimbulkan kepercayaan yang lebih besar pada perbankan untuk menyalurkan kreditnya. Perbankan pada akhirnya akan cenderung membiayai sektor-sektor unggulan di sebuah wilayah dengan rasionalisasi bahwa sektor yang memiliki kinerja baik akan mengurangi resiko yang dihadapi perbankan. Maka ketika PDRB sektor unggulan meningkat, penyaluran kredit juga akan meningkat.

Sementara untuk melihat apakah peningkatan kredit perbankan mendorong peningkatan PDRB sektor unggulan, model yang dikembangkan memiliki persamaan variabel yang digunakan pada penelitian Ade Devi Butar-butar. Penelitian Ade menggunakan variabel tenaga kerja, luas wilayah, jumlah perusahaan, investasi

swasta, investasi pemerintah dan kredit perbankan. Variabel tenaga kerja, luas wilayah dan kredit juga digunakan pada penelitian ini. Penggunaan variabel panjang jalan bertujuan untuk memasukkan salah satu indikator infrastruktur. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan output sektor unggulan dalam perannya memberikan pasar. Sementara Upah Minimum Regional berhubungan dengan tingkat upah masing-masing daerah yang akan menjadi biaya bagi proses produksi sektor-sektor unggulan.

Maka model yang dikembangkan untuk melihat apakah penyaluran kredit akan memengaruhi peningkatan output suatu sektor sehingga menjadi sektor unggulan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln PDRBSU_{it} = & \beta_0 + \beta_1 \ln CR_{it} + \beta_2 \ln PJ_{it} + \beta_3 \ln TK_{it} + \beta_4 \ln INF_{it} + \beta_5 \ln GOP \\ & + \beta_6 \ln LW_{it} + \beta_7 \ln UMR_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (4.5)$$

Dimana:

- PDRBSU = Jumlah Produk Domestik Regional Bruto sektor unggulan menurut angka konstan tahun 2000 (dalam juta rupiah)
- CR = Kredit perbankan rupiah dan valuta asing Bank Umum (dalam juta rupiah)
- PJ = Jumlah panjang jalan nasional dan provinsi (dalam km)
- TK = Jumlah tenaga kerja (dalam jiwa)
- INF = Inflasi (dalam persen)
- UMR = Upah Minimum Regional (dalam rupiah)
- LW = Luas Wilayah (dalam km²)
- GOP = Pertumbuhan penduduk (dalam ribu jiwa)
- i = Provinsi
- t = Tahun

Persamaan di atas juga menggunakan model Logaritma Natural (Ln) sehingga dapat diketahui elastisitasnya. Sama seperti persamaan (4.4.), variabel inflasi pada persamaan (4.5.) juga tidak menggunakan model Logaritma Natural (Ln).

Secara teoritis, hubungan antara variabel bebas dengan PDRB sektor unggulan diharapkan sebagai berikut:

1. Kredit (CR) diharapkan memiliki hubungan positif dengan output sektor unggulan. Peningkatan penyaluran kredit akan sangat penting bagi dunia usaha karena kredit yang disalurkan menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi aktivitas produksi. Maka ketika kredit perbankan meningkat, PDRB sektor unggulan juga akan meningkat.
2. Panjang jalan (PJ) diharapkan memiliki hubungan yang positif dengan PDRB sektor unggulan. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang sangat krusial bagi dunia usaha. Sarana transportasi ini berfungsi sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran. Peningkatan jumlah jalan akan membuka akses ke berbagai daerah yang selanjutnya juga akan berdampak pada peningkatan daerah pemasaran. Tersedianya jaringan jalan dengan baik juga akan menyebabkan terjadinya efisiensi dalam proses produksi karena kelancaran akses terhadap bahan baku akan mengurangi biaya produksi. Maka jika infrastruktur jalan meningkat, output sektor unggulan juga akan meningkat.
3. Tenaga kerja (TK) diharapkan memiliki hubungan negatif dengan PDRB sektor unggulan. Hal ini terjadi karena adanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan mendorong ditemukannya cara-cara baru dalam menangani pekerjaan tradisional sehingga menghemat pemakaian tenaga kerja. Penggunaan komputer, mesin tekstil, traktor dan sebagainya akan menghemat pemakaian tenaga kerja. Penurunan tenaga kerja pada dasarnya menunjukkan kecenderungan perubahan pada sektor usaha yang pada awalnya adalah padat karya menjadi padat modal.
4. Inflasi (INF) diharapkan memiliki hubungan negatif dengan PDRB sektor unggulan. Peningkatan inflasi akan berdampak bagi peningkatan biaya produksi bagi dunia usaha yang selanjutnya akan berdampak pada penurunan output sektor unggulan.

5. Jumlah penduduk (GOP) diharapkan memiliki hubungan positif dengan PDRB sektor unggulan. Jika jumlah penduduk naik maka pasar bagi output dunia usaha juga akan berkembang, yang kemudian akan mendorong peningkatan output sektor unggulan.
6. Luas Wilayah (LW) diharapkan memiliki hubungan positif terhadap PDRB sektor unggulan. Luas wilayah dengan sumber daya alam yang tersedia dalam wilayah tersebut akan membantu tersedianya bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi. Maka ketika luas wilayah dan sumber daya yang tersedia dalam wilayah tersebut meningkat, output PDRB sektor unggulan diharapkan juga akan meningkat.
7. Upah Minimum Regional (UMR) diharapkan memiliki hubungan negatif dengan PDRB sektor unggulan. Jika UMR meningkat maka akan menambah biaya bagi dunia usaha dalam menjalankan usahanya yang selanjutnya akan mendorong pada turunnya output sektor unggulan.

Dugaan tanda koefisien pada masing-masing variabel dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Dugaan Tanda koefisien

Variabel	Notasi	Dugaan tanda
Persamaan 4.4.		
Dana pihak ketiga	DPK	Positif (+)
Jumlah kantor bank	KB	Positif (+)
Suku bunga	SB	Negatif (-)
Rasio <i>non performing loan</i>	RNPL	Negatif (-)
Inflasi	INF	Negatif (-)
PDRB sektor unggulan	PDRBSU	Positif (+)
Persamaan 4.5.		
Kredit perbankan	CR	Positif (+)
Panjang jalan	PJ	Positif (+)
Tenaga kerja	TK	Negatif (-)
Inflasi	INF	Negatif (-)
Upah minimum Regional	UMR	Negatif (-)
Luas wilayah	LW	Positif (+)
Jumlah penduduk	GOP	Positif (+)

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, diolah

4.3. Teknik Estimasi Regresi Majemuk Data Panel

Pada ekonometrika, regresi merupakan metode estimasi yang membahas hubungan antara suatu variabel yang disebut dengan variabel yang dijelaskan atau terikat (*dependent variable*), dan variabel lainnya yang merupakan variabel yang menjelaskan atau bebas (*independent variable*). Regresi dalam pengertian modern adalah studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen (*independent variable*) dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui.

Regresi linear terdiri dari dua jenis yaitu regresi linear sederhana (*simple regression*) dan regresi linear majemuk (*multiple regression*). Kedua persamaan ini diklasifikasikan karena adanya perbedaan jumlah variabel dimana regresi linear sederhana memiliki satu variabel sementara regresi linear majemuk memiliki variabel lebih dari satu.

Persamaan regresi dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_n X_n + e_1 \quad (4.6)$$

Pada analisis regresi, terdapat dua karakteristik data yaitu set data ekonomi (*cross section*) dan data dengan waktu lebih dari satu waktu (*time series*). Penggabungan kedua data ini disebut data panel.

Dalam mencari hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas, analisis regresi sering dihadapkan pada data panel. Hal ini terjadi karena penggunaan data panel memberikan beberapa keuntungan, yaitu (i) dapat mengontrol heterogenitas setiap individu; (ii) panel data memberikan informasi yang lebih baik daripada data *time series* atau *cross section*, lebih bervariasi, mengurangi kolinearitas antar variabel, memberikan derajat kebebasan yang lebih tinggi dan lebih efisien; (iii) panel data lebih baik dalam mempelajari perubahan dinamis setiap variabel; (iv) panel data dapat dengan baik

untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak yang tidak terdeteksi dalam data *cross section* atau *time series*.

Spesifikasi model regresi data panel yang umum adalah sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta'x_{it} + \epsilon_{it} \quad t = 1, \dots, T; i = 1, \dots, n; j = 1, \dots, K. \quad (4.7)$$

Terdapat beberapa metode untuk melakukan estimasi terhadap parameter persamaan 4.4. dan persamaan 4.5. Tetapi sebelum melakukan estimasi, terlebih dahulu observasi harus dikelompokkan berdasarkan kerat lintang (*stacked data by cross section*) maupun berdasarkan waktu (*stacked data by date*)

Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk melakukan estimasi terhadap parameter model panel data adalah sebagai berikut:

4.3.1. Metode *Ordinary Least Square* (OLS)

Teknik yang paling sederhana untuk melakukan estimasi terhadap data panel adalah metode OLS yang diperkenalkan oleh Carl Friederich Gauss. Pendekatan metode ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Asumsi yang berlaku adalah perilaku data antar *cross section* sama dalam berbagai kurun waktu.

Metode OLS dapat memberikan penduga koefisien regresi yang baik atau bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dengan catatan bahwa regresi tersebut telah memenuhi asumsi-asumsi berikut:

1. Nilai harapan bersyarat dari U_i pada X_i tertentu sama dengan nol
$$E(U_i | X_i) = 0 \quad (4.8)$$
2. Variabel bebas mempunyai nilai yang tetap dalam sampel yang berulang atau variabel bebas merupakan variabel non stokastik sehingga variabel bebas tidak berhubungan dengan *error term*.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(U_i, U_j) &= E[U_i - E(U_i)] [U_j - E(U_j)] & (4.9) \\ &= E(U_i U_j), i \neq 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

3. Varians U_i pada X_i tertentu bersifat konstan (homoskedastisitas)

$$\begin{aligned}\text{Var}(U_i|X_i) &= E[(U_i - E(U_i))^2] \\ &= E(U_i^2) \\ &= \sigma^2\end{aligned}\quad (4.10)$$

4. Tidak boleh ada korelasi antara variabel bebas dan *error*

$$\begin{aligned}\text{Cov}(U_i, X_i) &= E[U_i - E(U_i)] [X_i - E(X_i)] \\ &= 0\end{aligned}\quad (4.11)$$

5. Nilai U_i pada X_i bebas dari nilai U_j pada X_j

$$E(U_i U_j) = 0, \quad i \neq j$$

Tidak boleh ada korelasi antara variabel bebas satu dengan variabel bebas lainnya (tidak ada multikolinearitas)

4.3.2. Metode Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Metode ini memungkinkan terjadinya intersep yang tidak konstan, atau intersep dapat berubah untuk setiap individu dan waktu karena adanya variabel-variabel yang tidak seluruhnya masuk dalam persamaan model. Kondisi inilah yang mendasari pembentukan model *fixed effect*.

Secara matematis, model efek tetap dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \gamma_2 W_{2t} + \gamma_3 W_{3t} + \dots + \gamma_N W_{Nt} + \delta_2 Z_{i2} + \delta_3 Z_{i3} + \dots + \delta_t Z_{it} + \varepsilon_{it} \quad (4.12)$$

Dimana:

Y_{it} = variabel terikat untuk individu ke- i dan waktu ke- t

X_{it} = variabel bebas untuk individu ke- i dan waktu ke- t

W_{it} dan Z_{it} merupakan variabel dummy yang didefinisikan sebagai berikut:

$W_{it} = 1$; untuk individu i ; $i = 1, 2, \dots, N$
 $= 0$; lainnya

$Z_{it} = 1$; untuk periode t ; $t = 1, 2, \dots, T$
 $= 0$; lainnya

Dari persamaan tersebut terlihat bahwa teknik model *Fixed Effect* merupakan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Model Efek tetap sama dengan regresi yang menggunakan variabel *dummy* sehingga dapat diestimasi dengan *Ordinary Least Square* (OLS).

4.3.3. Metode Efek Random (*Random Effect*)

Estimasi data panel pada *fixed effects* melalui teknik variabel *dummy* menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan.¹⁶ Untuk itu variabel residual bisa digunakan dimana metode ini disebut metode *random effect*. Pada metode efek random, perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada *error* model. Pada penggunaan *random effect method*, variasi pada intersep dapat memecahkan komponen *error* menjadi *error* untuk komponen individu (*cross section error*), *error* komponen waktu (*time series error*) dan *error* gabungan (*combination error*).

Secara matematis, model *random effect* dinyatakan sebagai berikut:

$$\bar{Y}_i = \alpha + \beta \bar{X}_i + \varepsilon_i ; \quad \varepsilon_i = u_i + v_i + w_i \quad (4.9)$$

Dimana:

- u_i = komponen *error* komponen individu
- v_t = komponen *error* komponen waktu
- w_{it} = komponen *error* gabungan

Pada penelitian ini, setelah data tersedia, data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan software *eviews* untuk memperoleh parameter. Sebelum melakukan pengujian signifikansi

16 Widarjono Agus, *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*, Penerbit Ekonisisa Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2005, Yogyakarta, hal. 259

variabel dengan uji Ekonometrika, penulis terlebih dahulu melakukan pemilihan model terbaik. Persamaan pemilihan model terbaik adalah:

$$F = \frac{\frac{SSR_1 - SSR_2}{N-1}}{\frac{SSR_2}{NT - N - k}} \quad (4.10)$$

Dimana:

- SSR_1 : *Sum Square Residual Ordinary Least Square*
 SSR_2 : *Sum Square Residual Fixed Effect*
N : Jumlah *cross section*
T : Jumlah *series*
K : Jumlah variabel bebas

Hasil uji F statistik antara Metode OLS dan *Fixed Effect* kemudian dibandingkan dengan F tabel. Jika F statistik lebih besar dari F tabel, maka asumsi bahwa intersep dan *slope* adalah sama tidak berlaku, artinya model panel data yang tepat adalah metode *Fixed Effect*.

Pemilihan model selanjutnya adalah antara model OLS dan *Random Effect* serta antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Tetapi pada penelitian ini, jumlah individu (*cross section*) lebih besar dari koefisien (termasuk intercep), maka metode *Random Effect* tidak bisa digunakan.¹⁷

4.4. Uji Statistika

Tahapan berikutnya setelah hasil estimasi diperoleh adalah melakukan evaluasi terhadap hasil regresi, meliputi:

17 Nachrowi, D.N, dan Usman, Hardius, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 327

4.4.1. Pengujian koefisien regresi secara parsial (Uji - t)

Uji t merupakan suatu prosedur dimana hasil sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nul (H_0). Keputusan untuk menerima dan menolak H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data. Pada uji hipotesis, ditolak atau diterima H_0 tergantung dari besarnya α yang digunakan. Semakin besar α semakin besar probabilitas menolak hipotesis yang benar. Biasanya α ditentukan secara sembarang (*arbiter*) yaitu 1%, 5% dan 10%.

Selanjutnya, keputusan untuk menolak hipotesis nul juga bisa dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis berdasarkan probabilitas t statistik dengan asumsi bahwa residual mempunyai distribusi normal. Nilai probabilitas disebut juga nilai p atau tingkat signifikansi marginal. Nilai probabilitas p ini menggambarkan tingkat signifikansi yang tepat berkaitan dengan besarnya nilai α yang digunakan.

Pada uji statistik t, keputusan menolak H_0 adalah jika nilai absolut statistik t hitung lebih besar dari nilai t kritis distribusi tabel t. Sementara itu pada prosedur uji probabilitas statistik t atau nilai p , yang perlu dilakukan adalah membandingkan nilai probabilitas p dengan nilai signifikansi α . Jika nilai probabilitas p lebih kecil dari nilai α , maka hipotesa H_0 diterima artinya variabel-variabel signifikan secara statistik. Prosedur uji probabilitas statistik t lebih cepat dan lebih mudah dilakukan karena hasil pengolahan dengan *views* telah memberikan informasi tentang besarnya nilai probabilitas p .

4.4.2. Uji Kebaikan Model (*goodness of fit*)

Regresi memerlukan analisis tentang seberapa baik garis regresi menjelaskan data (*goodness of fit*). Jika seluruh data terletak pada garis regresi atau semua residual bernilai nol, maka garis regresi sempurna. Tetapi hal tersebut jarang terjadi. Pada umumnya residual memiliki nilai baik positif atau negatif, yang artinya garis regresi tidak sempurna. Untuk mengukur seberapa besar garis regresi sesuai

dengan datanya atau untuk mengukur persentase total variasi Y yang dijelaskan oleh garis regresi dipergunakan konsep koefisien determinasi (R^2). *R-square* digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen.

Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1. Semakin nilai *R-square* mendekati 1 maka garis regresi semakin baik karena mampu menjelaskan data aktualnya. Maka semakin tinggi nilai koefisien determinasi, semakin mendekati 1, maka semakin tinggi kemampuannya untuk menjelaskan sebuah fakta.

Penggunaan determinasi R^2 pada regresi berganda mengalami persoalan karena nilai R^2 akan selalu meningkat ketika ada penambahan variabel independen walaupun penambahan variabel independen tersebut belum tentu mempunyai justifikasi atau pembenaran berdasarkan teori ekonomi. Untuk mengatasi persoalan ini, ekonometrika telah mengembangkan alternatif agar R^2 tidak mempunyai fungsi dari variabel independen. Alternatif yang dapat digunakan akan *Adjusted R²*.

4.4.3. Pengujian Model secara keseluruhan (Uji - F)

Pada analisis regresi yang mempunyai lebih dari satu variabel independen, perlu dievaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dilakukan dengan uji F. Uji F statistik dalam regresi berganda dapat digunakan untuk menguji signifikansi koefisien determinasi R^2 . Nilai F statistik dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hipotesis apakah tidak ada variabel independen yang menjelaskan variasi di sekitar nilai rata-ratanya dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) tertentu. Dengan kata lain uji F dapat digunakan untuk menguji H_0 bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria Penilaian Uji - F adalah jika $F_{tabel} > F_{statistik}$ maka H_0 diterima atau variabel-variabel independen tidak signifikan secara statistik. Sebaliknya jika $F_{tabel} < F_{statistik}$ maka H_0 ditolak atau variabel-variabel independen signifikan secara statistik.

Hasil perhitungan uji F telah ditampilkan langsung pada estimasi yang menggunakan software eviews. Sebagaimana uji hipotesis t, keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis nul dapat langsung dilakukan dengan melihat besarnya probabilitas yang menunjukkan besarnya α .

4.5. Pengujian Asumsi OLS

Metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan asumsi-asumsi tertentu menghasilkan estimator yang linear tidak bias dengan varian yang minimum (*Best Linear Unbiased Estimator* = BLUE). Oleh karena itu metode OLS sangat tergantung pada model regresi yang digunakan apakah menggunakan asumsi-asumsi tersebut. Ada tiga jenis uji asumsi sehubungan hal tersebut yaitu uji asumsi berkaitan dengan masalah adanya hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda (multikolinearitas), uji adanya varian residual yang tidak konstan (heteroskedastisitas), dan uji adanya hubungan residual antara satu observasi dengan observasi lain (autokorelasi).

4.5.1. Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya hubungan yang erat antara variabel independen dalam satu model regresi. Jika multikolinearitas masih dipertahankan dalam analisis regresi, maka:

1. Pada dasarnya regresi tersebut masih menghasilkan estimator yang BLUE tetapi menyebabkan suatu model yang mempunyai varian dan kovarian yang besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat.
2. Selanjutnya jika varian dan kovarian besar, interval estimasi akan cenderung lebih lebar dan nilai hitung statistik uji t akan kecil sehingga membuat variabel independen secara statistik tidak signifikan memengaruhi variabel independen.

3. Walaupun secara individu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen melalui uji statistik t, namun nilai koefisien determinasi (R^2) masih relatif tinggi.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana mendeteksi multikolinearitas? Jika suatu model mempunyai standar *error* besar sementara nilai statistik t rendah, kondisi ini merupakan indikasi awal adanya multikolinearitas. Tetapi untuk mendeteksi lebih lanjut, beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah:

1. Nilai R^2 tinggi tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan memengaruhi variabel dependen yang dapat diketahui melalui uji t.
2. Nilai uji F secara statistik signifikan yang berarti semua variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen tetapi statistik t tidak ada yang signifikan.

Kedua kondisi diatas menunjukkan adanya kontraproduktif dimana berdasarkan uji t secara individual variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen namun secara bersama-sama variabel independen memengaruhi variabel dependen.

4.5.2. Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi yang dibangun dalam metode OLS untuk menghasilkan estimator yang BLUE adalah varians dan residual konstan (homoskedastisitas). Tetapi pada analisis regresi seringkali varian dan residual tidak konstan sehingga terjadi heteroskedastisitas. Kondisi ini sering ditemukan pada data *cross section*.

Heteroskedastisitas akan menyebabkan varian koefisien regresi menjadi lebih besar. Heteroskedastisitas juga menyebabkan interval kepercayaan semakin lebar yang selanjutnya akan menyebabkan uji hipotesis menjadi tidak akurat. Artinya heteroskedastisitas akan berdampak pada keakuratan kesimpulan.

Pada regresi panel data, cara untuk mengatasi heteroskedastisitas adalah dengan uji *white*. Uji *white* dilakukan dengan mengkonsistenkan varian error.

4.5.3. Autokorelasi

Autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dengan kata lain, jika dikaitkan dengan asumsi metode OLS, maka autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual (*error*) dengan residual (*error*) lainnya. Sementara salah satu asumsi metode OLS sehubungan dengan residual (*error*) adalah tidak adanya hubungan antar residual (*error*). Berbeda dengan heteroskedastisitas yang sering terjadi pada *cross section*, autokorelasi justru sering terjadi pada data runtut waktu (*time series*).

Jika autokorelasi masih ada dalam regresi, maka estimator OLS yang dihasilkan tidak lagi BLUE, melainkan hanya LUE karena varian tidak lagi minimum (*no longer best*). Kondisi tersebut akan menyebabkan perhitungan standar *error* tidak bisa dipercaya kebenarannya. Autokorelasi juga akan berdampak pada tidak akuratnya interval estimasi maupun uji hipotesis, sehingga uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi *t* maupun *F* tidak bisa dipercaya untuk melakukan evaluasi terhadap hasil regresi.

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya pelanggaran asumsi autokorelasi pada metode OLS adalah metode Durbin-Watson. Aturan kasar (*Rule of Thumb*) nilai uji statistik Durbin Watson (*d*) adalah dua. Jika nilai *d* adalah 2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. Pada regresi panel data, Metode Fixed Effect tidak membutuhkan asumsi terbebasnya model dari serial korelasi sehingga uji tentang autokorelasi dapat diabaikan.¹⁸

18 Nachrowi, D.N, dan Usman, Hardius, Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 330

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil

Setelah dilakukan estimasi model, maka ada dua hasil yang diperoleh yaitu hasil dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dan metode *Fixed Effect*. Maka perlu dilakukan pemilihan model terbaik.

5.1.1. Pemilihan Model Terbaik

Hasil uji F statistik untuk pemilihan model terbaik antara Metode OLS dan *Fixed Effect* pada persamaan penyaluran kredit perbankan (persamaan 4.4) adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{\frac{3,090 - 0,688}{4 - 1}}{\frac{0,688}{(4 \times 28) - 4 - 6}}$$

$$F = 118,703$$

Hasil uji F statistik lebih besar dari F tabel karena nilai F tabel dengan numerator 3 dan denominator 102 adalah $3,846 \times 10^{-33}$. Karena nilai F statistik lebih besar dari F tabel, maka model yang terbaik adalah *Fixed Effect*.

Sementara hasil uji F statistik untuk pemilihan model terbaik antara Metode OLS dan *Fixed Effect* pada persamaan (4.5) adalah :

$$F = \frac{\frac{1,565 - 1,231}{4 - 1}}{\frac{1,231}{(4 \times 28) - 4 - 7}}$$

$$F = 9,161$$

Hasil uji F statistik lebih besar dari F tabel karena nilai F tabel dengan numerator 3 dan denominator 101 adalah 2.03×10^{-5} . Karena nilai F statistik lebih besar dari F tabel, maka model yang terbaik adalah *Fixed Effect*.

5.1.2. Hasil Regresi Panel Data

Hasil estimasi panel data terhadap persamaan penyaluran kredit perbankan pada Bank Umum periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2007 (persamaan 4.4) adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.1. Hasil Estimasi Panel Data Persamaan (4.4.)

Variabel	Koefisien	Uji t - Probabilita	Tanda Koefisien
LOG(DPK?)	1.264523	0.0000*	+ (sesuai hipotesa)
LOG(KB?)	0.260807	0.0117**	+ (sesuai hipotesa)
(SB?)	-0.060088	0.0000*	- (sesuai hipotesa)
(RNPL?)	-0.005386	0.0218**	- (sesuai hipotesa)
INF?	-0.048404	0.0000*	- (sesuai hipotesa)
LOG(PDRBSU?)	0.219158	0.0000*	+ (sesuai hipotesa)
Fixed Effects			
_DKI—C	-11.21736		
_JABAR—C	-9.781530		
_JATENG—C	-9.660889		
_JATIM—C	-10.24411		
R-squared	0.988486	Mean dependent var	18.06126
Adjusted R-squared	0.987470	S.D. dependent var	0.733806
S.E. of regression	0.082139	Sum squared resid	0.688177
Log likelihood	126.2425	F-statistic	973.0025
Durbin-Watson stat	0.696632	Prob(F-statistic)	0.000000
Tanda * berarti signifikan pada level 1%; Tanda ** berarti signifikan pada level 5%			

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, diolah

Sementara hasil estimasi panel data terhadap persamaan PDRB Sektor Unggulan periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2007 (persamaan 4.5) adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.2. Hasil Estimasi Panel Data Persamaan (4.5.)

Variabel	Koefisien	Uji t - Probabilita	Tanda Koefisien
LOG(CR?)	0.199726	0.0364**	+ (sesuai hipotesa)
LOG(PJ?)	0.203455	0.1859	+ (sesuai hipotesa)
LOG(TK?)	-0.793210	0.0520***	- (sesuai hipotesa)
(INF?)	-0.006255	0.1392	- (sesuai hipotesa)
LOG(GOP?)	0.814403	0.2635	+ (sesuai hipotesa)
LOG(LW?)	2.503300	0.0001*	+ (sesuai hipotesa)
LOG(UMR?)	-0.246169	0.1008	- (sesuai hipotesa)
Fixed Effects			
_DKI-C	4.021797		
_JABAR-C	-6.417644		
_JATENG-C	-6.158344		
_JATIM-C	-6.786236		
R-squared	0.867156	Mean dependent var	17.45573
Adjusted R-squared	0.854004	S.D. dependent var	0.289022
S.E. of regression	0.110434	Sum squared resid	1.231757
Log likelihood	93.64207	F-statistic	65.92925
Durbin-Watson stat	0.381388	Prob(F-statistic)	0.000000
Tanda * berarti signifikan pada level 1%, tanda ** berarti signifikan pada 5% dan tanda *** berarti signifikan pada 10%			

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, diolah

5.1.3. Evaluasi Hasil Regresi Panel Data

Berdasarkan Tabel 5.1., variabel Dana Pihak Ketiga, Jumlah Kantor Bank, Suku Bunga Kredit, Rasio NPL dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor unggulan pada fungsi penyaluran kredit perbankan secara statistik signifikan memengaruhi penyaluran kredit perbankan. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa seluruh variabel signifikan memengaruhi penyaluran kredit perbankan. Tanda pada seluruh variabel juga sesuai dengan yang diharapkan, yaitu :

- Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki hubungan yang searah (tanda yang positif) dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Semakin meningkat DPK maka akan semakin besar dana yang dihimpun oleh perbankan yang kemudian akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan bank untuk

menyalurkan kredit. Sebaliknya semakin menurun DPK maka akan semakin kecil juga dana yang dihimpun oleh perbankan sehingga kapasitas dan kemampuan bank untuk menyalurkan kredit akan semakin berkurang.

- Jumlah kantor bank (KB) memiliki hubungan yang searah (tanda yang positif) dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Artinya jika KB meningkat maka penyaluran kredit perbankan juga akan meningkat. Sebaliknya jika KB menurun maka penyaluran kredit perbankan juga akan berkurang.
- Suku bunga kredit (rata-rata tertimbang suku bunga kredit investasi, modal kerja dan konsumsi) memiliki hubungan tidak searah (negatif) dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Artinya semakin tinggi suku bunga, maka biaya juga akan meningkat. Kondisi ini akan menyebabkan penurunan permintaan kredit yang kemudian akan berdampak terhadap penyaluran kredit perbankan. Sebaliknya semakin rendah suku bunga kredit, maka biaya juga akan semakin menurun. Penurunan biaya akan menyebabkan peningkatan permintaan kredit. Naiknya permintaan akan menjadi stimulus bagi perbankan untuk juga meningkatkan penyaluran kreditnya. Fakta ini menunjukkan bahwa tingginya suku bunga kredit menjadi salah faktor bagi dunia usaha untuk mengajukan permohonan kredit kepada bank.
- Rasio *Non Performing Loan* (RNPL) memiliki hubungan tidak searah (negatif) dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Ketika RNPL meningkat, kredit yang dapat disalurkan oleh perbankan akan menurun. NPL yang tinggi menyebabkan bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar terhadap kredit-kredit yang kurang lancar dan macet tersebut sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit juga berkurang. Sebaliknya semakin menurunnya kredit yang kurang lancar dan macet akan menurunkan cadangan penghapusan yang harus dipersiapkan

oleh perbankan sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit semakin meningkat.

- Inflasi memiliki hubungan tidak searah (negatif) dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Inflasi yang mencerminkan kenaikan harga-harga relatif barang dan jasa secara terus menerus akan mendorong perbankan juga meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya. Rasionalisasi peningkatan prinsip prudensial adalah inflasi akan menyebabkan perlambatan terhadap perekonomian yang kemudian akan berpengaruh terhadap dunia usaha. Maka ketika inflasi meningkat, penyaluran kredit perbankan justru menurun.
- Produk Domestik Regional Bruto sektor unggulan (PDRBSU) memiliki hubungan yang searah (positif) dan signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan, artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyaluran kredit perbankan. Sebaliknya jika output sektor unggulan menurun, penyaluran kredit perbankan juga akan cenderung menurun.

Nilai *Adjusted R square* pada persamaan penyaluran kredit perbankan adalah 0.987470. Hal ini berarti bahwa penyaluran kredit perbankan dapat dijelaskan oleh model sebesar 98,74 persen. Sementara probabilitas hasil perhitungan *eviews* sangat kecil yaitu 0,0000%, masih dibawah 1%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik.

Interpretasi selanjutnya atas hasil regresi adalah besarnya pengaruh peningkatan variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu:

- Jika variabel lain tetap, peningkatan 1% variabel dana pihak ketiga akan menyebabkan peningkatan penyaluran kredit perbankan sebesar 1,264%.

- Jika variabel lain tetap, peningkatan 1% variabel jumlah kantor bank akan menyebabkan peningkatan penyaluran kredit perbankan sebesar 0,260%
- Jika variabel lain tetap, peningkatan 1% variabel suku bunga akan menyebabkan penurunan penyaluran kredit perbankan sebesar 0,060%.
- Jika variabel lain tetap, peningkatan 1% variabel rasio NPL akan menyebabkan penurunan penyaluran kredit perbankan sebesar 0,005%.
- Jika variabel lain tetap, peningkatan 1% variabel inflasi akan menyebabkan penurunan penyaluran kredit perbankan sebesar 0,048%.
- Jika variabel lain tetap, peningkatan 1% variabel PDRB sektor unggulan akan meningkatkan penyaluran kredit perbankan sebesar 0,219%.

Penggunaan Ln pada persamaan menunjukkan tingkat elastisitas masing-masing variabel. Dari hasil tersebut, variabel DPK elastis karena nilai elastisitasnya lebih besar dari 1. Sementara variabel jumlah kantor bank, suku bunga, NPL, inflasi dan PDRB sektor unggulan inelastis.

Pada persamaan (4.5), tabel 5.2. menunjukkan bahwa variabel kredit, tenaga kerja, Upah Minimum Regional, secara statistik signifikan memengaruhi output sektor unggulan. Tetapi panjang jalan, inflasi, dan jumlah penduduk secara statistik tidak signifikan memengaruhi output sektor unggulan. Tabel 5.2. juga memperlihatkan bahwa seluruh variabel mempunyai tanda sesuai dengan yang diharapkan, yaitu :

- Kredit perbankan memiliki hubungan yang searah (positif) dan signifikan terhadap PDRB sektor unggulan. Artinya ketika kredit perbankan meningkat, maka dunia usaha akan mendapat stimulus pembiayaan. Penambahan pembiayaan akan mendorong peningkatan output sektor unggulan. Sebaliknya

ketika kredit perbankan menurun maka PDRB sektor unggulan juga akan mengalami penurunan

- Panjang jalan memiliki hubungan yang searah (positif) dengan output sektor unggulan. Ketika panjang meningkat maka output sektor unggulan akan meningkat dan sebaliknya ketika panjang jalan turun, maka output sektor unggulan juga akan turun. Hal ini terjadi karena peningkatan sarana infrastruktur, dalam hal ini panjang jalan, akan membantu kelancaran proses produksi, dari mulai transportasi bahan baku sampai transportasi pemasaran produk. Tetapi variabel ini tidak signifikan memengaruhi peningkatan output sektor unggulan.
- Tenaga kerja memiliki hubungan yang tidak searah (negatif) dan signifikan dengan PDRB sektor unggulan. Artinya ketika tenaga kerja mengalami penurunan maka PDRB sektor unggulan akan mengalami peningkatan. Sebaliknya ketika tenaga kerja mengalami peningkatan maka PDRB sektor unggulan akan menurun.
- Inflasi memiliki hubungan yang tidak searah (negatif) dengan PDRB sektor unggulan. Hasil ini sesuai dengan harapan awal dimana ketika inflasi naik, maka PDRB sektor unggulan akan turun dan sebaliknya ketika inflasi turun, maka PDRB sektor unggulan akan naik. Hal ini terjadi karena peningkatan inflasi akan berdampak terhadap peningkatan biaya produksi bagi dunia usaha yang selanjutnya akan berdampak pada penurunan output sektor unggulan. Tetapi variabel ini tidak signifikan memengaruhi PDRB sektor unggulan.
- Upah Minimum Regional memiliki hubungan tidak searah (negatif) terhadap output sektor unggulan. Hasil ini konsisten dengan harapan awal bahwa UMR akan berbanding terbalik dengan output sektor unggulan. Jika UMR turun, maka dunia usaha memiliki modal yang lebih besar dalam mendorong peningkatan proses produksi sehingga output sektor unggulan akan meningkat. Sebaliknya, ketika UMR mengalami

peningkatan, maka output sektor unggulan akan mengalami penurunan. Tetapi variabel ini tidak signifikan memengaruhi PDRB sektor unggulan.

- Luas Wilayah memiliki hubungan searah (positif) dan signifikan dengan output sektor unggulan. Artinya semakin luas suatu wilayah, maka semakin luas pula lahan dan sumber daya yang ada pada wilayah tersebut. Ketersediaan lahan sumber daya alam merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung proses produksi. Oleh karena itu semakin luas suatu wilayah maka semakin besar output sektor unggulan. Sebaliknya ketika luas wilayah berkurang maka PDRB sektor unggulan juga akan turun.
- Jumlah Penduduk memiliki hubungan yang searah (positif) dengan output sektor unggulan. Artinya peningkatan jumlah penduduk akan memperbesar pasar yang dimiliki oleh suatu wilayah, yang kemudian akan meningkatkan permintaan. Sehingga ketika jumlah penduduk meningkat maka output sektor unggulan akan meningkat dan sebaliknya ketika jumlah penduduk turun, maka output sektor unggulan juga akan turun. Tetapi variabel ini tidak signifikan memengaruhi PDRB sektor unggulan.

Nilai *Adjusted R square* pada persamaan PDRB sektor unggulan adalah 0.854004. Hal ini berarti bahwa PDRB sektor unggulan dapat dijelaskan oleh model sebesar 85,4 persen. Sementara probabilitas hasil perhitungan *eviews* sangat kecil yaitu 0,0000%, masih dibawah 1%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik.

Interpretasi selanjutnya atas hasil regresi adalah besarnya pengaruh peningkatan variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu:

- Jika variabel lain tetap, peningkatan 1% variabel kredit perbankan akan meningkatkan PDRB sektor unggulan sebesar 0,199%.
- Jika variabel lain tetap, peningkatan 1% variabel tenaga kerja akan menyebabkan penurunan PDRB sektor unggulan sebesar 0,793%
- Jika variabel lain tetap, peningkatan 1% variabel luas wilayah akan meningkatkan PDRB sektor unggulan sebesar 2,503%.

Penggunaan Ln pada persamaan menunjukkan tingkat elastisitas masing-masing variabel. Dari hasil tersebut, variabel luas wilayah elastis karena nilai elastisitasnya lebih besar dari 1. Sementara variabel kredit perbankan dan tenaga kerja inelastis.

5.1.4. Pengujian Pelanggaran Asumsi

Pada regresi panel data, mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat hasil *R square*, uji t statistik dan F statistik. Ketika *R square* tinggi tetapi hanya sedikit variabel independen yang memengaruhi secara signifikan variabel independen, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas pada model. Ketika nilai uji F secara statistik signifikan tetapi t statistik tidak ada yang signifikan, maka kondisi ini juga merupakan indikasi adanya multikolinearitas.

Pada persamaan (4.4) dan (4.5), nilai uji F statistik signifikan. Sedangkan uji t statistik pada kedua persamaan juga menunjukkan hasil yang signifikan. Nilai *R square* pada kedua persamaan tersebut besar, diatas 0,8. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada kedua persamaan.

Pelanggaran asumsi berikutnya adalah heteroskedastisitas. Pada regresi panel data, heteroskedastisitas dapat diatasi dengan uji *white* yang dilakukan dengan cara mengkonsistenskan varian *error*. Hasil estimasi kedua persamaan yang telah mengkonsistenskan varian *error* dapat dilihat pada lampiran 3.

Selanjutnya, pelanggaran asumsi autokorelasi dapat dideteksi dengan melihat nilai Durbin-Watson (d). Jika nilai d adalah 2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. Tetapi pada regresi panel data, Metode *Fixed Effect* tidak membutuhkan asumsi terbebasnya model dari serial korelasi sehingga uji tentang autokorelasi dapat diabaikan.

5.2. Analisis Interaksi Kredit Perbankan Dan Sektor Unggulan

Perekonomian Indonesia terus mengalami kemajuan setelah krisis ekonomi pada tahun 1997. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari 3,83% pada tahun 2001 menjadi 5,69% pada tahun 2007. Namun pertumbuhan ini masih berjalan lambat karena beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah justru menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Misalnya kenaikan BBM pada tahun 2005 telah membuat perekonomian Indonesia kembali mengalami penurunan menjadi 5,51%.

Hal yang sama juga terjadi pada perekonomian di keempat daerah dimana pada tahun 2001 sampai tahun 2002, pertumbuhan ekonomi keempat provinsi masih berjalan lambat, rata-rata 4%. Restrukturisasi yang dilakukan dalam perekonomian perlahan memberikan hasil dimana pertumbuhan ekonomi keempat daerah terus meningkat melebihi nilai 6% sampai dengan tahun 2007. Namun pertumbuhan ekonomi di daerah pada tahun 2006 juga mengalami penurunan akibat kebijakan kenaikan BBM tahun 2005.

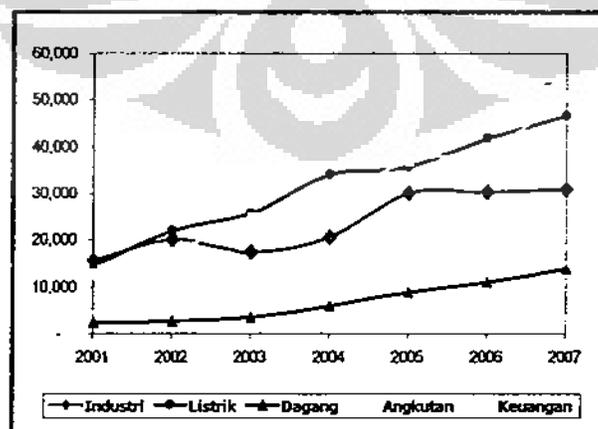
Seperti halnya pertumbuhan ekonomi, kinerja perbankan nasional melalui fungsinya sebagai lembaga intermediasi juga dianggap belum memuaskan. Hal ini dicerminkan oleh rasio jumlah kredit yang disalurkan terhadap jumlah simpanan masyarakat yang berhasil dikumpulkan (*LDR/Loan to Deposit Ratio*). Pada tahun 2000 LDR perbankan nasional bernilai 32,17% dan hanya mengalami peningkatan sebesar 16% sampai tahun 2007 sehingga besar LDR di tahun 2007 hanya sebesar 53,64%.

5.2.1. Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan hasil estimasi, PDRB sektor unggulan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Ketika PDRB sektor unggulan meningkat maka kinerja perekonomian daerah tersebut membaik sehingga kondisi ini menjadi stimulus bagi perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit. Sebaliknya kredit perbankan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB sektor unggulan. Ketika kredit perbankan mengalami peningkatan maka sebuah wilayah akan mendapatkan sumber pembiayaan tambahan baik untuk proses pembangunan maupun proses produksi yang selanjutnya akan mendorong peningkatan PDRB sektor unggulan.

Penyaluran kredit perbankan di DKI Jakarta terus mengalami penurunan. Posisi kredit yang disalurkan tahun 2000 mencapai 61 persen dari total kredit Indonesia. Persentase ini menurun hingga mencapai 37 persen pada tahun 2007. Walaupun menurun, kredit yang disalurkan di Jakarta masih lebih besar bila dibandingkan dengan provinsi lainnya. Namun kredit yang disalurkan di wilayah DKI Jakarta tidak seluruhnya dialokasikan kepada sektor-sektor unggulan. Sektor industri yang mendapat kredit yang cukup besar bukan sektor unggulan di wilayah DKI Jakarta. Sebaliknya sektor bangunan dan jasa yang lebih berpotensi tidak menjadi sektor prioritas untuk penyaluran kredit bagi perbankan di wilayah DKI Jakarta. (Grafik 5.1.)

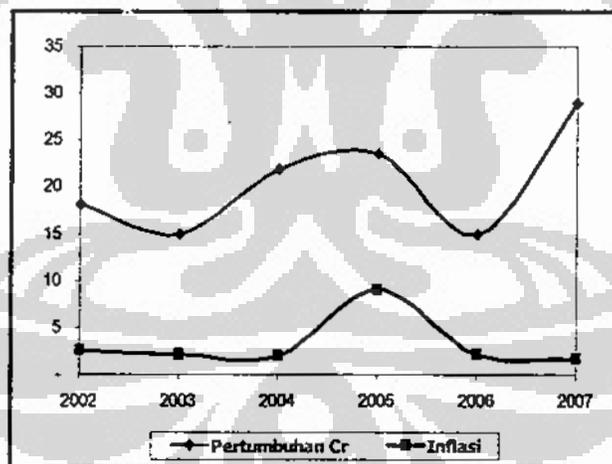
Grafik 5.1. Perkembangan Kredit Bank Umum DKI Jakarta per Sektor Ekonomi (triliun rupiah)



Sumber: Bank Indonesia

Kredit perbankan yang sebagian besar sudah disalurkan sektor unggulan memperlihatkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) perbankan. Belum pulihnya sektor riil karena adanya gejolak ekonomi menjadi salah satu faktor penentu penyaluran kredit perbankan. Jika ketidakpastian ekonomi meningkat, bank akan memutuskan untuk menahan kredit karena dalam kondisi yang tidak stabil, bank akan kesulitan mengevaluasi proyek-proyek yang menguntungkan. Perbankan juga akan kesulitan memperkirakan kemungkinan terjadinya pinjaman yang gagal bayar. Sebaliknya, jika ketidakpastian ekonomi menurun, bank akan lebih berani untuk menyalurkan kredit. Ketidakpastian ekonomi menyebabkan perbankan memiliki persepsi tingginya resiko yang akan dihadapi jika memberikan kredit kepada sektor riil. *Cost of doing business* di Indonesia dianggap belum menarik, maka cukup sulit mengharapkan para pemilik uang untuk menempatkan uangnya guna membuka usaha di sektor riil.

Grafik 5.2. Hubungan Pertumbuhan kredit dan Inflasi DKI Jakarta (Persen)



Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, diolah

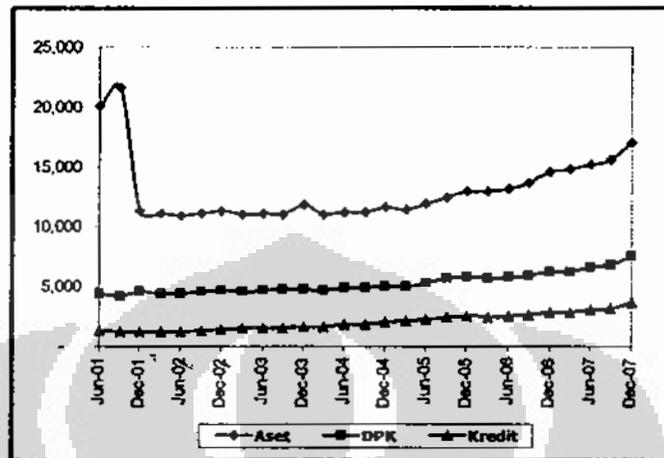
Pada grafik 5.2. terlihat bahwa pertumbuhan kredit akan menurun jika inflasi meningkat dan sebaliknya kredit akan meningkat jika inflasi mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2003, dimana ketika tingkat inflasi turun, penyaluran kredit juga turun. Penyaluran kredit pada tahun 2005 masih mengalami peningkatan walaupun tingkat inflasi meningkat sangat tinggi, mencapai 9%. Tetapi

peningkatan ini tidak setajam peningkatan yang terjadi pada tahun 2003 ke tahun 2004. Pada provinsi DKI Jakarta, respon kredit terhadap peningkatan tingkat inflasi yang dipacu oleh kenaikan BBM pada tahun 2005 terlihat pada tahun 2006. Peningkatan inflasi mendorong perbankan untuk menahan penyaluran kreditnya. Setelah tingkat inflasi turun di tahun 2007, penyaluran kredit kembali mengalami peningkatan.

Jika dibandingkan dengan wilayah lain, DKI Jakarta mendapat pembiayaan terbesar dari kredit perbankan. Besarnya capaian kredit di provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan oleh salah satu faktor yaitu kelengkapan infrastruktur dan jaringan yang dimiliki. Jumlah kantor bank yang semakin besar pada dasarnya memperlihatkan jaringan perbankan yang semakin luas. Selain itu, semakin banyak jumlah kantor bank maka semakin terkonsentrasi bank di suatu daerah. Perluasan jaringan, peningkatan infrastruktur dan peningkatan konsentrasi ini akan mendorong peningkatan aset dan dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh perbankan.

Penghimpunan dana pihak ketiga di provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan (grafik 5.3.). Bahkan gejolak ekonomi yang terjadi cenderung tidak memengaruhi DPK perbankan di wilayah DKI Jakarta. Hal ini terjadi karena sumber DPK lebih bervariasi baik dari dalam dan luar negeri sehingga DPK cenderung tidak responsif terhadap gejolak perekonomian. Misalnya, derasnya arus investasi portofolio asing ke bursa saham maupun obligasi telah menyebabkan beralihnya kepemilikan saham dan obligasi dari kepemilikan domestik ke asing. Masuknya devisa asing tersebut akan dibeli rupiah untuk pembelian portofolio saham atau obligasi. Tetapi, pada kondisi dimana perekonomian sedang tidak stabil, maka limpahan mata uang rupiah dari hasil penjualan saham atau obligasi tersebut akan masuk ke sistem perbankan sambil menunggu perbaikan perekonomian terutama sektor riil.

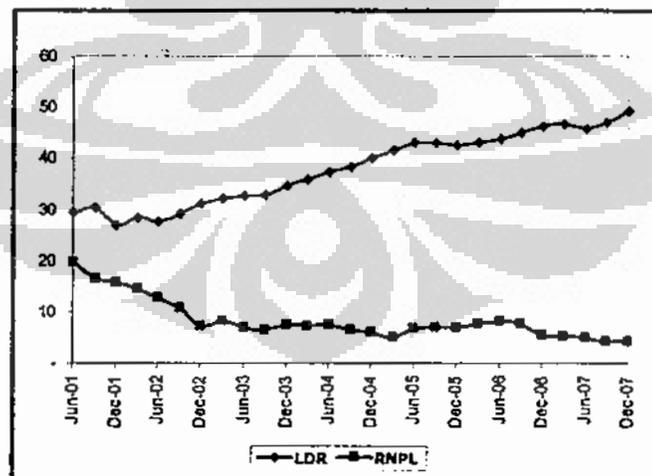
Grafik 5.3. Perkembangan Aset, DPK dan Kredit Bank Umum DKI Jakarta (triliun rupiah)



Sumber: Bank Indonesia

Peningkatan aset dan DPK perbankan di DKI Jakarta ternyata tidak diimbangi dengan ekspansi kredit perbankan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari nilai *Loan to Defisit Ratio* (LDR). Nilai LDR pada dasarnya menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyalurkan dana pihak ketiga (DPK) yang telah berhasil dihimpun. Maka ketika LDR rendah artinya DPK yang telah dihimpun oleh perbankan tidak seluruhnya dapat disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat.

Grafik 5.4. Perkembangan LDR dan NPL Bank Umum DKI Jakarta (Persen)



Sumber: Bank Indonesia

Pada Juni 2001 LDR provinsi DKI Jakarta bernilai 29,49% dan hanya meningkat menjadi 49,38% pada Desember 2007 (Grafik 5.4.).

Walaupun belum optimal, tetapi peningkatan LDR tersebut tidak bisa dilepaskan dari penurunan rasio NPL yang cukup signifikan. Rasio NPL pada tahun 2001 sebesar 15,61% menjadi 4,28 persen pada tahun 2007. Berdasarkan teori, penurunan NPL akan berdampak pada peningkatan penyaluran kredit perbankan yang kemudian akan meningkatkan LDR.

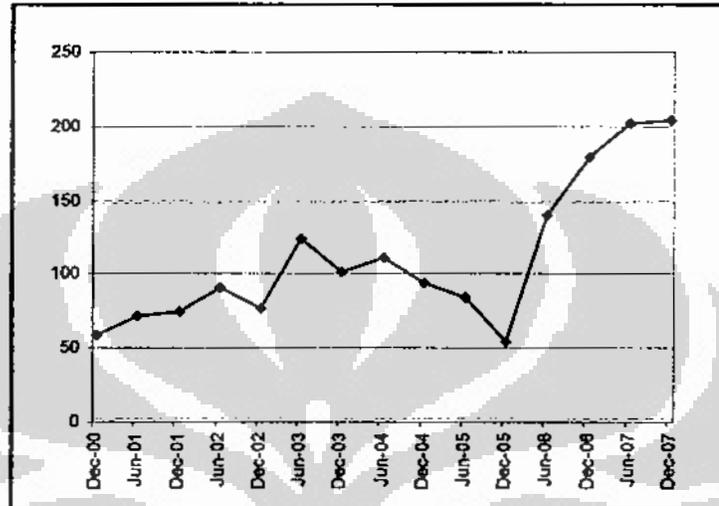
Pertanyaannya yang perlu dijawab dari fenomena rendahnya penyaluran kredit perbankan di DKI Jakarta adalah apa determinan yang menyebabkan rendahnya penyaluran kredit perbankan tersebut? Hal ini diperlukan agar para pengambil kebijakan dapat membuat kebijakan yang efektif ke depan.

Salah satu variabel yang signifikan memengaruhi lemahnya ekspansi kredit perbankan adalah suku bunga kredit. Karena suku bunga merupakan biaya yang harus ditanggung atas imbal jasa kredit yang diterima oleh debitur, maka ketika suku bunga naik, biaya atas fasilitas kredit yang diterima juga akan meningkat. Perbesaran biaya tersebut akan sangat dihindari oleh dunia usaha. Motif inilah yang kemudian mendorong perbankan menunda ekspansi usaha ketika suku bunga sedang tinggi. Dunia usaha akan mengurangi permintaan terhadap kredit perbankan.

Paradoks rendahnya penyaluran kredit bank dan tingginya penghimpunan DPK akan menyebabkan LDR terus meningkat. Semakin rendah LDR sebuah bank maka bank tersebut diwajibkan untuk meningkatkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia, sehingga praktis likuiditas perbankan akan semakin tersedot oleh Bank Indonesia. Maka untuk memperkecil LDR, perbankan kemudian mengatasi kelebihan likuiditasnya melalui kepemilikan SBI (Surat Berharga Bank Indonesia). Pada tahun 2000, secara nasional SBI berjumlah Rp 58,7 triliun. Jumlah tersebut terus meningkat menjadi Rp 203,9 triliun pada bulan Desember 2007 (Grafik 5.5.). Faktor lain yang mendorong perbankan menempatkan kelebihan likuiditasnya di SBI adalah suku bunga SBI masih lebih tinggi dari suku

bunga simpanan bank sehingga bank masih memperoleh margin bunga walaupun kecil.

Grafik 5.5. Perkembangan SBI Nasional (triliun rupiah)



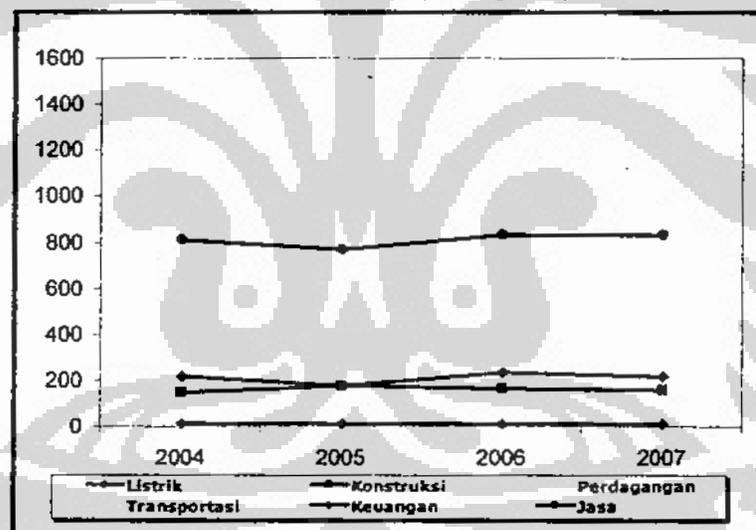
Sumber: Bank Indonesia

Hasil estimasi pada persamaan perkembangan sektor unggulan menunjukkan bahwa peningkatan PDRB sektor unggulan dipengaruhi oleh variabel luas wilayah, tenaga kerja dan kredit perbankan. Pada wilayah DKI Jakarta yang merata wilayah perkotaan, salah satu sumber dari masalah penting perkotaan adalah kekurangan dalam penanganan wilayah perkotaan. Maka konteks luas wilayah pada provinsi ini lebih dititikberatkan pada persoalan penggunaan dan pemanfaatan lahan.

Tingginya kontribusi pada sektor bangunan, sektor perdagangan dan hotel serta sektor keuangan dan persewaan menunjukkan bahwa walaupun wilayah DKI Jakarta tidak terlalu luas, tapi pemanfaatan yang optimal dari lahan yang ada telah memberikan nilai tambah bagi pergerakan sektor-sektor tersebut. Output sektor bangunan DKI Jakarta rata-rata memberikan kontribusi sebesar 31% dari output nasional. Sementara output sektor perdagangan dan hotel rata-rata memberikan pangsa sebesar 21 persen per tahun. Pangsa yang paling besar disumbangkan oleh sektor keuangan dan persewaan rata-rata sebesar 60%.

Variabel lain yang memengaruhi PDRB sektor unggulan adalah tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tentu tidak bisa dilepaskan dari kemajuan perekonomian. Provinsi ini perlahan mengalami pergeseran aktivitas perekonomian menuju ke sektor sekunder (industri pengolahan, konstruksi, listrik, gas dan air) kemudian ke sektor tersier (perdagangan hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi; keuangan, jasa perusahaan dan jasa kemasyarakatan). Pergeseran aktivitas perekonomian ini juga diikuti oleh pergeseran tenaga kerja, dimana penyerapan tenaga kerja pada sektor yang tergolong kelompok tersier lebih besar. Grafik 5.6. juga memperlihatkan bahwa penyerapan jumlah tenaga kerja pada sektor unggulan mengalami penurunan kecuali sektor transportasi.

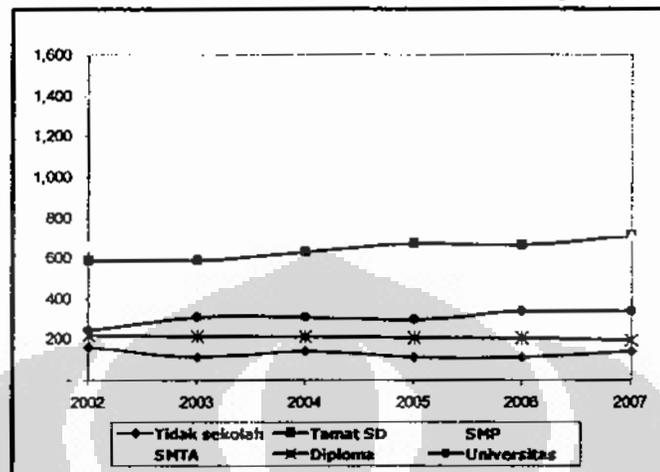
Grafik 5.6 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Unggulan DKI Jakarta (ribu jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Peralihan dari sekunder selanjutnya ke tersier membutuhkan tenaga kerja yang pendidikannya tinggi. Seperti yang ditunjukkan pada grafik 5.7 setiap tahunnya tenaga kerja yang berpendidikan universitas mengalami peningkatan. Semakin tinggi tingkat keterampilan tenaga kerja, maka produktivitasnya akan meningkat, yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan output perekonomian.

Grafik 5.7 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja DKI Jakarta Berdasarkan Pendidikan (ribu jiwa)

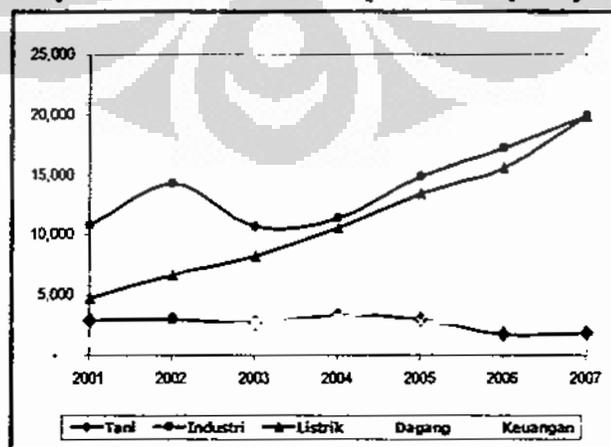


Sumber: Badan Pusat Statistik

5.2.2. Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat adalah provinsi kedua yang mendapat pembiayaan terbesar dari kredit perbankan setelah Jakarta. Walaupun belum seluruhnya dialokasikan ke sektor unggulan, sebagian kredit perbankan telah disalurkan kepada sektor unggulan. Penerima kredit terbesar di Jawa Barat adalah sektor industri, dilanjutkan dengan sektor listrik, gas dan air bersih, sektor keuangan dan sektor perdagangan. Dari keempat sektor tersebut, sektor keuangan yang mendapat penyaluran kredit terbesar ketiga bukan merupakan sektor unggulan di Jawa Barat (Grafik 5.8).

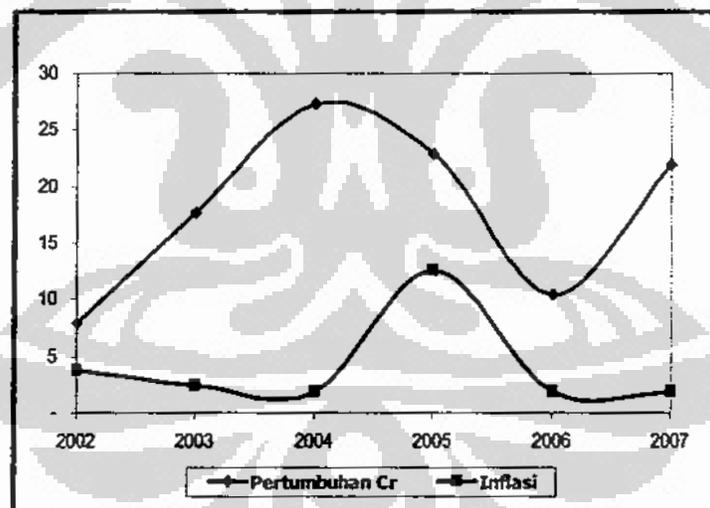
Grafik 5.8. Perkembangan Kredit Bank Umum Jawa Barat per Sektor Ekonomi (triliun rupiah)



Sumber: Bank Indonesia

Respon penyaluran kredit terhadap tingkat inflasi pada provinsi ini menurun ketika tingkat inflasi naik dan sebaliknya meningkat jika inflasi menurun kecuali tahun 2006 (grafik 5.9.). Tahun 2002 sampai 2004, ketika tingkat inflasi turun, penyaluran kredit perbankan mengalami peningkatan dan sebaliknya ketika inflasi meningkat tahun 2005, penyaluran kredit mengalami penurunan. Pada provinsi Jawa Barat, respon perbankan terhadap naik turunnya inflasi sangat cepat dan tajam, kecuali tahun 2006. Kenaikan BBM tahun 2005 juga direspon perbankan dengan sangat hati-hati. Ketidakpastian ekonomi akibat kebijakan kenaikan harga BBM menyebabkan perbankan menahan penyaluran kreditnya sambil menunggu perekonomian stabil kembali. Hal ini diperlihatkan oleh grafik 5.9. dimana ketika tingkat inflasi turun pada tahun 2007, penyaluran kredit perbankan kembali meningkat sangat besar.

Grafik 5.9. Pertumbuhan Kredit Bank Umum dan Tingkat Inflasi Jawa Barat (persen)



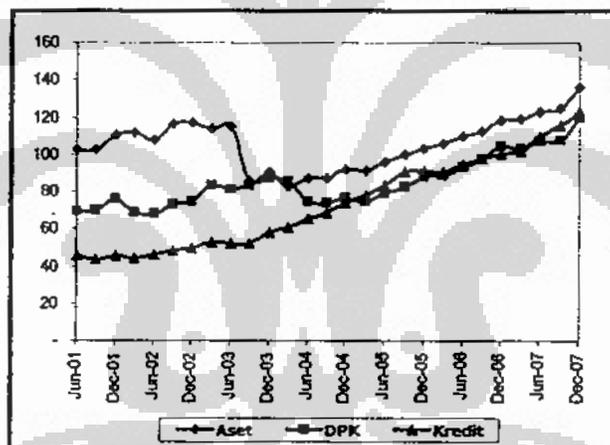
Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, diolah

Pada provinsi Jawa Barat, penyaluran kredit perbankan setiap tahun mengalami peningkatan dari 8% pada tahun 2000 menjadi 12% pada tahun 2007. Peningkatan penyaluran tersebut terjadi karena jaringan dan infrastruktur perbankan yang semakin luas yang ditandai dengan peningkatan jumlah kantor bank. Jaringan kantor bank di

provinsi ini terbanyak ketiga setelah provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Pada akhir tahun 2001 jumlah jaringan kantor bank di Jawa Barat hanya berjumlah 1555 kantor yang kemudian meningkat sebesar 421 sehingga total kantor bank pada tahun 2007 meningkat menjadi 1976 jaringan kantor.

Determinan berikutnya yang menyebabkan penyaluran kredit perbankan di daerah ini terus meningkat adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang ditandai dengan meningkatnya dana yang disimpan dalam perbankan. Grafik 5.10. menunjukkan bahwa dana pihak ketiga perbankan mengalami peningkatan.

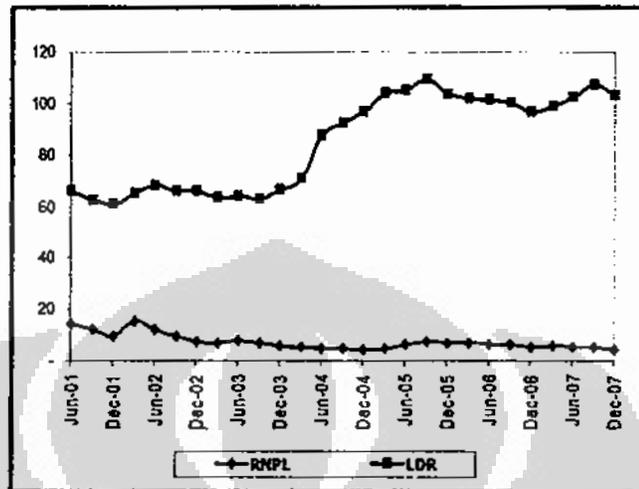
Grafik 5.10. Pertumbuhan Aset, DPK dan Kredit Bank Umum Jawa Barat (triliun rupiah)



Sumber: Bank Indonesia

Aspek lain yang menyebabkan tingginya penyaluran kredit perbankan di provinsi Jawa Barat adalah lebih optimalnya perbankan dalam melakukan fungsi intermediasinya. Hal ini dapat dilihat dari besaran LDR yang telah lebih dari 100 persen. Artinya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dari unit surplus telah disalurkan kembali secara optimal kepada unit ekonomi yang membutuhkan sumber pembiayaan (Grafik 5.10.). Tingginya kemampuan perbankan dalam menyalurkan dana yang berhasil dihimpun ini didukung oleh penurunan rasio NPL yang cukup signifikan (Grafik 5.11.).

Grafik 5.11. Perkembangan LDR dan NPL Bank Umum Jawa Barat (persen)

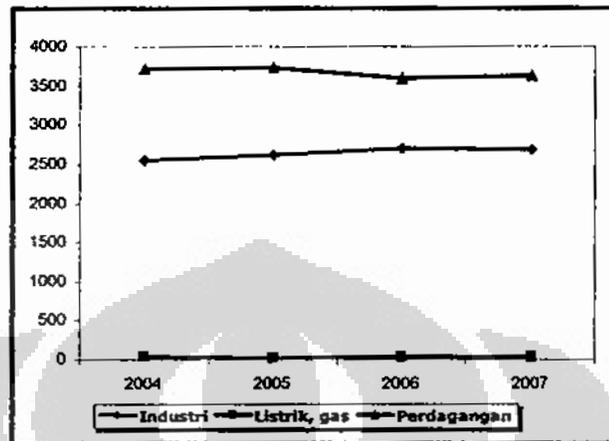


Sumber: Bank Indonesia

Hasil regresi perkembangan sektor unggulan menunjukkan bahwa peningkatan sektor unggulan selain dipengaruhi oleh kredit perbankan, juga dipengaruhi oleh luas wilayah dan tenaga kerja. Wilayah Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI Jakarta menjadi salah satu faktor yang mendorong perkembangan beberapa daerah di Jawa Barat menjadi sangat pesat. Jarak kota-kota Jawa Barat yang tidak terlalu jauh dengan DKI Jakarta menyebabkan perpindahan domisili masyarakat yang bekerja di wilayah DKI Jakarta. Perpindahan tersebut menyebabkan wilayah Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI Jakarta dimanfaatkan menjadi wilayah pemukiman. Selain menjadi pemukiman, wilayah di provinsi Jawa Barat kemudian dimanfaatkan menjadi kawasan industri, misalnya 18 kawasan industri berada di Kabupaten Bekasi, 2 kawasan di Kabupaten Bogor, dan 5 kawasan terletak di Kabupaten Karawang.

Variabel lain yang memengaruhi PDRB sektor unggulan adalah tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tentu tidak bisa dilepaskan dari kemajuan perekonomian. Jumlah tenaga kerja yang paling besar berada pada sektor pertanian. Sementara sektor unggulan yang jumlah tenaga kerja paling besar adalah sektor perdagangan. Secara keseluruhan jumlah tenaga kerja pada sektor unggulan yaitu sektor perdagangan, industri dan listrik semakin menurun (grafik 5.12.).

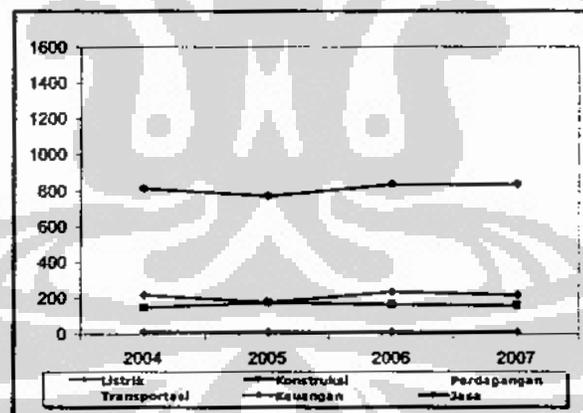
Grafik 5.12. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Unggulan Jawa Barat (ribu jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Kebutuhan tenaga kerja yang berpendidikan lebih tinggi pada provinsi Jawa Barat juga bertambah. Pada grafik 5.13. tenaga kerja berpendidikan universitas di provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan.

Grafik 5.13. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Jawa Barat Berdasarkan Pendidikan (ribu jiwa)



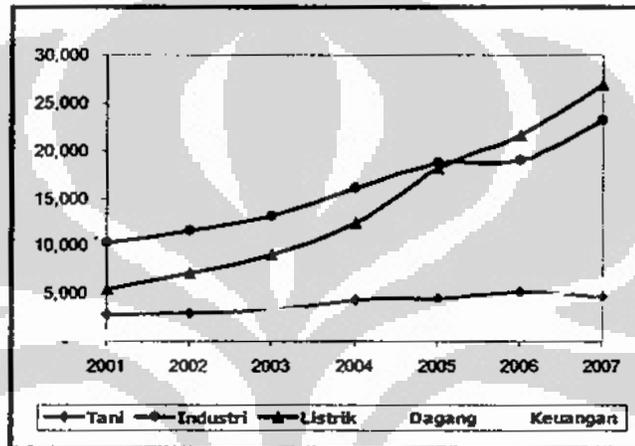
Sumber: Badan Pusat Statistik

5.2.3. Provinsi Jawa Tengah

Penyaluran kredit perbankan di provinsi Jawa Tengah telah memperhatikan potensi beberapa sektor unggulan. Hal ini dapat dilihat dari kredit yang telah disalurkan kepada sektor unggulan yaitu sektor listrik, gas dan air bersih; sektor industri; sektor pertanian dan sektor keuangan. Penyaluran kredit pada sektor keuangan yang bukan sektor

unggulan justru terus meningkat dan telah melebihi penyaluran kredit pada sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan. Walaupun telah memperhatikan potensi sektor unggulan, masih ada sektor unggulan di Jawa Tengah yang belum menjadi prioritas bagi perbankan di Jawa Tengah yaitu sektor jasa (Grafik 5.14.).

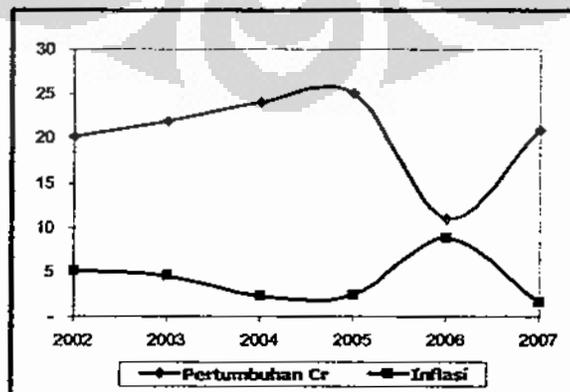
Grafik 5.14. Perkembangan Kredit Bank Umum Jawa Tengah per Sektor Ekonomi (Triliun Rupiah)



Sumber: Bank Indonesia

Pada grafik 5.15., pergerakan pertumbuhan kredit dan inflasi di provinsi Jawa Tengah menunjukkan pola yang sesuai dengan hasil empiris bahwa penyaluran kredit berbanding terbalik dengan tingkat inflasi. Ketika tingkat inflasi naik maka kredit yang disalurkan perbankan akan turun dan sebaliknya, ketika tingkat inflasi turun, penyaluran kredit perbankan akan meningkat.

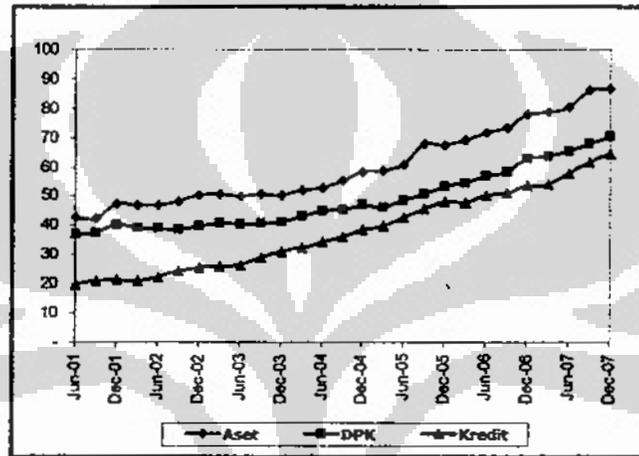
Grafik 5.15. Hubungan Pertumbuhan Kredit dan Inflasi Jawa Tengah (Persen)



Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, diolah

Provinsi Jawa Tengah menempati urutan keempat terbesar sebagai penerima pembiayaan dari kredit perbankan. Hal ini terjadi karena kepercayaan masyarakat terus meningkat kepada perbankan sehingga penghimpunan dana pihak ketiga perbankan juga terus meningkat (grafik 5.16.).

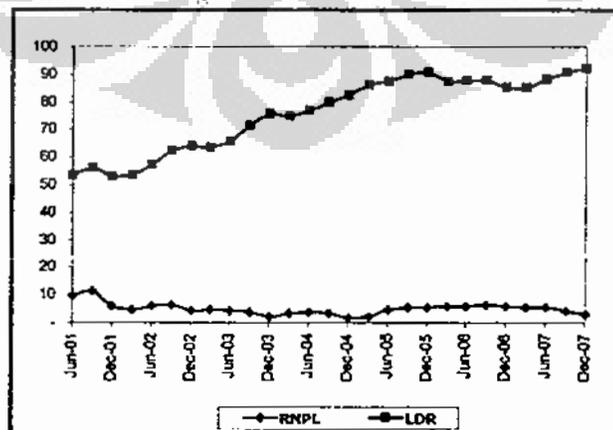
Grafik 5.16. Perkembangan Aset, DPK dan Kredit Bank Umum Jawa Tengah (Triliun Rupiah)



Sumber: Bank Indonesia

Walaupun kredit yang disalurkan di daerah Jawa Tengah jumlahnya paling sedikit jika dibandingkan dengan keempat provinsi lainnya, tapi fungsi intermediasi perbankan di daerah ini sudah berjalan optimal. Seperti layaknya daerah Jawa Barat, rasio penyaluran kredit atas dana yang berhasil dihimpun perbankan di Jawa Tengah cukup tinggi, mencapai 92% pada tahun 2007 (grafik 5.17.).

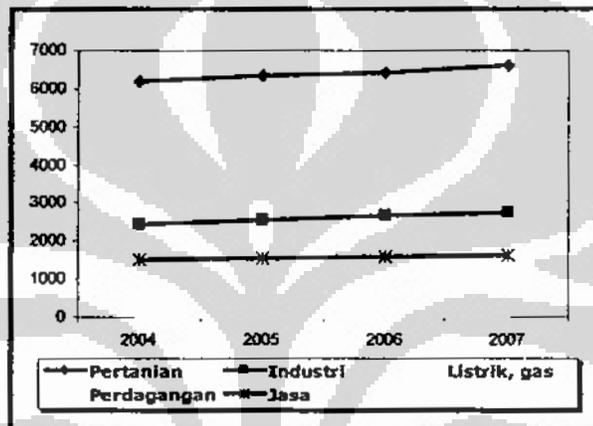
Grafik 5.17. Perkembangan LDR dan NPL Jawa Tengah (Persen)



Sumber: Bank Indonesia

Hasil empiris menunjukkan bahwa peningkatan output sektor unggulan dipengaruhi kredit perbankan, luas wilayah dan tenaga kerja. Jika variabel luas wilayah dan kredit perbankan berbanding lurus dengan sektor unggulan, variabel tenaga kerja berbanding terbalik dengan output sektor unggulan. Jumlah tenaga kerja seluruh sektor unggulan di Jawa Tengah justru mengalami peningkatan (grafik 5.18.).

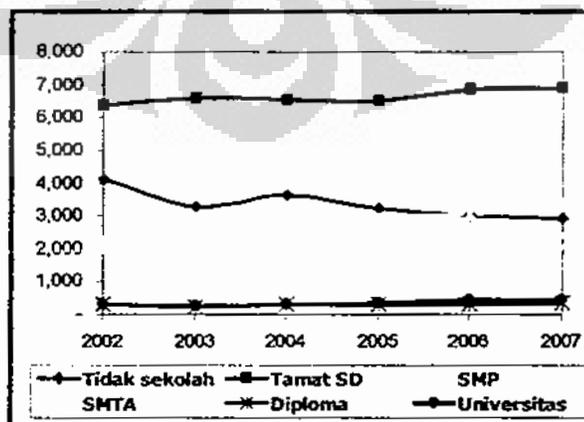
Grafik 5.18. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Unggulan Jawa Tengah (ribu jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Kebutuhan tenaga kerja yang berpendidikan lebih tinggi pada provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Walaupun tenaga kerja yang berpendidikan diploma dan universitas lebih sedikit dari tingkat pendidikan lainnya tetapi grafik kedua tingkat pendidikan ini terus mengalami peningkatan setiap tahun (grafik 5.19.).

Grafik 5.19. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Jawa Tengah Berdasarkan Pendidikan (ribu jiwa)

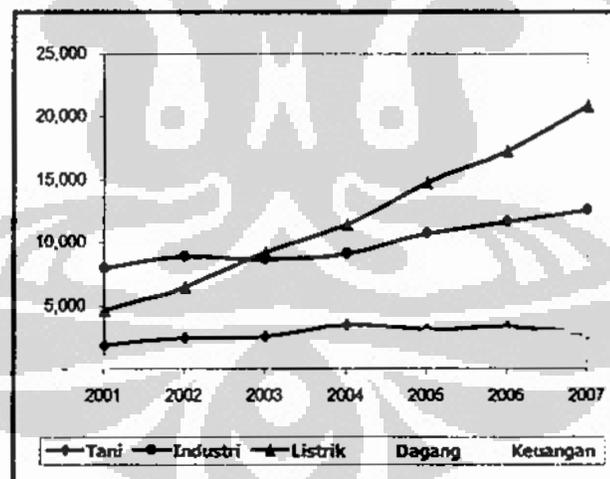


Sumber: Badan Pusat Statistik

5.2.4. Provinsi Jawa Timur

Penyaluran kredit perbankan di Jawa Timur tidak seluruhnya berhubungan dengan perkembangan sektor unggulan. Sampai dengan tahun 2005, porsi kredit paling besar disalurkan perbankan terhadap sektor industri padahal sejak tahun 2003 sektor industri bukan sektor unggulan. Tetapi pada tahun 2006 porsi terbesar kredit perbankan beralih kepada sektor listrik, gas dan air bersih yang merupakan sektor unggulan di Jawa Timur. Namun perilaku ini tidak terjadi pada sektor unggulan lainnya yaitu perdagangan dan pertanian. Penyaluran kredit pada sektor pertanian terus menurun sementara sektor perdagangan belum menjadi prioritas karena sektor ini menempati urutan kelima dari 9 sektor ekonomi yang menerima penyaluran kredit perbankan. Peningkatan penyaluran kredit justru terjadi pada sektor keuangan yang menurut analisis LQ tidak bisa dikategorikan sebagai sektor unggulan. (Grafik 5.20.).

Grafik 5.20. Perkembangan Kredit Bank Umum Jawa Timur per Sektor Ekonomi (Triliun Rupiah)

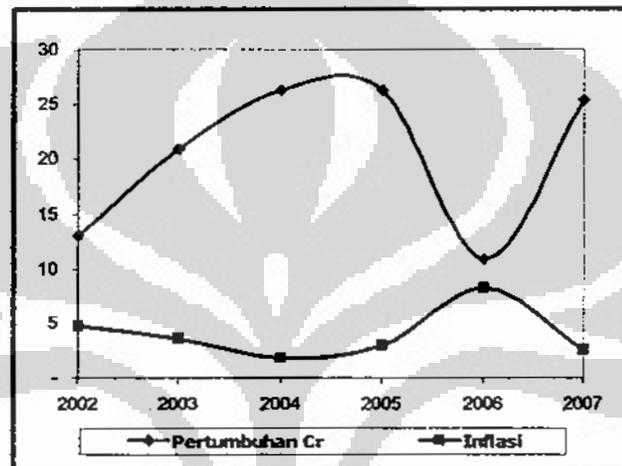


Sumber: Bank Indonesia

Penyaluran kredit perbankan di Jawa Timur juga sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Hal ini terlihat dari pola pertumbuhan kredit dan tingkat inflasi seperti yang terlihat pada grafik 5.21. Ketika tingkat inflasi turun, penyaluran kredit perbankan mengalami

peningkatan dan sebaliknya ketika tingkat inflasi naik penyaluran kredit perbankan akan mengalami penurunan. Perilaku ini kembali memperlihatkan keengganan perbankan akibat tingginya persepsi resiko. Perbankan akan mengurangi penyaluran kreditnya ketika kondisi perekonomian sedang tidak stabil untuk mengurangi resiko.

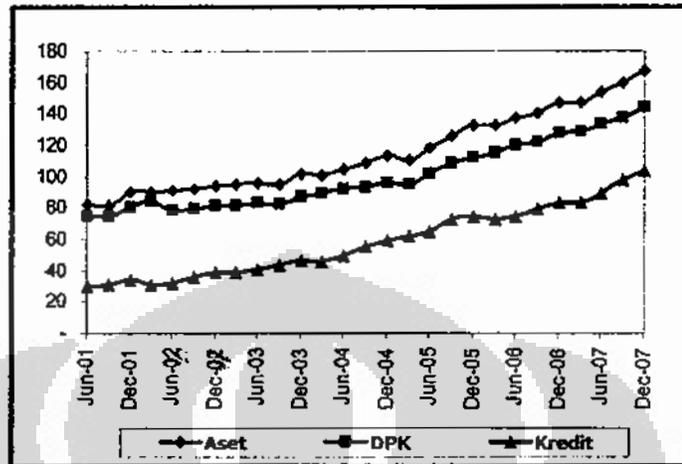
Grafik 5.21. Hubungan pertumbuhan Kredit dan Inflasi Jawa Timur (Persen)



Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik, diolah

Provinsi Jawa Timur menempati urutan ketiga sebagai penerima pembiayaan dari kredit perbankan setelah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Padahal kemampuan perbankan di Jawa Timur dalam menghimpun dana juga lebih baik jika dibandingkan dengan Jawa Barat. Hal ini terlihat dari DPK Jawa Timur yang terus meningkat dan selalu lebih besar dari DPK Jawa Barat (grafik 5.22.). Padahal output perekonomian di Jawa Timur juga masih berada di atas Jawa Barat. Seharusnya dengan volume perekonomian yang lebih besar tersebut, kredit perbankan yang disalurkan akan lebih besar. Ketika output perekonomian meningkat, kebutuhan sumber pembiayaan akan semakin besar sehingga permintaan kredit oleh sektor-sektor riil juga akan meningkat.

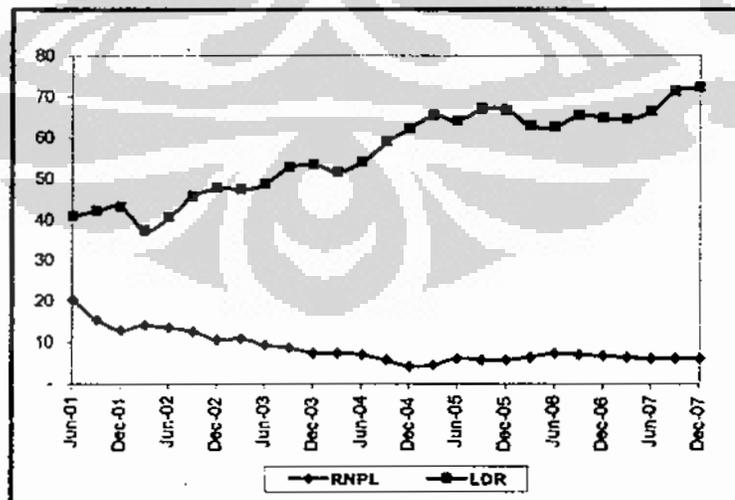
Grafik 5.22. Perkembangan Aset, DPK dan Kredit Bank Umum Jawa Timur (Triliun Rupiah)



Sumber: Bank Indonesia

Sementara itu rasio NPL Jawa Timur juga cenderung menurun setiap tahun. Peningkatan DPK dan penurunan NPL seharusnya menjadi faktor yang mendorong perbankan menjadi lebih agresif dalam menyalurkan kreditnya. Tetapi kemampuan perbankan di Jawa Timur dalam menyalurkan dana melalui kredit ternyata belum optimal. LDR Jawa Timur masih lebih rendah jika dibandingkan dengan LDR provinsi Jawa Barat. (grafik 5.23).

Grafik 5.23. Perkembangan LDR dan NPL Bank Umum Jawa Timur (Triliun Rupiah)

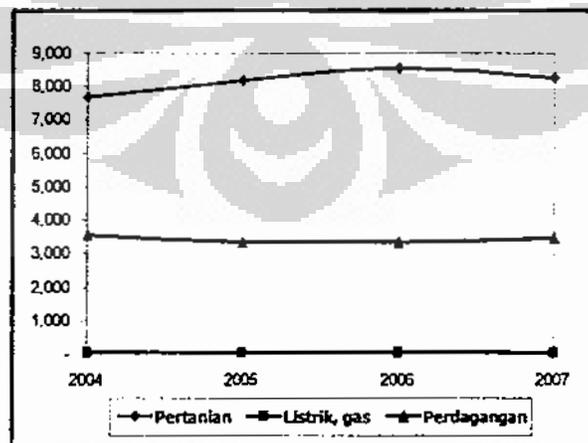


Sumber: Bank Indonesia

Sektor perdagangan dan industri merupakan motor penggerak utama perekonomian di Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari tingginya distribusi kedua sektor ini terhadap pembentukan PDRB jika dibandingkan dengan 9 sektor lainnya. Tahun 2001 s.d. tahun 2003 distribusi terbesar berasal dari sektor industri tetapi setelah tahun 2003 s.d. tahun 2007 distribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan. Sektor yang juga memberikan distribusi besar berikutnya adalah sektor pertanian dan jasa dengan distribusi masing-masing sebesar 16% dan 8% pada tahun 2007. Dari sisi pertumbuhan, sebagian besar sektor ekonomi di Jawa Timur pertumbuhannya sangat berfluktuasi kecuali sektor perdagangan dan jasa. Tetapi pertumbuhan kedua sektor ini cenderung statis. Sektor berikutnya yang mengalami pertumbuhan yang besar adalah sektor listrik, gas dan air bersih. Walaupun sektor ini memberikan kontribusi paling kecil, tetapi pertumbuhannya sangat tinggi pada tahun 2002.

Hasil regresi data panel memperlihatkan bahwa peningkatan output sektor unggulan dipengaruhi kredit perbankan, luas wilayah dan tenaga kerja. Pada sektor pertanian dan perdagangan yang merupakan sektor unggulan, terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja (grafik 5.24.). Tetapi pada sektor listrik, gas dan air bersih terjadi peningkatan tenaga kerja.

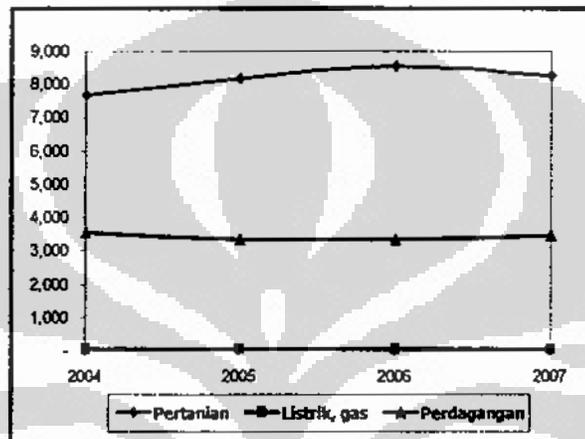
Grafik 5.24. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Unggulan Jawa Timur (ribu jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Kebutuhan tenaga kerja yang berpendidikan lebih tinggi pada provinsi Jawa Timur juga bertambah. Seperti provinsi lainnya, tenaga kerja yang berpendidikan diploma dan universitas juga mengalami peningkatan setiap tahun (grafik 5.25.).

Grafik 5.25. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Jawa Timur Berdasarkan Pendidikan (ribu jiwa)



Sumber: Badan Pusat Statistik

5.3. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil temuan empiris tersebut di atas, maka ada beberapa implikasi penting terhadap kebijakan makroekonomi dan kebijakan perbankan.

Hasil empiris penelitian ini menyatakan bahwa faktor eksternal yang memengaruhi penyaluran kredit perbankan adalah suku bunga, inflasi (stabilitas harga) dan PDRB Sektor Unggulan. Dari ketiga variabel tersebut, yang memberikan pengaruh paling besar adalah PDRB sektor unggulan (nilai koefisien = +0,161), suku bunga (nilai koefisien = -0,060), dan tingkat inflasi (nilai koefisien = -0,048). Hal ini menunjukkan bahwa dari pihak perbankan, disamping peningkatan output sektor unggulan, inflasi juga merupakan salah satu determinan untuk menyalurkan kredit kepada seorang debitur. Sementara dari pihak debitur, suku bunga juga menjadi determinan untuk permintaan terhadap kredit perbankan.

Implikasi penting temuan tersebut mendorong perlunya penerapan kebijakan makroekonomi yang tepat karena kebijakan yang tepat dapat menjadi stimulus bagi peningkatan output perekonomian disamping dapat mengurangi/menghilangkan berbagai ketidakpastian ekonomi.

Kebijakan ekonomi makro yang dapat ditempuh adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan perekonomian yang diinginkan. Pelaksanaan kebijakan moneter tergantung pada hubungan antara uang beredar dan variabel ekonomi utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dalam jangka pendek kebijakan moneter ekspansif dapat mendorong kegiatan ekonomi yang sedang mengalami resesi. Sebaliknya kebijakan moneter kontraktif dapat memperlambat laju inflasi. Sasaran akhir kebijakan moneter adalah stabilitas harga melalui laju inflasi yang rendah dan stabil, pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

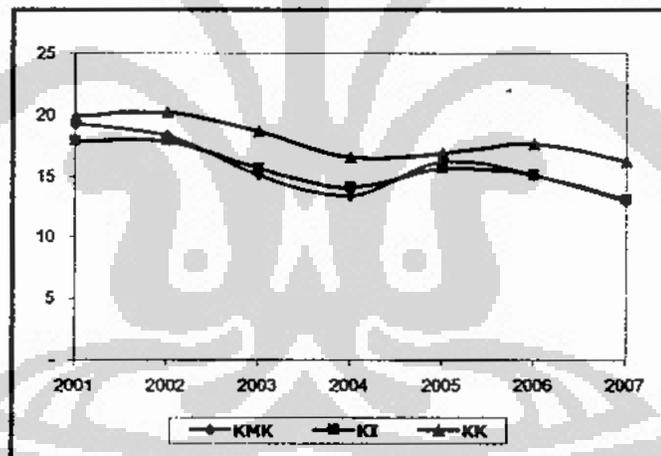
Pelaksanaan kebijakan moneter oleh bank sentral sebagian besar dipengaruhi oleh keyakinan bank sentral mengenai bagaimana kebijakan moneter berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Proses tersebut dikenal dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Karena hasil empiris menunjukkan bahwa salah satu variabel yang memengaruhi penyaluran kredit perbankan adalah suku bunga, maka dari beberapa jalur transmisi kebijakan moneter, jalur suku bunga menjadi relevan untuk dibahas.

Pada mekanisme transmisi melalui jalur suku bunga, pengaruh suku bunga jangka pendek akan ditransmisikan pada suku bunga jangka menengah dan panjang melalui mekanisme penyeimbangan sisi permintaan dan penawaran di pasar uang. Perubahan suku bunga tersebut akan memengaruhi biaya modal yang selanjutnya akan memengaruhi pengeluaran investasi dan konsumsi yang merupakan salah satu variabel permintaan agregat. Mekanisme transmisi melalui

jalur suku bunga bekerja melalui salah satu instrumen yang dimiliki oleh bank sentral yaitu operasi pasar terbuka (OPT).

Operasi pasar terbuka adalah usaha pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah, misalnya SBI. Pada kenyataannya Bank Indonesia terus berusaha menurunkan suku bunga SBI. Penurunan suku bunga SBI direspon positif oleh pasar dengan menurunnya suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito. Penurunan ini tentu saja dilakukan dengan harapan bahwa suku bunga kredit juga memberikan respon yang sama. Tetapi respon suku bunga kredit justru sangat lamban sehingga suku bunga kredit masih sangat tinggi (grafik 5.26.). Akibatnya transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga menjadi kurang efektif.

Grafik 5.26. Perkembangan Suku Bunga Kredit (Persen)



Sumber: Bank Indonesia

Tidak efektifnya transmisi melalui jalur suku bunga menyebabkan Bank Indonesia sebagai regulator kebijakan moneter dihadapkan pada dua pilihan. Di satu sisi, kebijakan moneter longgar dengan penurunan suku bunga SBI mengakibatkan bank-bank berusaha mengurangi penempatan surplus dananya pada SBI. Tetapi pilihan ini seharusnya diiringi dengan membaiknya fungsi intermediasi perbankan sehingga kelebihan likuiditas yang dimiliki akan disalurkan melalui kredit. Tetapi nilai LDR yang masih relatif kecil menunjukkan

bahwa kemampuan perbankan dalam menyalurkan dana masih belum optimal. Maka kebijakan ini sangat tidak relevan untuk diterapkan. Di sisi lain, kebijakan moneter ketat yaitu peningkatan suku bunga SBI akan menyebabkan bank lebih banyak menempatkan dananya pada SBI. Penempatan dana pada SBI akan menyebabkan menurunnya likuiditas perbankan sehingga akan memengaruhi kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit.

Dihadapkan pada dua pilihan tersebut, Bank Indonesia perlu melakukan kebijakan moneter dengan tetap mempertimbangkan proses pemulihan ekonomi yang masih sedang berlangsung. Dalam kondisi ini kebijakan moneter sebaiknya lebih dititikberatkan pada pengendalian laju pertumbuhan uang beredar, daripada menaikkan suku bunga. Ketika perbankan mengalami kelebihan likuiditas, maka masih mungkin dilakukan pengetatan uang beredar tanpa kenaikan suku bunga yang signifikan.

Disamping operasi pasar terbuka, instrumen lainnya yang dapat digunakan dalam kebijakan moneter adalah penetapan rasio giro wajib minimum (GWM). Jika rasio GWM tinggi, artinya cadangan dana perbankan akan menurun, karena penetapan GWM pada dasarnya mewajibkan bank untuk menambah giro di Bank Indonesia. Kenaikan GWM secara otomatis akan mengurangi kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit. Kondisi ini selanjutnya akan menyebabkan penurunan investasi dan dapat mendorong penurunan output. Maka dari pihak perbankan harus melakukan penambahan dana atau mengurangi kepemilikan surat-surat berharga. Sementara dari pihak bank sentral sebagai regulator dapat mengurangi jumlah GWM perbankan. Jika alternatif ini tidak bisa dilakukan, untuk tetap menjaga proses pemulihan ekonomi yang masih sedang berlangsung maka cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan memberikan remunerasi (bunga jasa giro) terhadap tambahan kenaikan GWM.

Pasca krisis, pemerintah terus melakukan pemulihan ekonomi misalnya penguatan kelembagaan Bank Sentral sebagai regulator kebijakan moneter. Sehubungan dengan perannya sebagai regulator

kebijakan moneter, dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 1999 Bank Indonesia kemudian lebih terfokus pada usaha mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam konteks ini, kestabilan nilai rupiah mempunyai dua konteks yaitu kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa yang disebut dengan inflasi dan kestabilan rupiah terhadap mata uang negara lain yang disebut dengan nilai tukar. Karena Indonesia telah menggunakan sistem nilai tukar mengambang maka Bank Indonesia tidak membuat target nilai tukar karena pada sistem ini nilai tukar lebih ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan dalam pasar valuta asing. Maka praktis sasaran akhir Bank Indonesia lebih bertujuan pada pencapaian laju inflasi yang rendah dan stabil. Untuk fungsi ini, sejak tahun 2000 Bank Indonesia mulai menerapkan *inflation targeting framework* (ITF).

Penerapan ITF mengisyaratkan adanya publikasi tentang target inflasi kepada publik oleh Bank Sentral. Masyarakat mengharapkan target inflasi tersebut tentu saja harus mempertimbangkan berbagai prospek ekonomi. Pertimbangan tersebut dibutuhkan karena usaha menjaga stabilitas inflasi pada nilai yang relatif rendah memunculkan ketidaksesuaian (*trade-off*) dengan pertumbuhan ekonomi. Angka inflasi yang terlalu rendah pada gilirannya juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk itulah masyarakat mengharapkan target inflasi yang dipublikasikan oleh BI harus dalam besaran yang optimal.

Setelah perubahan UU No. 23 tahun 1999 menjadi UU No. 3 tahun 2004, sasaran inflasi ditetapkan oleh pemerintah yang tentu saja setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dalam konteks inilah pada prakteknya, penetapan sasaran inflasi melalui kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara terpisah dengan kebijakan lain karena perkembangan ekonomi dan harga-harga ditentukan oleh perkembangan dari dua sisi yaitu sisi permintaan dan sisi penawaran.

Dari sisi permintaan, kebijakan moneter lebih berpengaruh terhadap perekonomian melalui jumlah uang beredar dan suku bunga. Tetapi permintaan juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal (besarnya

APBN) melalui belanja rutin dan belanja pembangunan. Oleh karena itu pengendalian inflasi dari sisi permintaan bank sentral juga harus memperhatikan dampak fiskal terhadap kegiatan ekonomi dan inflasi.

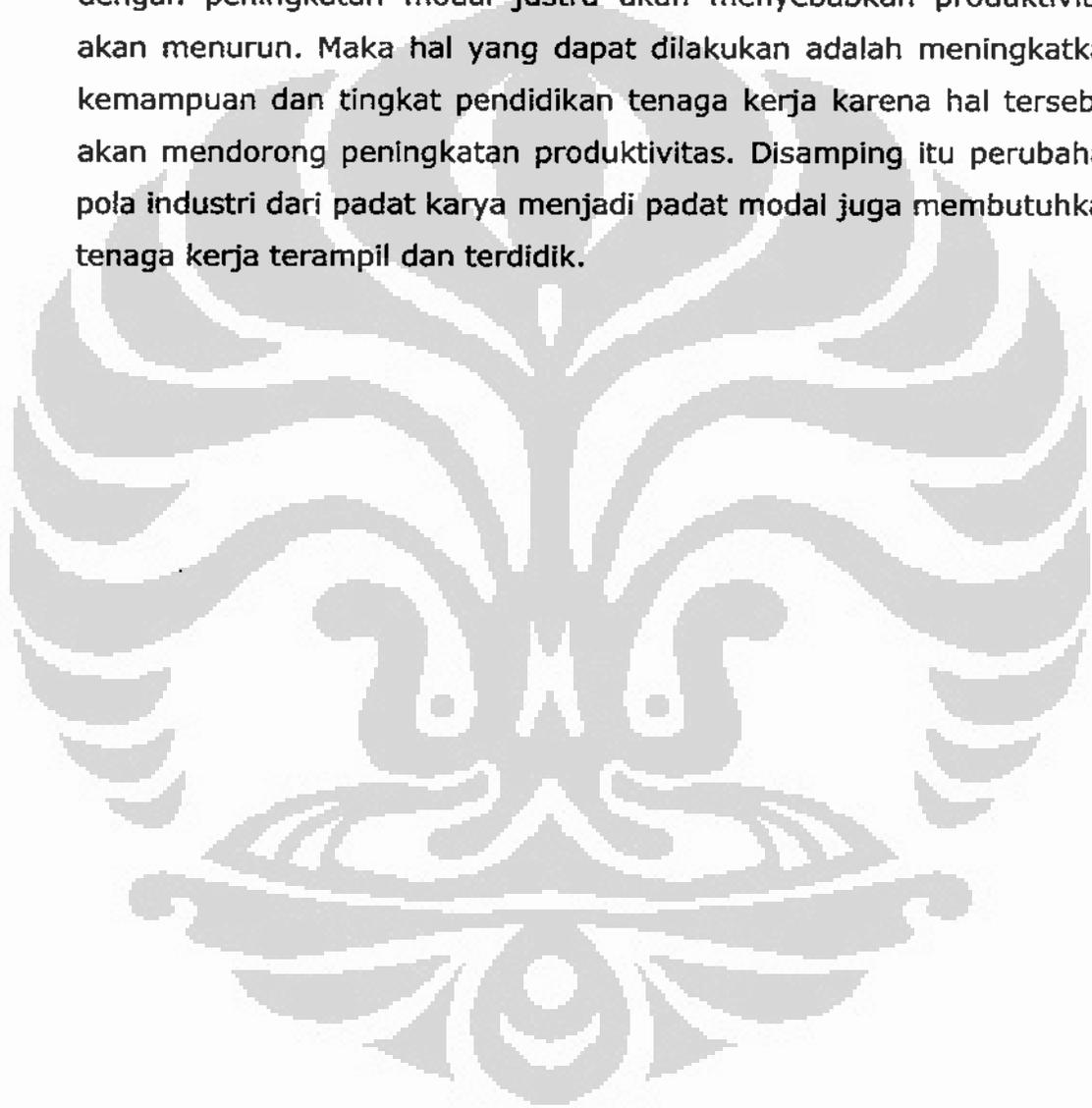
Dari sisi penawaran, kebijakan terhadap sektor riil misalnya industri, perdagangan, investasi dan tenaga kerja lebih berpengaruh terhadap perekonomian. Oleh karena itu untuk mencapai kebijakan makro ekonomi yang optimal harus diterapkan bauran kebijakan (*mix policy*) yang terkoordinasi antar kebijakan lain sehingga tidak menimbulkan dampak yang bertentangan satu sama lain.

Determinan Internal bank yang berpengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan adalah dana pihak ketiga, jumlah kantor bank dan NPL. Banyaknya jumlah kantor bank di suatu wilayah pada dasarnya menunjukkan perluasan jaringan dan peningkatan infrastruktur perbankan. Ketika jaringan perbankan semakin luas dan infrastruktur semakin banyak, maka aktivitas perbankan akan semakin meningkat. Dari aspek lain, peningkatan jumlah bank menunjukkan konsentrasi pada wilayah tersebut. Konsentrasi tersebut akan menyebabkan tingkat persaingan bank juga akan semakin tinggi. Kondisi ini akan mendorong perbankan lebih agresif dalam menghimpun dana dan menawarkan kredit. Dalam kondisi demikian, maka diperlukan pengawasan dari Bank Indonesia agar perbankan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit agar tidak terjadi *Moral Hazard* yang dapat meningkatkan NPL.

Hasil empiris pada persamaan penyaluran kredit menunjukkan bahwa penyaluran kredit dipengaruhi oleh PDRB sektor unggulan. Sementara persamaan PDRB sektor unggulan memperlihatkan bahwa PDRB sektor unggulan juga dipengaruhi oleh kredit (0,199) disamping luas wilayah (2,503) dan tenaga kerja (0,793). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada interaksi positif antara sektor unggulan dan kredit perbankan walaupun yang paling kuat memengaruhi adalah luas wilayah, tenaga kerja, lalu kredit perbankan.

Hasil tersebut mengisyaratkan pemerintah lebih memberikan perhatian terhadap kebijakan yang berimplikasi terhadap luas wilayah

dan ketenagakerjaan. Era otonomi daerah saat ini menuntut pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki seoptimal mungkin dalam mendorong bergeraknya perekonomian. Penggunaan lahan yang tepat dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian walaupun luas tanah ini tidak akan mengalami peningkatan. Sementara peningkatan tenaga kerja yang tidak diiringi dengan peningkatan modal justru akan menyebabkan produktivitas akan menurun. Maka hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dan tingkat pendidikan tenaga kerja karena hal tersebut akan mendorong peningkatan produktivitas. Disamping itu perubahan pola industri dari padat karya menjadi padat modal juga membutuhkan tenaga kerja terampil dan terdidik.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari pembahasan atas temuan-temuan penting dalam penelitian ini pada bab-bab sebelumnya dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- Sektor unggulan di provinsi DKI Jakarta dari tahun 2001 s.d. tahun 2007 adalah sektor listrik, gas dan air bersih; bangunan, perdagangan, restoran dan hotel; transportasi dan komunikasi; keuangan, dan jasa. Pada provinsi Jawa Barat, sektor unggulan dari tahun 2001 s.d. tahun 2007 adalah sektor industri; listrik, gas dan air bersih; dan perdagangan. Sektor unggulan pada tahun 2001 s.d. tahun 2007 di provinsi Jawa Tengah adalah sektor pertanian; industri; listrik, gas dan air bersih; perdagangan dan jasa. Tetapi pada tahun 2002 sektor jasa tidak termasuk sebagai sektor unggulan. Sektor unggulan di provinsi Jawa Timur pada tahun 2001 s.d. tahun 2003 adalah sektor pertanian; industri; listrik, gas dan air bersih; perdagangan; transportasi dan komunikasi. Tetapi pada tahun 2004 s.d. tahun 2007 sektor unggulan di Jawa Timur hanya 3 sektor yaitu sektor pertanian, listrik dan perdagangan.
- Kredit perbankan di keempat provinsi sebagian besar telah disalurkan kepada sektor unggulan. Misalnya di provinsi DKI Jakarta, kredit disalurkan kepada sektor keuangan; listrik, gas dan air bersih; transportasi dan komunikasi; dan perdagangan, di daerah Jawa Barat disalurkan kepada sektor industri dan listrik, di daerah Jawa Tengah disalurkan ke sektor listrik, gas dan air bersih; industri; dan pertanian dan di provinsi Jawa Timur disalurkan kepada sektor listrik, gas dan air bersih. Tetapi beberapa sektor unggulan belum menjadi prioritas pada penyaluran kredit perbankan. Misalnya sektor bangunan dan jasa di DKI Jakarta, sektor perdagangan di Jawa Barat, sektor perdagangan dan jasa di

Jawa Tengah serta sektor pertanian dan perdagangan di Jawa Timur.

- Penyaluran kredit perbankan dan sektor unggulan di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki interaksi satu sama lain artinya penyaluran kredit perbankan pada keempat provinsi ini dipengaruhi oleh output sektor unggulan. Peningkatan 1% output sektor unggulan akan menyebabkan kenaikan penyaluran kredit sebesar 0,219%. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan kinerja sektor unggulan akan menjadi stimulus bagi perbankan untuk meningkatkan penyaluran kreditnya. Sebaliknya output sektor unggulan juga dipengaruhi oleh penyaluran kredit perbankan. Peningkatan 1% penyaluran kredit perbankan akan meningkatkan output sektor unggulan sebesar 0,199%. Hasil ini memperlihatkan bahwa kredit perbankan juga telah berperan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang dapat meningkatkan output sektor unggulan.
- Variabel internal bank yang signifikan memengaruhi penyaluran kredit perbankan adalah dana pihak ketiga (DPK), jumlah kantor bank (JKB) dan rasio *non performing loan* (RNPL). Dari seluruh variabel pada penelitian ini elastis hanya variabel DPK. Setiap kenaikan 1% dana pihak ketiga akan menyebabkan kenaikan kredit sebesar 1,26%. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di keempat provinsi terus meningkat yang dapat dilihat dari peningkatan dana pihak ketiga perbankan. Tetapi kemampuan perbankan di Jawa Barat dan Jawa Tengah dalam menyalurkan DPK melalui kredit masih lebih baik jika dibandingkan dengan perbankan di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari nilai LDR provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang lebih besar dari LDR provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Variabel internal berikutnya yang juga memiliki arah positif dan signifikan memengaruhi penyaluran kredit adalah Jumlah Kantor Bank. Setiap kenaikan 1% jumlah kantor bank akan meningkatkan penyaluran kredit perbankan sebesar 0,26%. Peningkatan jumlah kantor bank pada

dasarnya menunjukkan perluasan jaringan dan peningkatan infrastruktur. Selain dapat meningkatkan penghimpunan dana, peningkatan jumlah kantor bank juga akan meningkatkan persaingan antar bank sehingga perbankan akan semakin agresif dalam menawarkan kreditnya. Perilaku ini dapat mengakibatkan tingkat kehati-hatian (*prudential*) perbankan berkurang. Sementara variabel rasio *non performing loan* memiliki arah negatif dan signifikan memengaruhi penyaluran kredit perbankan. Setiap peningkatan 1% RNPL akan menyebabkan penurunan penyaluran kredit sebesar 0,005%. Sampai dengan tahun 2007, rasio NPL di keempat provinsi mengalami penurunan yang signifikan.

- Variabel eksternal yang signifikan memengaruhi penyaluran kredit perbankan adalah variabel suku bunga dan inflasi. Suku bunga memiliki arah yang negatif terhadap penyaluran kredit perbankan. Peningkatan 1% suku bunga akan menyebabkan penurunan kredit perbankan sebesar 0,06%. Hubungan ini menunjukkan bahwa variabel ini menjadi determinan bagi debitur untuk mengajukan permintaan terhadap kredit perbankan sehingga ketika suku bunga masih tinggi seperti saat ini, penyaluran kredit masih belum optimal. Variabel inflasi juga berbanding terbalik dengan penyaluran kredit perbankan. Peningkatan 1% tingkat inflasi akan menyebabkan penurunan 0,048% penyaluran kredit perbankan. Hasil ini menunjukkan bahwa belum pulihnya sektor riil karena adanya gejolak ekonomi menjadi salah satu faktor penentu penyaluran kredit perbankan. Jika ketidakpastian ekonomi meningkat, bank akan memutuskan untuk menahan kredit karena dalam kondisi yang tidak stabil, bank akan kesulitan mengevaluasi proyek-proyek yang menguntungkan. Perbankan juga akan kesulitan memperkirakan kemungkinan terjadinya pinjaman yang gagal bayar. Dalam kondisi ini perbankan akan meningkatkan kehati-hatian (*prudential*). Sebaliknya, jika ketidakpastian ekonomi menurun, bank akan lebih berani untuk menyalurkan kredit. Ketidakpastian ekonomi menyebabkan perbankan memiliki persepsi

tingginya resiko yang akan dihadapi jika memberikan kredit kepada sektor riil. *Cost of doing business* di Indonesia dianggap belum menarik, maka cukup sulit mengharapkan para pemilik uang untuk menempatkan uangnya guna membuka usaha di sektor riil.

- Peningkatan DPK yang tidak diikuti oleh penyaluran kredit yang optimal menyebabkan kepemilikan perbankan terhadap SBI meningkat. Perilaku ini juga disebabkan oleh suku bunga kredit yang masih cukup tinggi sehingga permintaan kredit dari sektor ekonomi juga belum optimal. Peningkatan kepemilikan SBI akan mengurangi likuiditas perbankan sehingga ketersediaan dana perbankan akan menurun dan selanjutnya dapat mengurangi fungsi intermediasi perbankan.
- Pada persamaan PDRB sektor unggulan, selain kredit perbankan, variabel lain yang juga signifikan memengaruhi output sektor unggulan adalah tenaga kerja dan luas wilayah. Dari ketiga variabel tersebut, yang elastis dalam PDRB sektor unggulan adalah luas wilayah. Luas wilayah memiliki hubungan yang searah (positif) dengan peningkatan output sektor unggulan dimana peningkatan 1% luas wilayah akan menyebabkan peningkatan output sektor unggulan sebesar 2,503%. Ketersediaan lahan dan sumber daya pada wilayah tersebut merupakan faktor yang diperlukan dalam proses produksi. Sementara peningkatan 1% tenaga kerja akan menyebabkan penurunan output sektor unggulan sebesar 0,793%.

6.2. Saran

Melihat bahwa preferensi masyarakat terhadap pembiayaan dari perbankan yang sangat besar, maka perbankan harus berusaha mengoptimalkan fungsi intermediasinya. Persepsi tingginya resiko yang telah melekat pada perbankan sebenarnya dapat dianulir ketika perbankan membuat prioritas atas penyaluran kreditnya. Perbankan disarankan meningkatkan penyaluran kreditnya pada sektor-sektor unggulan yang belum memperoleh pembiayaan yang cukup dari perbankan. Dari sisi perbankan juga disarankan lebih proaktif mencari

informasi tentang kondisi sektor-sektor unggulan sebagai prioritas utama bagi penyaluran kredit perbankan.

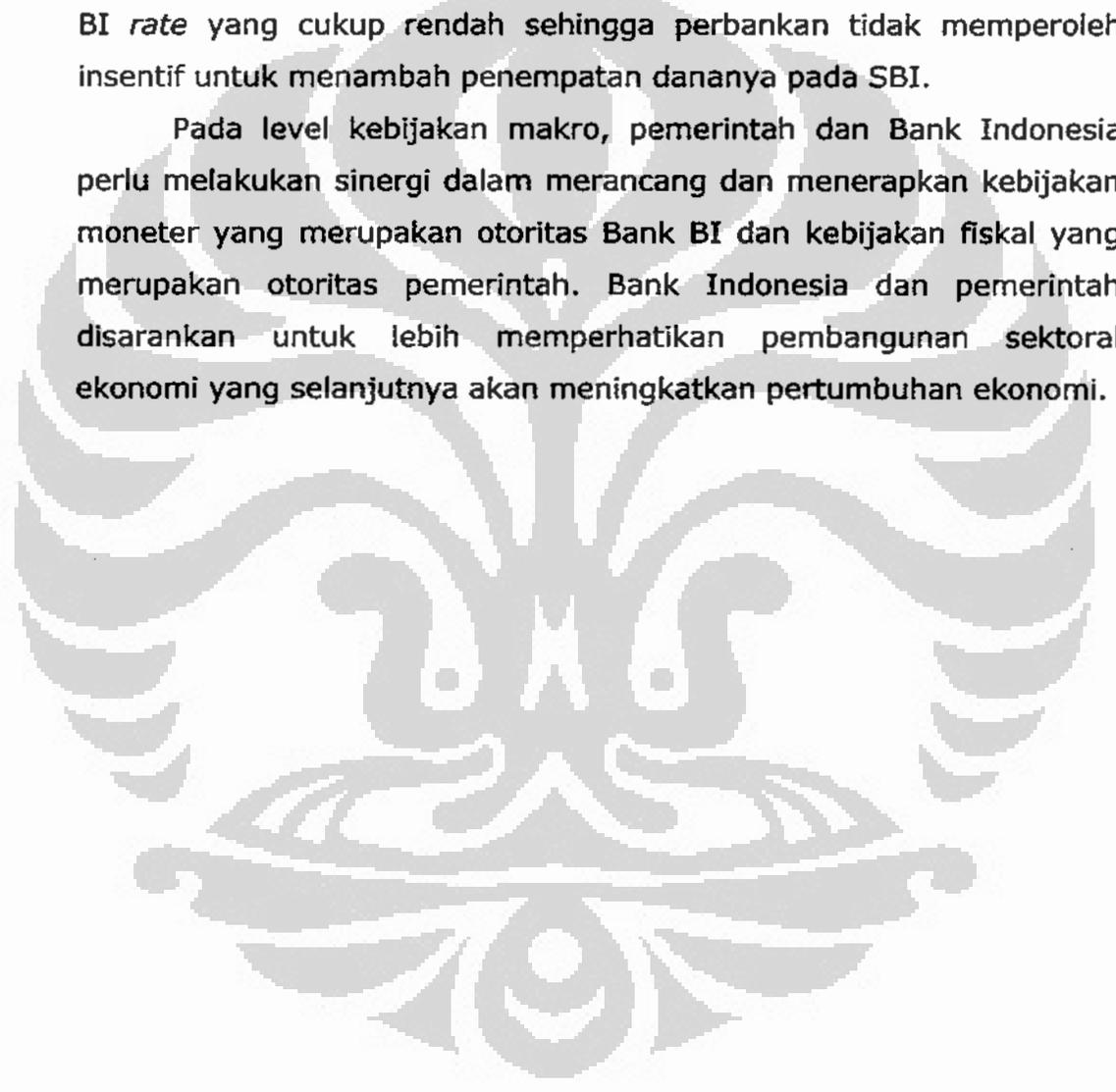
Fungsi perbankan dalam memberikan alternatif pembiayaan pembangunan di era otonomi daerah diharapkan semakin besar. Penyaluran kredit perbankan akan meningkat jika kepercayaan perbankan juga meningkat terhadap sektor riil. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat menjadi mediator antara kepentingan perbankan dan sektor riil. Sebagai mediator, pemerintah daerah disarankan meningkatkan dan mengembangkan akses informasi tentang sektor-sektor unggulan terutama informasi resiko. Peran lain yang juga dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan jaminan kredit (*Blanket Quarantee*). Keterbukaan akses informasi tentu saja bertujuan untuk mencegah terjadinya *asimetric information* antara perbankan dan sektor unggulan. Pemberian informasi yang tepat juga diharapkan akan mengurangi *adverse selection* dan *moral hazard*. Sementara pemberian jaminan oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan perbankan terhadap sektor riil.

Potensi ekspansi kredit sampai saat masih sangat besar. Oleh karena itu sektor riil juga diharapkan mampu memperlihatkan kinerja yang semakin baik sehingga dapat menyerap potensi kredit perbankan tersebut. Pemanfaatan faktor-faktor produksi yang lebih optimal merupakan upaya yang dapat ditempuh dalam rangka meningkatkan kinerja sektor riil, salah satunya adalah faktor produksi berupa pembiayaan dari lembaga keuangan. Oleh karena itu sektor riil juga disarankan untuk mulai mengoptimalkan faktor produksi yang bersumber dari lembaga keuangan non bank, misalnya penerbitan saham (*equities*) melalui pasar modal, penerbitan obligasi (*bonds*), pembiayaan dari perusahaan *leasing* atau *multi finance*, pembiayaan dari pegadaian.

Perkembangan perbankan tentu saja tidak bisa dilepaskan dari peran bank sentral sebagai regulator baik makro secara umum maupun perbankan secara khusus. Bank sentral perlu melakukan reformulasi kebijakan atau mempertimbangkan membuat kebijakan

baru yang mendorong fungsi intermediasi perbankan berjalan lebih baik misalnya kebijakan Giro Wajib Minimum dan besaran suku bunga SBI. Kedua kebijakan ini sangat relevan dengan fungsi perbankan sebagai transmisi kebijakan moneter. Adanya kecenderungan perilaku peralihan aktiva produktif perbankan pada kepemilikan SBI saat ini pada dasarnya dapat mengganggu usaha ekspansi kredit perbankan. Maka bank sentral disarankan menetapkan suku bunga dan kebijakan *BI rate* yang cukup rendah sehingga perbankan tidak memperoleh insentif untuk menambah penempatan dananya pada SBI.

Pada level kebijakan makro, pemerintah dan Bank Indonesia perlu melakukan sinergi dalam merancang dan menerapkan kebijakan moneter yang merupakan otoritas Bank BI dan kebijakan fiskal yang merupakan otoritas pemerintah. Bank Indonesia dan pemerintah disarankan untuk lebih memperhatikan pembangunan sektoral ekonomi yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.



DAFTAR PUSTAKA

Agung, J., B. Kusmiarso, B. Pramono, E.G. Hutapea, A. Prasmuko dan N.J. Prastowo, *Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis : Fakta, Penyebab dan Implikasi Kebijakan*. Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia, 2001

Armstrong, Harvey dan Jim Taylor, *Regional Economics and Policy*, Third Ed., Massachusetts: Blackwell Publishers Inc., 2000

Badan Pusat Statistik Jakarta, *Jakarta dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Jakarta

Badan Pusat Statistik Jawa Barat, *Jawa Barat dalam Angka*, 2000-2007

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, *Jawa Tengah dalam Angka*, 2000-2007

Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Jawa Timur dalam Angka*, 2000-2007

Badan Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*, 2000-2007

Badan Pusat Statistik, *Statistik Perhubungan*, 2001-2006

Bank Indonesia, *Angka-angka Sektor Riil*, 2002-2007

Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi Regional Jakarta dan Banten*, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Biro Kebijakan Moneter Bank Indonesia, 2005-2007

Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Barat*, Kantor Bank Indonesia Bandung, 2005-2007

Bank Indonesia, *Perkembangan Perekonomian Daerah Provinsi Jawa Tengah*, Bank Indonesia Semarang, 2005-2007

Bank Indonesia, *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur*, Kantor Bank Indonesia Surabaya, 2005-2007

Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah DKI Jakarta*, Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, 2000-2007

Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Barat*, Kantor Bank Indonesia Bandung, 2000-2007

- Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Tengah*, Bank Indonesia Semarang, 2000-2007
- Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Jawa Timur*, Kantor Bank Indonesia Surabaya, 2000-2007
- Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Indonesia*, Bank Indonesia, 2000-2004
- Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia di Bidang Moneter, Perbankan, dan Sistem Pembayaran Triwulan IV*, 2006
- Chiang, Alpha C, *Dasar-dasar Matematika Ekonomi*, Edisi Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Gosh, A. dan Gosh, S. (1999), *East Asia in the Aftermath: Was There a Crunch?*, IMF Working Paper 1999/38, Maret 1999
- Gujarati, N. Damodar, *Basic Econometrics*, Mc.Graw-Hill, Fourth Edition, 2003
- Hadad, M.D., *Model dan Estimasi Permintaan dan Penawaran Kredit Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia*, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Jakarta, 2004
- Hakim, Lukman, *Perbandingan Peranan Jalur Kredit pada Masa Sebelum dan Ketika Krisis Ekonomi 1990.1 - 2000.4*. dalam Lukman Hakim, B. Santosa, dan E. Setyaningrum (Editor). *Beberapa Agenda Perekonomian Indonesia Kritik dan Solusi*. Dewan Riset Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta, 2004
- Marsuki, Dr. DEA, *Analisis Sektor Perbankan, Moneter dan Keuangan Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2005
- Mishkin, Frederic S., *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*, Pearson Addison Wesley, Seventh Edition, 2006
- Muljono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial*, BPFE, Yogyakarta, 1994
- Nachrowi, D.N, dan Usman, Hardius, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2006

Nuryakin, Caikal dan Perry Warjiyo, *Perilaku Penawaran Kredit Bank Di Indonesia: Kasus Pasar Oligopoli Periode Januari 2001-Juli 2005*, 2006

Priaga, Moch. Ary dan Anny Ratnawati, *Pengaruh Ketidakpastian Ekonomi Terhadap Perilaku Kredit Bank Di Indonesia*, 2006

Reksohadiprojo, Sukanto dan Karseno, A.R., *Ekonomi Perkotaan*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 1998

Rivai, H. Veithzal, Veithzal, Andria Permata dan Idroes, Ferry N., *Bank and Financial Institution Management*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007

Tarigan, Robinson, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005

Todaro, M.P. dan Smith S.C., *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004

Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Widarjono, Agus, *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*, Penerbit Ekonosia, Yogyakarta, 2005

Winarno, W.W., *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2007

LAMPIRAN 1. PERHITUNGAN LOCATION QUOTIENT
 PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA TRIWULANAN

Periode	Sektor							Total		
	Tanil	Tambang	Industri	Listrik, gas	Bangunan	Dag & Hotel	Transp. & kom		Keu & pers.	Jasa-jasa
2001:1	58.104.650	42.722.440	96.450.600	2.113.300	19.748.800	57.683.200	16.938.100	30.086.600	32.789.800	356.637.490
2001:2	57.685.720	41.913.090	98.600.500	2.280.300	19.780.000	58.702.600	17.222.400	30.644.600	33.362.400	360.198.610
2001:3	62.114.310	41.915.600	100.333.000	1.919.300	19.939.300	59.396.400	17.721.800	31.138.100	33.795.800	368.688.210
2001:4	47.781.070	41.693.200	102.939.700	2.330.800	20.612.300	58.483.800	18.393.800	31.216.200	34.009.300	357.460.120
2002:1	58.532.200	41.328.600	102.656.700	2.371.800	20.318.400	58.755.700	17.880.600	32.537.800	34.268.600	368.650.400
2002:2	60.583.600	41.888.100	104.198.100	2.431.700	20.614.500	59.935.300	18.555.900	32.514.400	34.599.300	375.720.900
2002:3	62.757.600	44.102.200	107.242.600	2.514.900	21.555.100	62.301.100	19.330.300	33.188.200	34.927.600	387.919.600
2002:4	49.740.100	42.613.100	105.290.400	2.549.800	21.981.800	62.274.500	20.006.300	33.282.600	35.186.900	372.925.500
2003:1	59.903.300	41.812.500	107.393.500	2.514.800	21.560.900	63.190.400	20.142.600	34.585.300	35.640.600	366.743.900
2003:2	62.446.700	43.468.300	108.644.900	2.558.400	21.966.000	63.887.200	20.682.900	34.890.900	36.075.200	394.620.500
2003:3	65.780.500	43.035.900	113.008.900	2.672.400	22.846.600	64.791.500	21.731.200	35.195.400	36.545.200	405.607.600
2003:4	52.256.800	39.287.100	112.707.600	2.603.600	23.248.300	64.647.500	22.901.700	35.702.800	36.843.900	390.199.300
2004:1	63.026.800	37.774.000	113.760.500	2.636.800	23.200.400	64.958.600	22.835.200	36.877.200	37.527.800	402.597.300
2004:2	64.369.800	39.718.200	116.456.600	2.718.100	23.538.900	66.498.000	23.540.400	37.006.800	38.088.700	411.935.500
2004:3	66.892.600	40.598.800	118.651.000	2.759.900	24.573.400	69.055.900	24.786.800	38.121.700	38.412.200	423.852.300
2004:4	52.874.400	42.009.500	121.084.300	2.782.800	25.021.700	70.629.700	25.734.300	39.117.600	38.877.400	418.131.700
2005:1	62.783.400	39.697.000	120.943.900	2.804.600	24.945.800	71.066.400	25.946.000	39.160.000	39.265.000	426.612.100
2005:2	65.868.400	40.184.000	122.115.400	2.904.600	25.497.400	72.910.900	26.809.700	39.998.500	39.832.400	436.121.300
2005:3	69.398.500	41.781.400	123.859.400	2.942.100	26.288.100	74.738.600	28.017.600	41.014.800	40.557.200	448.597.700
2005:4	55.831.400	43.560.200	124.642.700	2.932.800	26.867.100	74.938.100	28.488.200	41.078.900	41.144.700	439.484.100
2006:1	66.940.800	40.627.800	124.591.100	2.947.100	26.870.000	74.548.800	29.069.400	41.371.600	41.534.500	448.501.100
2006:2	66.939.800	42.242.400	131.119.600	3.034.400	27.668.600	77.184.600	30.504.300	42.065.800	42.223.000	457.776.000
2006:3	71.221.800	42.242.400	131.119.600	3.111.300	28.530.300	80.607.100	32.082.700	42.869.000	43.265.100	475.049.300
2006:4	57.300.400	43.547.900	131.844.900	3.158.300	29.164.700	80.180.300	33.319.300	43.767.900	43.682.800	465.966.500
2007:1	65.806.500	43.129.300	131.088.800	3.187.500	29.135.800	81.439.900	32.853.700	44.733.700	44.448.800	475.824.000
2007:2	70.082.500	42.955.500	133.034.100	3.343.800	29.797.900	83.056.800	34.379.500	45.255.200	45.197.600	487.102.900
2007:3	76.607.400	42.662.900	137.084.000	3.462.700	30.902.700	87.005.200	36.603.000	46.116.700	45.513.000	505.957.600
2007:4	59.090.500	42.614.000	136.871.000	3.553.200	32.064.600	87.443.800	39.108.300	47.553.700	46.812.700	495.089.800

PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA TAHUNAN

Periode	Sektor							Total		
	Tanil	Tambang	Industri	Listrik, gas	Bangunan	Dag & Hotel	Transp. & kom		Keu & pers.	Jasa-jasa
2000	216.831.417	167.697.194	305.597.869	8.193.726	76.573.392	224.452.645	65.012.132	115.463.100	129.753.092	1.389.769.567
2001	225.665.700	168.244.330	398.323.800	9.036.300	80.080.400	234.273.000	70.276.100	123.085.500	133.957.300	1.442.984.430
2002	231.603.500	169.932.000	419.387.800	9.868.700	84.469.800	243.266.600	76.173.100	131.523.000	138.982.400	1.505.206.400
2003	240.387.300	167.603.800	441.754.900	10.349.200	89.621.800	256.516.600	85.458.400	140.374.400	145.104.900	1.577.171.300
2004	247.163.600	160.100.500	469.952.400	10.897.600	96.334.400	271.142.200	96.896.700	151.123.300	152.906.100	1.656.516.800
2005	253.881.700	165.222.600	491.561.400	11.584.100	103.598.400	293.654.000	109.261.500	161.252.200	160.799.300	1.750.615.200
2006	262.402.800	168.028.900	514.100.300	12.251.100	112.233.600	312.520.800	124.975.700	170.074.300	170.705.400	1.847.292.900
2007	271.586.900	171.361.700	538.077.900	13.525.200	121.201.000	338.945.700	142.944.500	183.659.300	181.972.100	1.963.974.300

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DKI JAKARTA

Periode	Sektor							Total	
	Tani	Tambang	Industri	Listrik, gas	Bangunan	Dag & Hotel	Transp. & kom		
2000	391.324.30	1.287.784.09	40.348.834.60	1.452.044.84	23.881.225.04	45.635.703.55	12.644.318.40	74.937.112.56	227.924.174.00
2001	380.398.87	1.274.731.20	41.924.868.89	1.555.122.77	24.426.990.52	48.118.886.82	14.434.440.45	78.076.598.62	238.656.137.26
2002	345.580.05	1.233.251.79	43.847.423.68	1.655.311.58	25.291.113.54	51.014.121.01	16.215.672.43	80.606.200.34	250.331.156.56
2003	291.284.53	1.059.605.90	46.063.292.70	1.749.704.49	26.312.137.90	55.020.400.38	18.254.713.99	83.803.540.27	263.624.241.91
2004	287.573.96	987.491.70	48.707.025.63	1.848.696.42	27.475.877.76	58.848.582.53	20.559.712.68	87.294.377.44	278.524.822.21
2005	290.598.61	915.977.01	51.177.799.88	1.977.201.78	29.094.579.91	63.492.894.92	23.290.708.34	90.870.316.54	295.270.543.61
2006	292.485.08	933.061.33	53.646.724.44	2.075.804.24	31.166.114.27	67.684.399.02	26.600.518.85	94.280.866.11	312.700.302.84
2007	296.188.90	937.342.50	56.155.162.90	2.183.805.80	33.541.021.80	72.446.207.70	30.494.832.40	98.428.384.50	332.681.739.00

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA BARAT

Periode	Sektor							Total	
	Tani	Tambang	Industri	Listrik, gas	Bangunan	Dag & Hotel	Transp. & kom		
2000	28.784.186.59	7.548.716.93	89.949.896.89	3.882.660.88	5.254.511.71	35.567.824.82	7.314.261.24	5.351.150.09	12.099.818.43
2001	29.554.446.83	8.547.311.59	90.912.460.85	4.463.905.87	5.143.936.70	36.403.261.68	7.925.724.28	5.885.016.62	203.368.979.97
2002	29.186.915.58	7.999.634.26	94.617.087.74	4.729.907.50	5.580.463.39	38.647.464.99	8.478.452.14	6.490.645.26	211.391.674.16
2003	29.924.294.54	8.232.371.00	99.768.380.17	4.802.195.62	5.984.953.41	39.198.353.10	9.323.763.67	6.967.352.63	221.627.858.97
2004	31.778.941.73	7.705.213.45	102.095.098.82	5.210.295.64	6.602.399.92	41.798.813.67	10.274.962.93	7.247.001.69	235.057.690.95
2005	32.373.993.63	7.194.525.89	110.570.845.94	5.529.209.58	7.780.823.72	43.013.909.30	10.295.854.17	7.570.633.17	245.798.061.75
2006	34.461.321.53	7.017.180.00	114.299.630.00	5.755.575.64	8.112.539.92	50.609.693.67	11.186.242.93	7.672.321.69	257.536.008.48
2007	33.685.162.31	6.725.940.00	120.170.847.15	6.089.899.62	8.863.903.72	58.112.869.72	12.319.174.21	8.581.132.08	273.549.399.97

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TENGAH

Periode	Sektor							Total	
	Tani	Tambang	Industri	Listrik, gas	Bangunan	Dag & Hotel	Transp. & kom		
2000	26.124.205.65	1.100.330.84	35.688.248.50	867.870.50	5.262.490.31	26.065.270.79	5.191.707.80	4.340.625.96	114.701.304.81
2001	26.417.424.36	1.190.371.57	37.164.561.05	872.603.67	5.532.343.12	25.813.243.84	5.577.204.52	4.420.388.39	118.816.400.29
2002	27.725.086.08	1.227.651.53	39.193.652.64	975.868.80	6.116.817.45	26.789.742.59	5.872.915.88	4.524.128.37	123.038.541.13
2003	27.157.595.62	1.295.356.44	41.347.172.12	980.306.54	6.907.250.46	27.866.472.01	6.219.922.79	4.650.861.80	129.166.462.45
2004	28.606.237.28	1.330.759.58	43.995.611.83	1.062.114.58	7.448.715.40	28.343.045.24	6.510.447.43	4.826.541.38	135.786.872.31
2005	29.924.642.25	1.454.230.59	46.105.706.52	1.179.891.98	7.960.948.49	30.056.962.75	6.988.425.75	5.067.665.70	143.051.213.88
2006	30.968.664.00	1.675.862.00	48.200.256.00	1.287.760.00	8.446.567.00	31.714.201.00	7.424.227.00	5.409.684.00	150.677.918.00
2007	31.847.732.00	1.791.714.00	50.893.950.00	1.340.845.00	9.055.729.00	33.926.998.00	8.052.597.00	5.758.300.00	159.133.206.00

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TIMUR

Periode	Sektor							Total	
	Tani	Tambang	Industri	Listrik, gas	Bangunan	Dag & Hotel	Transp. & kom		
2000	40.029.137.70	4.184.214.43	60.431.836.46	3.194.244.22	8.130.677.83	49.475.748.74	10.618.126.92	9.329.173.44	262.830.063.00
2001	40.533.877.14	4.296.325.31	61.850.431.56	2.650.100.48	8.202.906.17	53.475.477.92	10.833.961.42	10.533.820.46	210.448.570.18
2002	41.354.488.14	4.415.073.37	61.396.901.69	3.144.025.77	8.293.319.45	57.926.650.32	12.245.296.15	10.891.211.34	218.452.389.09
2003	42.143.435.26	4.512.702.20	64.133.626.56	3.631.902.87	8.447.765.37	62.912.781.39	12.953.457.60	11.222.626.55	228.884.458.54
2004	43.331.493.13	4.595.921.87	67.520.434.83	4.171.615.50	8.604.401.30	68.795.968.36	13.830.439.67	11.783.343.03	242.228.872.31
2005	44.700.984.17	5.024.241.99	70.635.868.95	4.429.541.76	8.903.497.41	74.946.735.68	14.521.814.32	12.656.393.27	256.374.726.79
2006	46.585.103.10	5.427.009.61	72.770.032.87	4.625.089.51	9.021.134.55	81.592.246.77	15.504.900.38	13.556.766.79	271.113.469.93
2007	48.475.377.00	5.932.464.00	75.341.477.00	5.181.802.00	9.067.089.00	89.095.746.00	16.538.453.00	14.678.181.00	287.466.788.00

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DKI JAKARTA TRIWULANAN

Periode	Sektor				Daq & Hotel	Transp. & kom	Keu & pers.	Jasa-jasa	Total
	Tani	Tambang	Industri	Listrik, gas					
2001:1	97,536.84	323,693.69	10,151,737.76	362,809.90	11,847,935.41	3,479,020.55	19,084,777.59	6,967,385.26	58,339,289.75
2001:2	97,230.72	317,561.51	10,378,021.69	391,480.35	12,058,754.52	3,537,414.67	19,438,732.70	7,089,054.95	59,341,460.84
2001:3	104,695.22	317,580.53	10,560,372.92	400,682.35	12,199,820.93	3,639,989.51	19,731,773.65	7,181,146.54	60,238,162.79
2001:4	80,536.10	315,895.48	10,834,736.53	400,150.16	12,012,375.96	3,778,015.72	19,801,314.68	7,226,512.38	60,736,923.88
2002:1	90,397.96	303,995.56	10,894,017.94	407,898.22	12,466,256.40	3,806,408.73	19,941,367.10	7,279,296.74	61,094,849.32
2002:2	93,641.83	320,064.01	11,212,323.58	421,854.35	12,716,533.33	4,015,317.78	19,927,026.00	7,349,543.66	61,896,970.56
2002:3	74,218.16	309,257.13	11,008,219.07	427,708.55	13,212,843.76	4,258,926.15	20,397,830.98	7,474,360.98	63,594,463.31
2003:1	72,586.63	264,342.29	11,198,287.16	425,168.79	13,553,747.04	4,302,647.86	20,647,429.88	7,631,291.72	64,425,583.73
2003:2	75,668.55	274,810.40	11,328,774.91	432,540.10	13,703,704.09	4,418,061.00	20,829,873.13	7,724,347.38	65,236,295.55
2003:3	79,708.21	272,076.73	11,783,824.10	451,813.69	13,897,167.95	4,641,987.69	21,011,659.68	7,824,982.81	66,670,772.93
2003:4	63,521.14	248,376.49	11,752,406.52	440,181.91	13,866,281.30	4,892,017.44	21,314,577.57	7,888,939.84	67,291,589.70
2004:1	73,531.46	232,988.10	11,790,418.75	447,313.42	14,098,385.66	4,845,213.01	21,376,489.00	7,980,287.19	67,386,833.67
2004:2	74,694.03	244,979.83	12,069,849.20	461,105.36	14,432,696.35	4,994,843.58	22,020,496.25	8,168,384.86	70,538,406.19
2004:3	77,829.30	250,411.32	12,297,282.23	472,081.23	15,329,438.68	5,259,305.93	22,595,764.72	8,267,279.65	72,131,548.80
2004:4	61,519.17	259,112.45	12,549,475.44	478,695.81	15,365,741.42	5,530,774.65	22,067,801.84	8,341,520.88	71,674,053.41
2005:1	71,563.27	220,076.06	12,591,799.74	478,695.81	16,145,455.68	5,714,885.11	22,540,321.04	8,462,060.26	73,150,212.84
2005:2	75,394.43	222,775.94	12,713,767.81	495,764.05	15,764,353.10	5,972,366.90	23,113,035.72	8,615,037.96	74,952,496.13
2005:3	79,435.06	231,631.76	12,895,340.41	502,164.64	16,159,732.33	6,072,682.27	23,149,157.94	8,740,847.42	75,493,781.23
2005:4	63,905.86	241,493.24	12,976,891.91	500,577.29	16,202,867.56	6,189,152.59	22,934,389.74	8,762,195.57	75,293,455.50
2006:1	74,615.00	225,605.41	13,001,168.08	499,351.30	16,145,455.68	6,494,656.49	23,319,220.23	8,907,442.81	77,145,759.20
2006:2	74,613.89	231,063.99	13,205,027.60	514,143.25	16,716,305.81	6,830,712.91	23,764,474.99	9,127,286.17	79,626,133.11
2006:3	79,386.78	234,571.25	13,682,421.60	527,173.05	17,457,536.01	7,093,996.85	24,262,781.15	9,215,404.94	80,634,955.03
2006:4	63,869.41	241,820.67	13,756,107.16	535,136.64	17,365,101.52	7,008,790.65	23,974,096.73	9,330,498.95	80,240,146.04
2007:1	71,767.65	235,915.76	13,680,756.85	514,660.12	17,406,953.12	7,334,294.71	24,253,583.82	9,487,683.79	81,762,060.20
2007:2	76,431.00	234,965.08	13,883,773.25	539,896.63	17,752,549.11	7,808,641.47	24,715,286.84	9,553,891.19	84,359,604.26
2007:3	83,546.97	233,364.57	14,306,431.00	559,094.46	18,596,479.58	8,343,105.57	25,485,417.12	9,826,718.57	86,319,928.50
2007:4	64,443.28	233,097.09	14,284,201.79	570,154.60	18,690,225.89				

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA BARAT TRIWULANAN

Periode	Sektor										Total
	Tani	Tambang	Industri	Listrik, gas	Bangunan	Dag & Hotel	Transp. & kom	Keu & pers.	Jasa-jasa		
2001:1	7,609,036.77	2,170,426.82	22,013,651.70	1,041,428.55	1,268,557.31	8,963,289.09	1,910,275.48	1,438,513.40	3,557,338.00	49,972,517.12	
2001:2	7,556,176.20	2,129,309.44	22,504,339.68	1,123,725.71	1,270,561.43	9,122,779.54	1,942,338.77	1,465,192.73	3,619,458.90	50,731,882.41	
2001:3	8,136,117.81	2,129,136.95	27,899,761.29	1,150,139.64	1,280,794.02	9,229,500.16	1,998,661.00	1,488,788.17	3,666,478.10	51,977,677.15	
2001:4	6,257,116.05	2,118,138.37	23,494,708.19	1,148,611.97	1,324,023.94	9,087,692.89	2,074,449.03	1,492,522.32	3,689,640.54	50,686,903.29	
2002:1	7,376,289.13	1,945,564.61	23,160,134.82	1,136,822.79	1,342,326.93	9,334,445.66	1,990,201.41	1,605,736.77	3,861,525.52	51,753,047.64	
2002:2	7,636,608.71	1,971,903.35	23,507,886.47	1,165,533.34	1,361,898.66	9,521,847.96	2,109,887.75	1,634,581.98	3,898,790.14	52,777,127.62	
2002:3	7,908,778.46	2,076,133.22	24,194,748.81	1,205,411.76	1,424,029.02	9,897,698.99	2,276,802.60	1,642,492.57	3,935,784.33	54,431,978.95	
2002:4	6,268,299.48	2,006,033.09	23,754,317.64	1,222,139.61	1,452,218.78	9,893,473.08	2,197,617.11	1,716,609.16	3,965,003.31	52,430,780.16	
2003:1	7,456,982.91	2,053,748.26	24,258,344.52	1,166,907.98	1,439,839.21	9,656,137.70	2,256,565.44	1,731,777.33	4,332,406.61	54,222,400.73	
2003:2	7,773,594.71	2,135,077.92	24,536,967.64	1,187,139.09	1,466,891.83	9,762,615.85	2,496,232.97	1,746,417.78	4,388,850.68	55,183,036.41	
2003:3	8,186,598.39	2,113,830.28	25,527,517.64	1,249,036.93	1,525,698.40	9,900,802.11	2,370,938.06	1,772,075.23	4,424,722.69	56,998,212.39	
2003:4	6,505,118.51	1,979,705.55	25,454,510.17	1,208,112.62	1,552,523.97	9,878,797.44	2,421,453.30	1,768,417.78	4,993,271.73	55,724,209.44	
2004:1	8,103,640.68	1,817,967.67	24,711,969.91	1,260,691.17	1,590,068.75	10,013,905.68	2,421,453.30	1,774,632.65	5,067,902.43	57,990,349.04	
2004:2	8,276,316.27	1,911,511.87	25,299,685.81	1,299,561.79	1,613,268.28	10,251,216.93	2,496,232.97	1,828,096.82	5,110,945.81	59,547,705.24	
2004:3	8,600,684.07	1,953,917.82	25,776,409.61	1,319,516.96	1,684,169.04	10,645,538.38	2,628,401.70	1,875,854.44	5,172,843.13	60,986,976.75	
2004:4	6,798,300.71	2,021,806.08	26,305,033.39	1,330,495.77	1,714,893.85	10,888,152.67	2,728,874.96	1,925,604.77	5,318,011.79	61,370,930.89	
2005:1	8,005,891.69	1,728,583.71	27,204,880.81	1,338,664.31	1,873,570.17	10,409,678.34	2,526,313.13	1,928,614.20	5,414,779.62	62,830,232.60	
2005:2	8,399,278.73	1,749,789.85	27,468,395.77	1,386,395.33	1,914,998.44	10,679,857.38	2,640,135.12	1,975,604.77	5,493,216.57	61,553,921.51	
2005:3	8,849,423.16	1,819,347.74	27,860,687.67	1,404,294.46	1,974,384.47	10,947,575.59	2,640,135.12	1,928,614.20	5,493,216.57	62,537,934.72	
2005:4	7,119,400.05	1,896,804.59	28,036,881.62	1,399,855.48	2,017,870.63	10,976,797.99	2,640,135.12	1,928,614.20	5,493,216.57	63,772,827.72	
2006:1	8,791,325.52	1,696,687.81	27,700,269.06	1,384,537.68	1,942,234.30	12,072,448.25	2,710,358.86	1,897,655.02	4,556,467.80	63,772,827.72	
2006:2	8,791,194.19	1,737,739.60	28,134,611.84	1,425,550.93	1,999,959.21	12,499,290.26	2,710,358.86	1,897,655.02	4,556,467.80	63,772,827.72	
2006:3	9,353,548.63	1,764,116.32	29,151,746.78	1,461,678.29	2,052,245.15	13,053,530.62	2,871,637.25	1,933,888.65	4,668,925.35	66,321,317.05	
2006:4	7,525,253.19	1,818,636.28	29,313,002.32	1,483,758.73	2,108,101.25	12,984,414.54	2,982,322.04	1,974,439.46	4,714,001.18	64,903,928.99	
2007:1	8,162,038.13	1,692,823.33	29,276,526.96	1,435,213.90	2,118,579.22	13,963,022.10	2,831,381.79	2,090,097.20	4,641,085.87	66,210,768.50	
2007:2	8,692,394.18	1,686,001.69	29,710,977.72	1,505,590.04	2,166,723.13	14,240,242.60	2,962,877.55	2,114,463.29	4,719,271.23	67,798,541.42	
2007:3	9,501,683.27	1,674,517.15	30,615,456.26	1,559,126.33	2,247,057.51	14,917,203.12	3,154,502.16	2,154,715.25	4,752,203.46	70,576,464.50	
2007:4	7,329,046.74	1,672,597.83	30,567,886.21	1,589,969.36	2,331,543.85	14,922,401.90	3,370,412.72	2,221,856.34	4,887,910.60	68,963,625.55	

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TENGAH TRIWULANAN

Periode	Sektor										Total
	Tanil	Tambang	Industri	Listrik, gas	Bangunan	Dag & Hotel	Transp. & kom	Keu & pers.	Jasa-jasa	Total	
2001:1	6,801,384.39	302,272.17	8,999,071.14	203,578.30	1,364,343.06	6,355,816.83	1,344,230.09	1,080,504.67	2,095,273.29	29,346,473.92	
2001:2	6,757,346.94	296,545.81	9,199,661.94	219,665.74	1,366,498.51	6,468,910.59	1,366,792.51	1,100,544.21	2,945,832.72	29,716,798.96	
2001:3	7,270,731.31	296,563.57	9,361,308.32	224,829.13	1,377,503.72	6,544,585.57	1,406,425.56	1,118,267.35	2,984,101.07	30,589,315.60	
2001:4	5,592,961.72	294,990.03	9,604,519.65	224,330.50	1,423,997.83	6,444,030.85	1,459,756.37	1,121,072.17	3,002,952.69	29,168,811.81	
2002:1	7,006,846.98	298,573.07	9,593,774.57	234,547.90	1,471,341.75	6,349,709.45	1,378,587.19	1,119,235.30	2,740,029.75	30,192,595.95	
2002:2	7,252,118.57	302,615.11	9,737,775.25	240,471.43	1,492,783.61	6,477,188.44	1,461,492.39	1,118,430.38	2,766,471.67	30,849,646.86	
2002:3	7,512,666.53	318,610.58	10,022,297.29	248,699.10	1,560,896.46	6,732,859.68	1,490,358.48	1,141,607.76	2,792,721.70	31,820,717.58	
2002:4	5,954,351.10	307,852.77	9,839,855.53	252,150.37	1,591,795.62	6,729,985.02	1,542,477.82	1,144,854.93	2,813,454.67	30,176,777.83	
2003:1	6,767,535.55	323,155.51	10,051,767.46	238,209.22	1,661,722.22	6,815,369.58	1,466,039.81	1,145,874.54	3,178,691.44	31,648,365.33	
2003:2	7,054,374.47	335,952.66	10,168,895.42	242,339.14	1,692,943.72	6,890,522.60	1,505,364.49	1,155,999.63	3,217,452.28	32,264,344.42	
2003:3	7,431,508.31	332,610.78	10,577,355.09	253,137.56	1,760,812.53	6,988,055.44	1,581,662.96	1,166,088.27	3,259,370.34	33,350,601.28	
2003:4	5,903,677.29	303,637.50	10,549,154.15	246,620.62	1,791,771.99	6,972,524.39	1,666,855.52	1,182,899.37	3,286,010.61	31,903,151.42	
2004:1	7,294,600.00	313,978.48	10,649,935.61	256,990.87	1,793,888.55	6,790,254.48	1,534,287.23	1,177,775.58	3,353,413.15	33,165,123.95	
2004:2	7,450,036.22	330,138.73	10,902,336.85	264,914.63	1,820,061.86	6,951,171.09	1,581,669.31	1,181,914.71	3,403,534.12	33,885,777.51	
2004:3	7,742,020.22	337,458.30	11,107,770.36	269,988.59	1,900,050.90	7,218,553.58	1,665,414.39	1,217,522.13	3,432,441.46	34,890,219.92	
2004:4	6,119,580.85	349,184.07	11,335,569.01	271,220.49	1,934,714.10	7,383,066.09	1,729,076.50	1,249,328.96	3,474,010.86	33,845,750.93	
2005:1	7,400,181.99	349,398.88	11,343,860.52	283,660.95	1,916,943.01	7,274,003.21	1,659,520.46	1,230,679.57	3,494,976.22	34,955,224.82	
2005:2	7,763,806.16	353,685.28	11,453,740.66	295,846.40	1,959,330.34	7,462,797.05	1,714,763.19	1,257,031.08	3,545,480.48	35,806,480.62	
2005:3	8,179,893.57	367,745.03	11,617,318.09	299,665.94	2,020,091.14	7,649,871.33	1,792,021.14	1,288,970.29	3,609,994.90	36,825,571.43	
2005:4	6,580,760.53	383,401.40	11,690,787.25	298,718.69	2,064,584.00	7,670,291.16	1,822,120.97	1,290,984.76	3,662,288.25	35,463,937.01	
2006:1	7,900,124.02	405,207.59	11,681,228.19	309,780.96	2,022,204.18	7,565,114.47	1,726,878.30	1,315,695.03	3,783,898.80	36,710,331.55	
2006:2	7,900,206.00	415,011.69	11,864,390.93	318,957.40	2,082,305.87	7,832,592.00	1,812,119.06	1,337,771.90	3,846,622.91	37,409,977.75	
2006:3	8,405,565.77	421,311.05	12,293,317.64	327,040.65	2,147,156.38	8,179,902.81	1,905,884.48	1,363,315.18	3,941,560.88	38,985,054.85	
2006:4	6,762,568.21	434,331.66	12,361,319.25	331,981.00	2,194,900.57	8,136,591.71	1,979,345.16	1,391,901.89	3,979,614.41	37,572,553.86	
2007:1	7,716,322.04	450,948.90	12,398,998.05	315,998.54	2,164,427.77	8,151,781.61	1,850,771.50	1,402,543.00	4,021,850.87	38,474,142.27	
2007:2	8,218,248.66	449,131.69	12,582,993.71	331,493.62	2,213,613.56	8,313,626.30	1,936,725.50	1,418,893.67	4,089,604.38	39,554,331.11	
2007:3	8,983,393.32	446,072.34	12,966,052.39	343,280.99	2,295,686.47	8,708,844.06	2,061,983.55	1,445,904.42	4,118,142.84	41,369,360.19	
2007:4	6,929,267.97	445,561.06	12,945,905.84	350,071.86	2,382,001.20	8,752,746.02	2,293,116.45	1,490,958.92	4,235,743.11	39,735,372.43	

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO JAWA TIMUR TRIWULANAN

Periode	Sektor				Keu & pers.	Jasa-lasa	Total			
	Tani	Tambang	Industri	listrik, gas						
2001:1	10.435.781.91	1.090.969.90	14.976.537.26	618.268.04	2.022.936.37	13.166.846.75	2.611.225.18	4.233.547.17	51.920.963.74	
2001:2	10.360.540.73	1.070.302.16	15.310.366.78	667.125.63	2.026.132.29	13.401.134.23	2.655.053.67	2.622.605.54	4.500.794.46	52.614.055.49
2001:3	11.155.979.73	1.070.366.25	15.579.383.78	682.806.87	2.042.449.93	13.557.904.14	2.732.042.58	2.664.839.93	4.559.262.81	54.044.986.02
2001:4	8.581.624.77	1.064.687.00	15.984.143.73	681.899.94	2.111.387.59	13.349.592.81	2.835.639.99	2.671.523.83	4.586.065.28	51.868.064.93
2002:1	10.451.349.70	1.073.775.40	15.028.580.51	755.659.63	1.994.878.43	13.920.909.10	2.874.416.85	2.694.403.69	4.631.882.47	53.495.855.78
2002:2	10.817.642.08	1.088.312.00	15.294.236.06	774.743.87	2.023.949.79	14.271.795.49	3.047.277.97	2.692.465.97	4.676.581.22	54.687.004.45
2002:3	11.205.825.58	1.145.837.45	15.699.940.17	801.251.54	2.116.298.73	14.835.139.86	3.107.465.08	2.748.262.28	4.770.955.57	56.380.976.25
2002:4	8.881.456.35	1.107.148.52	15.414.144.95	812.370.74	2.158.192.51	14.828.805.87	3.216.136.25	2.756.079.40	4.756.003.61	53.930.338.19
2003:1	10.501.931.03	1.125.794.05	15.591.303.29	882.542.61	2.032.333.92	15.399.423.12	3.053.138.31	2.740.381.27	4.771.435.00	56.098.282.60
2003:2	10.947.826.52	1.170.376.17	15.772.980.55	897.843.57	2.070.518.71	15.569.232.43	3.135.034.92	2.764.595.61	4.829.617.68	57.158.026.16
2003:3	11.537.290.78	1.159.733.87	16.406.542.61	937.850.67	2.153.524.21	15.789.609.23	3.293.932.23	2.788.722.80	4.892.539.59	58.953.746.00
2003:4	9.161.386.93	1.057.798.11	16.362.800.12	913.706.03	2.191.388.52	15.754.516.61	3.471.352.14	2.828.926.86	4.932.528.47	56.674.403.78
2004:1	11.049.545.12	1.084.358.59	16.344.545.59	1.009.370.48	2.072.714.62	16.361.932.93	3.259.356.16	2.875.378.57	4.931.990.56	58.988.692.62
2004:2	11.284.993.20	1.140.169.73	16.731.907.89	1.040.492.23	2.102.448.78	16.749.680.81	3.360.012.07	2.885.483.70	5.005.705.34	60.300.893.76
2004:3	11.727.277.95	1.165.448.66	17.047.188.42	1.056.493.32	2.194.848.31	17.393.970.99	3.537.915.55	2.972.414.37	5.048.220.46	62.143.778.04
2004:4	9.269.676.85	1.205.944.89	17.396.792.92	1.065.259.47	2.234.899.59	17.790.383.63	3.673.155.88	3.050.066.40	5.109.358.12	60.795.527.76
2005:1	11.054.281.46	1.207.143.18	17.379.268.33	1.072.426.24	2.143.902.47	18.040.851.26	3.448.451.60	3.076.026.00	5.114.642.40	62.536.992.94
2005:2	11.597.457.81	1.221.952.32	17.547.609.29	1.110.684.36	2.191.308.31	18.509.094.34	3.563.244.93	3.141.890.35	5.188.551.68	64.071.773.41
2005:3	12.219.002.98	1.270.527.54	17.798.216.76	1.125.003.65	2.259.262.98	18.973.072.59	3.723.785.46	3.221.720.92	5.282.963.83	65.873.556.72
2005:4	9.830.241.91	1.324.610.94	17.910.774.57	1.121.447.51	2.309.023.65	19.023.717.48	3.786.332.34	3.226.735.92	5.359.491.33	63.892.403.72
2006:1	11.884.187.55	1.312.199.63	17.637.599.46	1.112.602.24	2.159.762.19	19.463.037.62	3.606.446.30	3.297.765.35	5.358.483.22	65.832.083.55
2006:2	11.884.010.02	1.349.948.64	17.914.158.65	1.145.560.12	2.223.952.22	20.151.186.51	3.784.464.76	3.353.100.62	5.447.308.55	67.247.690.09
2006:3	12.644.205.46	1.364.348.10	18.561.799.24	1.174.591.75	2.293.214.11	21.044.725.33	3.980.286.31	3.417.124.37	5.581.752.81	70.062.047.48
2006:4	10.172.700.36	1.406.513.24	18.664.475.52	1.192.335.40	2.344.206.04	20.933.297.32	4.133.703.01	3.488.776.45	5.635.641.47	67.971.648.81
2007:1	11.745.761.29	1.493.116.72	18.355.007.35	1.221.201.45	2.167.142.94	21.407.407.28	3.801.121.23	3.575.140.91	5.656.170.69	69.422.077.85
2007:2	12.508.981.87	1.487.099.84	18.627.387.57	1.281.083.42	2.216.390.44	21.832.427.90	3.977.653.88	3.616.827.55	5.751.456.51	71.299.308.99
2007:3	13.673.607.22	1.476.070.17	19.194.453.13	1.326.636.63	2.298.566.31	22.870.309.90	4.234.909.32	3.685.679.24	5.791.591.60	74.552.723.52
2007:4	10.547.076.62	1.475.277.27	19.164.628.95	1.352.880.49	2.384.989.31	22.985.600.92	4.524.768.57	3.800.525.30	5.956.980.20	72.192.677.64

PERHITUNGAN LOCATION QUOTIENT DAN SEKTOR UNGGULAN DKI JAKARTA

Periode	Sektor										Jlh	PDRB Sektor Unggulan
	Pertanian	Tambang	Industri	Listrik, gas	Bangunan	Dag & Hotel	Transp. & komi	Keu & pers.	Jasa-jasa			
2001:1	0.01	0.05	0.64	1.05	1.86	1.26	1.26	3.88	1.30	6	47,765,921.47	
2001:2	0.01	0.05	0.64	1.04	1.85	1.25	1.25	3.85	1.29	6	48,548,946.92	
2001:3	0.01	0.05	0.64	1.05	1.87	1.26	1.26	3.88	1.30	6	49,255,514.13	
2001:4	0.01	0.04	0.62	1.01	1.80	1.21	1.21	3.73	1.25	6	49,505,755.78	
2002:1	0.01	0.04	0.63	1.01	1.81	1.28	1.28	3.72	1.28	6	49,974,714.16	
2002:2	0.01	0.04	0.63	1.02	1.82	1.29	1.29	3.74	1.29	6	50,608,509.04	
2002:3	0.01	0.04	0.64	1.02	1.83	1.29	1.30	3.74	1.30	6	51,968,433.89	
2002:4	0.01	0.04	0.61	0.98	1.75	1.24	1.25	3.59	1.24	5	51,925,535.39	
2003:1	0.01	0.04	0.63	1.01	1.76	1.29	1.28	3.58	1.29	6	52,890,367.65	
2003:2	0.01	0.04	0.63	1.02	1.78	1.30	1.29	3.61	1.30	6	53,557,041.69	
2003:3	0.01	0.04	0.63	1.03	1.79	1.30	1.30	3.63	1.30	6	54,535,163.89	
2003:4	0.01	0.04	0.60	0.98	1.70	1.24	1.24	3.46	1.24	6	54,787,303.65	
2004:1	0.01	0.04	0.62	1.01	1.70	1.30	1.27	3.45	1.27	6	55,290,095.37	
2004:2	0.01	0.04	0.62	1.02	1.72	1.31	1.28	3.48	1.28	6	56,078,310.49	
2004:3	0.01	0.04	0.62	1.02	1.71	1.30	1.27	3.47	1.28	6	57,912,883.34	
2004:4	0.01	0.04	0.60	0.98	1.65	1.26	1.23	3.35	1.23	5	58,789,360.50	
2005:1	0.01	0.03	0.62	1.02	1.67	1.29	1.27	3.36	1.26	6	60,138,274.66	
2005:2	0.01	0.03	0.62	1.02	1.67	1.29	1.27	3.37	1.27	6	61,746,088.90	
2005:3	0.01	0.03	0.62	1.02	1.68	1.29	1.28	3.28	1.24	5	61,710,912.93	
2005:4	0.01	0.03	0.61	0.99	1.63	1.26	1.24	3.28	1.24	5	61,992,067.01	
2006:1	0.01	0.03	0.62	1.01	1.65	1.29	1.27	3.30	1.26	6	63,635,053.72	
2006:2	0.01	0.03	0.62	1.01	1.65	1.29	1.26	3.29	1.25	6	63,635,053.72	
2006:3	0.01	0.03	0.62	1.01	1.66	1.29	1.27	3.31	1.26	6	65,629,753.47	
2006:4	0.01	0.03	0.60	0.98	1.60	1.25	1.23	3.20	1.22	5	66,036,021.14	
2007:1	0.01	0.03	0.62	0.96	1.63	1.27	1.27	3.18	1.24	5	65,737,045.66	
2007:2	0.01	0.03	0.62	0.96	1.64	1.27	1.27	3.19	1.25	5	67,026,994.24	
2007:3	0.01	0.03	0.63	0.97	1.65	1.28	1.28	3.21	1.26	5	69,177,167.26	
2007:4	0.01	0.03	0.60	0.93	1.58	1.23	1.22	3.07	1.20	5	71,168,031.74	

PERHITUNGAN LOCATION QUOTIENT DAN SEKTOR UNGGULAN JAWA BARAT

Periode	Sektor										Jlh	PDRB Sektor Unggulan
	Tanl	Tambang	Industri	Listrik, gas	Bangunan	Dag & Hotel	Transp. & kom	Keu & pers.	Jasa-jasa			
2001:1	0.93	0.36	1.63	3.52	0.46	1.11	0.80	0.34	0.77	3	32,018,369.34	
2001:2	0.93	0.36	1.62	3.50	0.46	1.10	0.80	0.34	0.77	3	32,750,844.92	
2001:3	0.93	0.36	1.62	3.50	0.46	1.10	0.80	0.34	0.77	3	33,279,401.09	
2001:4	0.92	0.36	1.61	3.48	0.45	1.10	0.80	0.34	0.77	3	33,731,013.05	
2002:1	0.90	0.34	1.61	3.41	0.47	1.13	0.79	0.35	0.80	3	33,631,403.27	
2002:2	0.90	0.34	1.61	3.41	0.47	1.13	0.79	0.35	0.80	3	34,195,267.02	
2002:3	0.90	0.34	1.61	3.42	0.47	1.13	0.79	0.35	0.80	3	35,297,859.61	
2002:4	0.89	0.33	1.60	3.41	0.47	1.13	0.79	0.35	0.80	3	34,869,930.33	
2003:1	0.89	0.33	1.61	3.31	0.48	1.09	0.78	0.35	0.86	3	35,077,390.19	
2003:2	0.89	0.33	1.62	3.32	0.48	1.09	0.78	0.35	0.86	3	35,486,722.57	
2003:3	0.89	0.33	1.61	3.30	0.48	1.09	0.78	0.35	0.85	3	36,663,390.69	
2003:4	0.88	0.33	1.60	3.28	0.47	1.08	0.77	0.35	0.85	3	36,541,470.44	
2004:1	0.91	0.34	1.54	3.40	0.49	1.09	0.75	0.34	0.95	3	35,980,566.75	
2004:2	0.91	0.34	1.54	3.40	0.49	1.10	0.75	0.34	0.95	3	36,850,164.57	
2004:3	0.92	0.34	1.55	3.40	0.49	1.10	0.75	0.34	0.95	3	37,741,194.97	
2004:4	0.91	0.34	1.54	3.40	0.49	1.10	0.75	0.34	0.95	3	38,523,681.83	
2005:1	0.91	0.31	1.60	3.39	0.51	1.04	0.67	0.33	0.95	3	38,953,223.53	
2005:2	0.91	0.31	1.61	3.41	0.53	1.04	0.67	0.33	0.95	3	39,534,648.48	
2005:3	0.91	0.31	1.61	3.41	0.54	1.05	0.67	0.34	0.95	3	40,212,557.72	
2005:4	0.94	0.30	1.59	3.37	0.52	1.05	0.64	0.34	0.95	3	40,413,535.08	
2006:1	0.94	0.30	1.59	3.37	0.52	1.16	0.64	0.32	0.77	3	41,157,254.99	
2006:2	0.94	0.30	1.60	3.37	0.52	1.16	0.64	0.32	0.77	3	42,059,453.03	
2006:3	0.94	0.30	1.59	3.37	0.52	1.16	0.64	0.32	0.77	3	43,666,955.69	
2006:4	0.94	0.30	1.60	3.37	0.52	1.16	0.64	0.32	0.77	3	43,781,175.60	
2007:1	0.89	0.28	1.60	3.24	0.52	1.23	0.62	0.34	0.75	3	44,674,762.96	
2007:2	0.89	0.28	1.60	3.23	0.52	1.23	0.62	0.34	0.75	3	45,456,810.36	
2007:3	0.89	0.28	1.60	3.23	0.52	1.23	0.62	0.33	0.75	3	47,091,785.70	
2007:4	0.89	0.28	1.60	3.23	0.52	1.23	0.62	0.34	0.75	3	47,150,257.47	

PERHITUNGAN LOCATION QUOTIENT DAN SEKTOR UNGGULAN JAWA TENGAH

Periode	Sektor				Jlh	PDRB Sektor Unggulan
	Tanl	Tambang	Industri	Bangunan		
2001:1	1.42	0.09	1.13	0.84	1.07	25.255.123.95
2001:2	1.42	0.09	1.13	0.84	1.07	25.586.417.92
2001:3	1.41	0.09	1.12	0.83	1.06	26.385.555.41
2001:4	1.43	0.09	1.14	0.85	1.08	24.868.995.41
2002:1	1.46	0.09	1.14	0.88	0.98	23.184.828.90
2002:2	1.46	0.09	1.14	0.88	0.97	23.707.853.69
2002:3	1.46	0.09	1.14	0.88	0.97	24.516.522.60
2002:4	1.48	0.09	1.15	0.89	0.99	22.776.342.02
2003:1	1.38	0.09	1.14	0.94	0.40	27.051.573.26
2003:2	1.38	0.09	1.14	0.94	1.09	27.574.083.92
2003:3	1.37	0.09	1.14	0.94	1.08	28.509.426.74
2003:4	1.38	0.09	1.14	0.94	1.09	26.957.987.05
2004:1	1.40	0.10	1.14	0.94	1.08	28.345.194.11
2004:2	1.41	0.10	1.14	0.94	1.09	28.971.992.91
2004:3	1.41	0.10	1.14	0.94	1.09	29.769.774.20
2004:4	1.43	0.10	1.16	0.96	1.10	28.583.447.29
2005:1	1.44	0.11	1.14	0.94	1.09	29.798.682.89
2005:2	1.44	0.11	1.14	0.94	1.08	30.521.670.74
2005:3	1.44	0.11	1.14	0.94	1.08	31.356.743.83
2005:4	1.46	0.11	1.16	0.95	1.10	29.902.845.88
2006:1	1.44	0.12	1.15	0.92	1.11	31.240.346.44
2006:2	1.44	0.12	1.15	0.92	1.11	31.762.769.23
2006:3	1.46	0.12	1.16	0.93	1.11	33.147.887.75
2006:4	1.46	0.12	1.16	0.93	1.13	31.572.074.58
2007:1	1.45	0.13	1.17	0.92	1.12	32.605.451.11
2007:2	1.44	0.13	1.16	0.91	1.11	33.535.966.68
2007:3	1.43	0.13	1.16	0.91	1.11	35.119.713.40
2007:4	1.46	0.13	1.18	0.93	1.13	33.213.734.80

PERHITUNGAN LOCATION QUOTIENT DAN SEKTOR UNGGULAN JAWA TIMUR

Periode	Sektor										Jlh	PDRB Sektor Unggulan
	Tani	Tambang	Industri	Listrik, gas	Bangunan	Dag & Hotel	Transp. & kom	Keu & pers.	Jasa-jasa			
2001:1	1.23	0.18	1.07	2.01	0.70	1.57	1.06	0.59	0.93	5	41.808,659.13	
2001:2	1.23	0.17	1.06	2.00	0.70	1.56	1.06	0.59	0.92	5	42.394,221.04	
2001:3	1.23	0.17	1.06	2.00	0.70	1.56	1.05	0.58	0.92	5	43.708,067.11	
2001:4	1.24	0.18	1.07	2.02	0.71	1.57	1.06	0.59	0.93	5	41.432,901.24	
2002:1	1.23	0.18	1.01	2.20	0.68	1.64	1.11	0.57	0.93	5	43.100,915.79	
2002:2	1.23	0.18	1.01	2.19	0.68	1.64	1.11	0.57	0.93	5	44.165,695.47	
2002:3	1.23	0.18	1.01	2.19	0.68	1.64	1.11	0.57	0.93	5	45.649,622.23	
2002:4	1.23	0.18	1.01	2.20	0.68	1.65	1.11	0.57	0.93	5	43.152,914.15	
2003:1	1.21	0.19	1.00	2.42	0.65	1.68	1.04	0.55	0.92	5	45.428,338.36	
2003:2	1.21	0.19	1.00	2.42	0.65	1.68	1.05	0.55	0.92	5	46.322,917.98	
2003:3	1.21	0.19	1.00	2.41	0.65	1.68	1.04	0.55	0.92	5	31.553,682.90	
2003:4	1.21	0.19	1.00	2.42	0.65	1.68	1.04	0.55	0.92	4	25.829,610.61	
2004:1	1.20	0.20	0.98	2.61	0.61	1.72	0.97	0.53	0.90	3	28.420,848.53	
2004:2	1.20	0.20	0.98	2.62	0.61	1.72	0.98	0.53	0.90	3	29.075,166.24	
2004:3	1.20	0.20	0.98	2.61	0.61	1.72	0.97	0.53	0.90	3	30.177,742.27	
2004:4	1.21	0.20	0.99	2.63	0.61	1.73	0.98	0.54	0.90	3	28.125,319.95	
2005:1	1.20	0.21	0.98	2.61	0.59	1.73	0.91	0.54	0.89	3	30.167,558.96	
2005:2	1.20	0.21	0.98	2.60	0.58	1.73	0.90	0.53	0.89	3	31.217,216.52	
2005:3	1.20	0.21	0.98	2.60	0.59	1.73	0.91	0.53	0.89	3	32.317,079.23	
2005:4	1.21	0.21	0.99	2.63	0.59	1.75	0.91	0.54	0.90	3	29.975,406.90	
2006:1	1.21	0.22	0.96	2.57	0.55	1.78	0.85	0.54	0.88	3	32.459,827.41	
2006:2	1.21	0.22	0.96	2.57	0.55	1.78	0.84	0.54	0.88	3	33.180,756.66	
2006:3	1.20	0.22	0.96	2.56	0.54	1.77	0.84	0.54	0.87	3	34.863,522.54	
2006:4	1.22	0.22	0.97	2.59	0.55	1.79	0.85	0.55	0.88	3	32.298,333.08	
2007:1	1.22	0.24	0.96	2.63	0.51	1.80	0.79	0.55	0.87	3	34.374,370.02	
2007:2	1.22	0.24	0.96	2.62	0.51	1.80	0.79	0.55	0.87	3	35.622,493.19	
2007:3	1.21	0.23	0.95	2.60	0.50	1.78	0.79	0.54	0.86	3	37.870,553.75	
2007:4	1.22	0.24	0.96	2.63	0.51	1.80	0.79	0.55	0.87	3	34.885,508.03	

LAMPIRAN 2. DATA YANG DIGUNAKAN PADA TESIS

Propinsi	Periode	CR	DPK	NPL	NPPL	SB	LDR	KB	Akt	PDRBSU	Inf	LW	GOP	PJ	TK	UMR
DKI	2001:1	125,232,777	432,865,000	26,295,038	21,00	15,51	28,93	1,973	1,154,372,615	47,765,921,47	2,70	664,00	8,272,40	1,688,49	3,438,126	426,250
DKI	2001:2	130,698,239	443,241,000	25,708,387	19,67	14,93	29,49	1,926	2,015,032,808	48,548,946,92	3,11	664,00	8,294,69	1,688,49	3,443,836	426,250
DKI	2001:3	127,488,042	420,090,000	21,030,082	16,50	16,02	30,35	1,987	2,163,708,715	49,255,514,13	2,42	664,00	8,373,13	1,688,49	3,438,173	426,250
DKI	2001:4	122,487,942	457,250,000	19,117,240	15,61	15,55	26,79	1,998	1,136,951,227	49,505,755,28	3,32	664,00	8,467,00	1,688,49	3,415,454	426,250
DKI	2002:1	123,664,663	436,804,000	14,32	14,93	28,31	20,16	1,804	1,116,188,059	49,974,714,16	4,10	664,00	8,513,73	1,688,49	3,379,759	591,266
DKI	2002:2	122,061,717	440,298,000	15,500,439	12,70	18,15	27,72	1,804	1,095,191,322	50,608,509,04	0,81	664,00	8,547,35	1,688,49	3,324,437	591,266
DKI	2002:3	134,432,602	457,871,000	14,254,587	10,68	17,46	29,15	2,081	1,110,532,057	50,608,509,04	1,29	664,00	8,560,04	1,688,49	3,292,631	591,266
DKI	2002:4	144,618,751	466,132,000	10,439,263	7,22	15,80	31,03	2,046	1,128,270,243	51,925,535,39	2,62	664,00	8,574,00	1,688,49	3,267,526	591,266
DKI	2003:1	147,978,000	461,152,000	12,102,261	8,18	17,13	32,00	2,121	1,108,209,031	52,890,367,65	1,19	664,00	8,596,38	1,688,49	3,272,500	631,554
DKI	2003:2	152,224,000	468,089,000	10,789,283	7,09	16,97	32,52	2,161	1,108,209,031	53,570,641,69	0,82	664,00	8,621,99	1,688,49	3,298,571	631,554
DKI	2003:3	157,817,000	478,783,000	10,214,538	6,47	15,28	32,96	2,166	1,105,936,232	54,535,163,89	1,50	664,00	8,650,60	1,688,49	3,337,038	631,554
DKI	2003:4	160,319,437	480,627,000	12,327,042	7,41	13,86	34,61	2,199	1,189,504,051	54,787,303,65	2,14	664,00	8,682,00	1,688,49	3,379,202	631,554
DKI	2004:1	166,704,288	464,604,000	11,849,120	7,11	14,88	35,88	2,211	1,102,063,729	55,290,095,37	0,63	740,00	8,712,78	1,246,89	3,411,910	671,550
DKI	2004:2	181,229,609	485,849,000	13,592,991	7,50	12,10	37,30	2,249	1,117,622,441	56,078,310,49	2,79	740,00	8,743,27	1,246,89	3,441,249	671,550
DKI	2004:3	189,211,254	491,012,000	12,411,867	6,59	14,17	38,33	2,288	1,124,977,733	57,912,883,24	0,43	740,00	8,770,62	1,246,89	3,469,234	671,550
DKI	2004:4	202,610,627	504,412,000	12,321,281	6,08	12,31	40,17	2,235	1,160,146,780	58,789,360,50	1,92	740,00	8,792,00	1,246,89	3,497,359	671,550
DKI	2005:1	209,875,987	505,043,000	10,624,346	5,06	11,10	41,36	2,205	1,143,957,017	58,790,314,33	3,00	740,00	8,808,36	1,246,89	3,523,545	711,843
DKI	2005:2	228,261,538	529,677,000	15,215,923	6,65	12,50	43,19	2,177	1,198,093,682	60,138,274,66	1,54	740,00	8,821,45	1,246,89	3,546,827	711,843
DKI	2005:3	245,270,013	571,827,000	17,240,786	7,02	13,15	42,87	2,189	1,247,997,666	61,746,088,50	1,78	740,00	8,836,81	1,246,89	3,562,369	711,843
DKI	2005:4	250,359,183	566,432,000	17,292,191	6,91	12,20	42,69	2,227	1,238,799,470	61,710,912,93	9,05	740,00	8,860,00	1,246,89	3,565,331	711,843
DKI	2006:1	245,876,240	570,165,000	19,263,849	7,84	14,23	43,09	2,250	1,292,098,906	62,992,067,01	2,30	740,00	8,890,71	1,246,89	3,557,978	819,100
DKI	2006:2	253,602,808	577,762,000	21,086,823	8,31	16,14	43,89	2,320	1,315,198,961	63,635,053,72	0,33	740,00	8,923,38	1,246,89	3,543,247	819,100
DKI	2006:3	266,534,955	591,381,000	20,385,502	7,65	15,03	45,07	2,387	1,354,998,218	65,879,753,47	1,21	740,00	8,951,52	1,246,89	3,551,176	819,100
DKI	2006:4	287,816,353	620,919,000	15,929,394	5,53	13,55	46,35	2,401	1,454,298,836	66,036,021,14	2,07	740,00	8,961,00	1,246,89	3,531,804	819,100
DKI	2007:1	289,270,151	619,880,000	15,145,785	5,23	13,26	46,73	2,446	1,480,893,560	65,737,045,66	1,95	740,00	8,948,37	1,246,89	3,556,419	816,100
DKI	2007:2	302,920,000	660,506,000	15,063,829	4,97	14,14	45,98	2,476	1,515,457,840	67,026,994,24	0,31	740,00	8,914,35	1,246,89	3,598,086	816,100
DKI	2007:3	321,189,000	682,107,000	13,837,048	4,31	12,27	47,08	2,503	1,559,326,376	69,177,167,26	1,85	740,00	8,867,41	1,246,89	3,651,123	816,100
DKI	2007:4	371,075,000	751,466,000	15,897,257	4,28	12,11	49,38	2,509	1,705,225,889	71,168,031,74	1,61	740,00	8,814,00	1,246,89	3,709,843	816,100
JABAR	2001:1	41,938,809	70,943,000	6,824,592	16,27	16,19	59,12	1,491	101,512,011	32,018,269,34	1,66	34,597,00	35,326,59	3,056,63	16,524,928	245,000
JABAR	2001:2	45,890,297	69,354,000	6,477,170	14,11	15,05	66,17	1,484	102,197,783	32,700,844,92	3,05	34,597,00	35,433,68	3,056,63	15,524,927	245,000
JABAR	2001:3	43,633,039	70,161,000	5,238,167	12,01	16,59	62,19	1,485	102,678,733	33,279,401,09	1,94	34,597,00	35,823,43	3,056,63	14,918,377	245,000
JABAR	2001:4	45,913,346	75,131,000	4,356,459	9,49	14,10	60,63	1,555	110,267,187	33,731,013,05	4,79	34,597,00	36,275,00	3,056,63	14,499,470	245,000
JABAR	2002:1	44,615,298	68,867,000	6,927,459	15,53	15,23	64,78	1,555	111,519,986	33,631,403,27	3,87	34,597,00	36,464,74	3,027,80	14,294,822	280,779
JABAR	2002:2	46,314,317	67,808,000	5,580,282	12,05	18,07	68,30	1,646	107,565,751	34,195,267,02	0,98	34,597,00	36,549,17	3,027,80	14,263,598	280,779
JABAR	2002:3	48,352,016	73,433,000	4,721,472	9,76	15,94	65,85	1,556	116,306,422	35,297,859,61	2,91	34,597,00	36,582,01	3,027,80	14,329,906	280,779
JABAR	2002:4	49,514,302	74,729,000	3,549,297	7,16	14,84	66,25	1,608	117,024,213	34,869,930,33	3,73	34,597,00	36,617,00	3,027,80	14,417,735	280,779
JABAR	2003:1	52,272,352	83,166,000	3,759,425	7,13	18,18	63,40	1,720	113,841,660	35,077,390,19	0,29	34,597,00	36,717,80	3,027,80	14,421,547	320,000
JABAR	2003:2	52,097,157	81,294,000	4,027,543	7,73	16,56	64,08	1,720	115,137,109	35,486,722,57	1,40	34,597,00	36,847,13	3,027,80	14,394,882	320,000
JABAR	2003:3	52,391,769	83,525,000	3,631,768	6,93	15,55	62,73	1,720	85,669,225	36,653,396,69	1,46	34,597,00	36,977,64	3,027,80	14,361,630	320,000
JABAR	2003:4	58,273,759	87,178,000	3,283,667	5,63	13,76	66,84	1,720	90,249,195	36,541,420,44	2,43	34,597,00	37,082,00	3,027,80	14,345,796	320,000
JABAR	2004:1	60,771,577	85,583,000	3,341,220	5,50	13,14	71,01	1,718	82,931,956	35,988,566,25	2,58	36,925,00	37,152,06	3,281,92	14,377,754	366,500
JABAR	2004:2	65,397,024	74,740,000	3,219,100	4,92	13,27	87,50	1,672	87,110,272	36,850,464,57	1,91	36,925,00	37,235,00	3,281,92	14,440,780	366,500
JABAR	2004:3	68,216,812	74,242,000	3,321,090	4,83	15,77	92,56	1,681	87,401,456	37,741,494,97	(0,87)	36,925,00	37,347,19	3,281,92	14,440,780	366,500
JABAR	2004:4	74,232,162	76,805,000	3,074,303	4,14	12,64	96,65	1,704	92,059,870	38,523,681,83	1,90	36,925,00	37,545,00	3,281,92	14,618,934	366,500
JABAR	2005:1	77,858,217	74,838,000	3,530,180	4,53	11,27	104,05	1,696	91,135,628	38,953,273,53	3,12	36,925,00	37,847,05	3,281,92	14,709,225	408,260
JABAR	2005:2	83,301,197	79,083,000	3,264,168	6,34	13,06	105,33	1,698	95,733,745	39,534,648,48	1,25	36,925,00	38,219,08	3,281,92	14,802,411	408,260
JABAR	2005:3	90,771,274	82,891,000	6,641,201	7,32	13,38	109,51	1,705	99,772,656	40,212,557,72	1,73	36,925,00	38,625,05	3,281,92	14,902,411	408,260
JABAR	2005:4	91,281,943	87,899,000	6,262,807	6,86	3,77	103,85	1,705	103,410,286	40,413,535,08	12,56	36,925,00	38,965,00	3,281,92	15,011,249	408,260
JABAR	2006:1	90,650,991	88,787,000	6,056,355	6,68	15,15	102,11	1,705	105,997,402	41,157,254,99	1,53	36,925,00	39,260,55	3,281,92	15,124,352	447,654
JABAR	2006:2	94,275,484	93,041,000	6,172,910	6,55	16,13	101,33	1,885	109,499,818	42,059,453,03	0,57	36,925,00	39,379,55	3,281,92	15,240,102	447,654
JABAR	2006:3	97,711,459	97,254,000	6,403,241	6,40	15,25	100,47	1,960	112,135,154	43,666,955,69	1,26	36,925,00	39,516,72	3,281,92	15,349,021	447,654
JABAR	2006:4	100,800,680	104,431,000	5,550,913	5,51	14,09	96,52	1,973	118,188,331	43,781,175,60	1,87	36,925,00	39,649,00	3,281,92	15,441,632	447,654
JABAR	2007:1	103,136,875	103,102,000	5,746,053	5,63	14,40	99,06	1,974	118,918,928	44,774,762,96	1,13	36,925,00	39,824,00	3,281,92	15,508,418	447,654
JABAR	2007:2	109,829,754	107,248,000	5,861,794	5,34	15,33	102,41	1,974	122,646,632	45,456,810,36	(0,26)	36,925,00	40,020,02	3,281,92	15,555,865	447,654
JABAR	2007:3	115,863,143	107,880,000	5,891,935	5,09	12,07	107,40	1,976	124,990,641	47,091,785,70	2,48	36,925,00	40,229,36	3,281,92	15,590,419	447,654
JABAR	2007:4	122,895,639	119,504,000	4,441,658	4,43	12,39	102,84	1,976	136,391,954	47,130,257,47	1,82	36,925,00	40,445,50	3,281,92	15,618,52	

LAMPIRAN 2. DATA YANG DIGUNAKAN PADA TESIS

Propinsi	Periode	CR	DPK	NPL	RNPL	SB	LDR	KB	Akt	PDRSB	Inf	LW	GOP	PJ	TK	UMR
JATENG	2002:1	20,738,851	38,937,000	982,091	4,74	16,94	53,26	1,562	46,794,465	23,184,828,90	2,33	32,549,00	31,711,54	3,940,62	15,068,407	314,500
JATENG	2002:2	22,246,712	38,842,000	1,322,506	5,94	15,62	57,77	1,562	46,697,087	23,707,853,69	3,52	32,549,00	31,810,56	3,940,62	15,088,105	314,500
JATENG	2002:3	24,007,176	38,624,000	1,469,354	6,11	16,50	62,31	1,566	48,282,433	24,516,522,60	2,39	32,549,00	31,895,05	3,940,62	15,120,176	314,500
JATENG	2002:4	25,477,066	39,894,000	1,080,767	4,25	13,46	63,74	1,566	50,009,456	22,776,342,02	5,09	32,549,00	31,942,00	3,940,62	15,154,856	314,500
JATENG	2003:1	25,857,482	40,712,000	1,230,528	4,76	14,70	63,51	1,567	50,605,259	27,051,523,26	4,23	32,849,00	32,009,97	3,940,62	15,181,413	340,400
JATENG	2003:2	26,402,659	40,186,000	1,081,315	4,10	16,72	65,70	1,567	49,950,222	27,574,083,92	1,15	32,549,00	32,083,03	3,940,62	15,206,579	340,400
JATENG	2003:3	28,986,385	40,516,000	1,148,427	3,96	13,72	71,54	1,567	50,688,666	28,509,476,74	3,07	32,549,00	32,176,83	3,940,62	15,236,119	340,400
JATENG	2003:4	31,010,909	41,093,000	1,045,849	2,07	11,43	75,47	1,567	50,090,935	26,957,887,05	4,50	32,549,00	32,307,00	3,940,62	15,275,796	340,400
JATENG	2004:1	32,305,464	43,219,000	1,049,647	3,24	14,43	74,75	1,567	51,693,387	28,945,194,11	1,02	32,800,00	32,447,19	3,847,84	15,329,448	365,000
JATENG	2004:2	31,316,388	44,641,000	1,260,625	3,67	14,58	76,98	1,568	52,790,927	28,971,992,91	0,38	32,800,00	32,588,91	3,847,84	15,393,231	365,000
JATENG	2004:3	36,013,131	45,045,000	1,141,211	3,17	12,36	79,95	1,569	55,250,708	29,769,774,20	2,28	32,800,00	32,681,67	3,847,84	15,461,375	365,000
JATENG	2004:4	38,451,517	46,731,000	693,872	1,80	12,03	82,28	1,570	58,075,081	28,983,447,29	2,27	32,800,00	32,675,00	3,847,84	15,528,110	365,000
JATENG	2005:1	39,816,166	46,129,000	900,630	2,27	13,17	86,29	1,572	58,608,778	29,798,687,89	1,02	32,799,10	32,584,29	3,847,84	15,571,772	390,000
JATENG	2005:2	42,516,409	48,584,000	2,041,010	4,81	11,37	87,55	1,576	60,499,954	30,521,670,74	2,87	32,799,10	32,352,20	3,847,84	15,597,148	390,000
JATENG	2005:3	45,615,869	50,801,000	2,521,210	5,72	15,22	89,45	1,572	67,693,079	31,356,743,83	(0,20)	32,799,10	32,179,00	3,847,84	15,593,129	390,000
JATENG	2005:4	48,046,218	52,950,000	2,649,530	5,21	13,20	90,83	1,613	67,204,251	29,902,845,88	2,44	32,799,10	32,197,00	3,847,84	15,548,609	390,000
JATENG	2006:1	47,711,264	54,491,000	2,806,476	6,05	13,40	87,59	1,672	68,929,021	31,240,346,44	3,25	32,799,10	31,947,77	3,777,13	15,473,299	450,000
JATENG	2006:2	50,091,357	56,998,000	2,949,980	5,89	15,66	87,88	1,703	71,719,799	31,762,769,23	0,93	32,799,10	31,999,47	3,777,13	15,373,703	450,000
JATENG	2006:3	51,014,648	58,275,000	3,254,717	6,37	13,73	87,68	1,721	73,123,912	33,147,387,75	2,69	32,799,10	32,090,61	3,777,13	15,277,140	450,000
JATENG	2006:4	53,379,790	62,701,000	3,045,995	5,71	6,98	85,13	1,777	77,652,105	31,572,074,58	8,83	32,799,10	32,179,00	3,777,13	15,210,934	450,000
JATENG	2007:1	51,180,752	63,519,000	2,960,842	5,46	13,36	85,30	1,660	78,641,251	32,605,451,11	2,03	32,799,10	32,203,59	3,777,13	15,206,916	500,000
JATENG	2007:2	57,584,724	65,277,000	3,083,769	5,36	14,01	88,22	1,669	80,442,898	33,535,966,68	0,87	32,799,10	32,194,33	3,777,13	15,246,155	500,000
JATENG	2007:3	61,423,538	67,679,000	2,613,184	4,25	12,88	90,77	1,677	86,227,833	35,119,713,40	1,48	32,799,10	32,162,51	3,777,13	15,314,232	500,000
JATENG	2007:4	64,557,639	70,139,000	1,806,472	2,80	12,47	92,04	1,723	86,420,558	33,213,734,80	1,57	32,799,10	32,119,40	3,777,13	15,396,729	500,000
JATIM	2001:1	27,985,469	70,778,000	6,542,927	23,40	15,50	39,54	1,502	81,047,600	41,808,659,13	2,37	47,992,00	34,711,39	1,439,18	16,890,001	220,000
JATIM	2001:2	30,208,639	74,213,000	6,212,855	20,57	17,77	40,71	1,508	82,517,908	42,398,067,11	0,52	47,992,00	34,819,97	1,439,18	16,879,835	220,000
JATIM	2001:3	31,270,024	74,193,000	4,902,700	15,70	16,81	42,08	1,508	81,037,912	43,706,027,11	1,98	47,992,00	34,892,32	1,439,18	16,878,848	220,000
JATIM	2001:4	34,297,064	79,911,000	4,421,013	12,89	17,31	47,92	1,508	90,181,184	41,432,901,24	1,72	47,992,00	34,970,00	1,439,18	16,891,628	220,000
JATIM	2002:1	31,771,660	83,984,000	4,456,933	14,20	16,47	37,38	1,762	90,125,550	43,100,915,79	2,75	47,992,00	35,022,11	1,439,18	17,011,512	245,000
JATIM	2002:2	31,771,660	78,582,000	4,352,016	13,70	16,59	40,44	1,781	91,255,711	44,165,695,47	2,53	47,992,00	35,076,64	1,439,18	16,950,874	245,000
JATIM	2002:3	36,099,504	79,263,000	4,552,580	12,61	15,45	45,54	1,807	92,314,355	45,649,622,23	3,43	47,992,00	35,124,10	1,439,18	16,985,522	245,000
JATIM	2002:4	38,783,711	81,706,000	4,110,270	10,60	13,80	47,47	1,842	93,483,553	43,152,914,15	4,74	47,992,00	35,175,28	1,439,18	17,175,178	310,000
JATIM	2003:1	38,315,263	81,055,000	4,263,905	11,13	16,35	47,27	1,873	94,797,127	45,428,338,36	2,09	47,992,00	35,231,18	1,439,18	17,028,986	281,750
JATIM	2003:2	40,394,958	82,969,000	3,762,871	9,32	16,38	48,69	1,943	96,056,165	46,372,917,98	1,50	47,992,00	35,289,07	1,439,18	17,056,322	281,750
JATIM	2003:3	43,323,396	82,306,000	3,803,592	8,78	15,71	52,64	1,964	94,673,668	41,553,682,90	1,08	47,992,00	35,341,42	1,439,18	17,036,403	281,750
JATIM	2003:4	46,808,902	87,518,000	3,565,889	7,60	12,34	53,60	1,983	101,423,662	25,829,610,61	3,55	47,992,00	35,381,00	1,439,18	17,056,322	281,750
JATIM	2004:1	45,838,250	88,957,000	3,420,031	7,46	15,27	51,53	1,989	100,462,649	28,420,848,53	0,17	47,992,00	35,448,45	1,439,18	17,105,020	310,000
JATIM	2004:2	49,801,102	91,995,000	3,510,412	7,05	14,30	54,13	1,904	104,535,727	29,075,166,24	0,60	46,690,00	35,448,45	1,439,18	17,175,178	310,000
JATIM	2004:3	54,792,159	92,879,000	3,108,484	5,67	13,96	58,99	1,910	108,116,014	30,177,742,27	0,61	46,690,00	35,499,39	1,439,18	17,265,567	310,000
JATIM	2004:4	59,225,420	95,325,000	2,566,614	4,32	12,37	62,13	1,938	112,855,630	28,125,319,85	1,82	46,690,00	35,587,00	1,439,18	17,374,955	310,000
JATIM	2005:1	61,796,089	94,676,000	2,743,911	4,44	13,26	65,27	2,061	110,049,983	30,167,558,96	0,80	46,690,00	35,724,99	1,439,18	17,477,998	340,000
JATIM	2005:2	65,015,541	101,425,000	3,928,317	6,04	12,24	64,10	2,096	117,653,964	31,217,216,52	1,80	46,689,64	35,900,71	1,439,18	17,575,627	340,000
JATIM	2005:3	72,689,056	108,166,000	4,294,417	5,91	14,54	67,20	2,167	126,065,867	32,317,679,23	0,37	46,689,64	36,096,32	1,439,18	17,668,317	340,000
JATIM	2005:4	74,830,317	111,909,000	4,274,553	5,68	13,40	66,87	2,169	132,500,472	29,975,406,90	2,90	46,689,64	36,294,00	1,439,18	17,668,317	340,000
JATIM	2006:1	72,552,806	115,391,000	4,758,437	6,56	13,94	62,98	2,152	132,898,592	32,459,827,41	2,63	46,689,64	36,441,99	1,518,60	17,636,491	390,000
JATIM	2006:2	74,753,061	119,666,000	5,609,904	7,50	15,64	62,47	2,160	137,153,331	33,180,756,66	0,88	46,689,64	36,554,28	1,518,60	17,565,595	390,000
JATIM	2006:3	79,585,367	121,657,000	5,757,763	7,23	14,35	65,42	2,169	142,575,305	34,863,522,54	1,92	46,689,64	36,610,93	1,518,60	17,488,009	390,000
JATIM	2006:4	82,925,099	127,851,000	5,625,032	6,78	7,50	64,86	2,289	147,542,664	32,998,333,08	8,15	46,689,64	36,592,00	1,518,60	17,436,613	390,000
JATIM	2007:1	83,065,355	128,612,000	5,378,994	6,48	13,03	64,59	2,293	146,667,121	34,374,370,02	2,15	46,689,64	36,488,37	1,518,60	17,452,001	448,500
JATIM	2007:2	88,716,639	133,460,000	5,384,612	6,07	13,62	66,42	2,295	153,836,677	35,622,493,19	0,99	46,689,64	36,311,11	1,518,60	17,511,428	448,500
JATIM	2007:3	97,741,285	137,281,000	6,019,762	6,16	13,25	71,20	2,333	159,989,412	37,870,553,75	0,81	46,689,64	36,090,09	1,518,60	17,600,216	448,500
JATIM	2007:4	103,990,538	143,778,000	6,318,416	6,08	11,13	72,33	2,370	167,474,291	34,885,508,03	2,61	46,689,64	35,843,20	1,518,60	17,703,684	448,500

LAMPIRAN 2. DATA YANG DIGUNAKAN PADA TESIS

POSISI KREDIT PER SEKTOR EKONOMI DKI JAKARTA (TRILIUN RUPIAH)

	Tani	Tambang	Industri	Listrik	Bangunan	Dagang	Angkutan	Keuangan	Jasa
2001	2.192	344	15.638	14.588	6.035	2.290	4.500	12.880	1.230
2002	3.243	678	20.131	22.044	5.344	2.659	6.469	17.257	1.522
2003	3.295	781	17.496	25.685	5.429	3.505	8.461	25.018	2.749
2004	3.749	430	20.741	34.100	5.007	5.856	9.029	28.965	2.641
2005	3.006	603	30.043	35.583	4.523	8.898	10.772	36.910	3.609
2006	4.903	695	30.175	41.820	3.977	10.857	13.161	39.467	5.110
2007	6.278	1.039	30.752	46.529	776	13.945	18.474	50.777	5.851

POSISI KREDIT PER SEKTOR EKONOMI JAWA BARAT (TRILIUN RUPIAH)

	Tani	Tambang	Industri	Listrik	Bangunan	Dagang	Angkutan	Keuangan	Jasa
2001	2.867	62	10.760	4.736	3.239	883	2.037	1.077	458
2002	2.995	77	14.270	6.677	2.641	1.024	2.229	2.131	549
2003	2.645	62	10.620	8.233	2.111	1.703	1.666	2.635	700
2004	3.317	67	11.335	10.526	1.976	2.634	1.586	3.119	1.009
2005	3.017	85	14.897	13.424	312	2.737	1.550	4.294	1.257
2006	1.693	187	17.216	15.567	71	2.781	1.165	4.667	1.431
2007	1.870	123	19.862	19.842	132	3.120	1.170	6.577	1.819

POSISI KREDIT PER SEKTOR EKONOMI JAWA TENGAH (TRILIUN RUPIAH)

	Tani	Tambang	Industri	Listrik	Bangunan	Dagang	Angkutan	Keuangan	Jasa
2001	1.873	24	7.971	4.632	80	187	152	538	254
2002	2.437	94	8.882	6.493	82	339	427	881	306
2003	2.521	25	8.612	9.161	65	432	366	1.418	461
2004	3.399	26	9.131	11.412	65	521	448	1.853	437
2005	3.093	34	10.694	14.778	46	679	486	2.643	788
2006	3.389	43	11.584	17.316	41	866	560	2.732	717
2007	2.720	70	12.526	20.796	13	1.023	748	2.967	678

POSISI KREDIT PER SEKTOR EKONOMI JAWA TIMUR (TRILIUN RUPIAH)

	Tani	Tambang	Industri	Listrik	Bangunan	Dagang	Angkutan	Keuangan	Jasa
2001	2.763	153	10.351	5.388	140	577	399	753	402
2002	2.967	113	11.614	7.059	145	814	786	1.087	750
2003	3.229	50	13.123	9.069	453	945	1.045	3.174	899
2004	4.348	75	16.082	12.448	231	1.667	1.290	3.071	1.108
2005	4.517	101	18.693	18.106	154	2.413	1.343	3.487	1.264
2006	5.100	115	19.030	21.601	125	2.457	1.541	4.240	1.440
2007	4.610	156	23.105	26.998	188	3.986	1.875	6.101	1.241

3.3. Hasil Estimasi Fixed Effect (Penghilangan asumsi heteroskedastis) pada persamaan 4.4.

Dependent Variable: LOG(CR?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 07/18/08 Time: 12:07
 Sample: 2001:1 2007:4
 Included observations: 28
 Number of cross-sections used: 4
 Total panel (balanced) observations: 112

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(DPK?)	1.264523	0.066619	18.98150	0.0000
LOG(KB?)	0.260807	0.101646	2.565845	0.0117
(SB?)	-0.060088	0.006228	-9.648713	0.0000
(RNPL?)	-0.005386	0.002313	-2.328768	0.0218
INF?	-0.048404	0.006621	-7.310427	0.0000
LOG(PDRBSU?)	0.219158	0.047321	4.631315	0.0000
Fixed Effects				
_DKI-C	-11.21736			
_JABAR-C	-9.781530			
_JATENG-C	-9.660889			
_JATIM-C	-10.24411			
R-squared	0.988486	Mean dependent var	18.06126	
Adjusted R-squared	0.987470	S.D. dependent var	0.733806	
S.E. of regression	0.082139	Sum squared resid	0.688177	
Log likelihood	126.2425	F-statistic	973.0025	
Durbin-Watson stat	0.696632	Prob(F-statistic)	0.000000	

3.4. Hasil Estimasi Pooled Least Square (Common) pada persamaan 4.5.

Dependent Variable: LOG(PDRBSU?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 06/23/08 Time: 22:56
 Sample: 2001:1 2007:4
 Included observations: 28
 Number of cross-sections used: 4
 Total panel (balanced) observations: 112

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	26.63820	8.603800	3.096096	0.0025
LOG(CR?)	0.148359	0.097486	1.521851	0.1311
LOG(PJ?)	-0.184334	0.083599	-2.204973	0.0297
LOG(TK?)	-0.998628	0.530836	-1.881236	0.0627
INF?	-0.003588	0.006343	-0.565713	0.5728
LOG(UMR?)	0.021249	0.124260	0.171007	0.8646
LOG(LW?)	0.203114	0.367032	0.553395	0.5812
LOG(GOP?)	0.348541	0.568076	0.613546	0.5409
R-squared	0.831046	Mean dependent var	17.45573	
Adjusted R-squared	0.819675	S.D. dependent var	0.289022	
S.E. of regression	0.122732	Sum squared resid	1.566577	
Log likelihood	80.17682	F-statistic	73.07914	
Durbin-Watson stat	0.235134	Prob(F-statistic)	0.000000	

LAMPIRAN 3. HASIL ESTIMASI

3.1. Hasil Estimasi Pooled Least Square (Common) pada persamaan 4.4.

Dependent Variable: LOG(CR?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 07/18/08 Time: 12:03
 Sample: 2001:1 2007:4
 Included observations: 28
 Number of cross-sections used: 4
 Total panel (balanced) observations: 112

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.879397	1.770393	-2.191263	0.0306
LOG(DPK?)	0.490807	0.044305	11.07780	0.0000
LOG(KB?)	0.291276	0.128094	2.273914	0.0250
(SB?)	-0.078871	0.012955	-6.088254	0.0000
(RNPL?)	-0.020744	0.005497	-3.773667	0.0003
INF?	-0.061366	0.014973	-4.098553	0.0001
LOG(PDRBSU?)	0.689870	0.126093	5.471121	0.0000
R-squared	0.948295	Mean dependent var	18.06126	
Adjusted R-squared	0.945340	S.D. dependent var	0.733806	
S.E. of regression	0.171559	Sum squared resid	3.090422	
Log likelihood	42.12959	F-statistic	320.9589	
Durbin-Watson stat	0.196569	Prob(F-statistic)	0.000000	

3.2. Hasil Estimasi Fixed Effect pada persamaan 4.4.

Dependent Variable: LOG(CR?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 07/18/08 Time: 12:04
 Sample: 2001:1 2007:4
 Included observations: 28
 Number of cross-sections used: 4
 Total panel (balanced) observations: 112

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(DPK?)	1.264523	0.073160	17.28424	0.0000
LOG(KB?)	0.260807	0.084174	3.098421	0.0025
(SB?)	-0.060088	0.006942	-8.656100	0.0000
(RNPL?)	-0.005386	0.003236	-1.664045	0.0992
INF?	-0.048404	0.007690	-6.294341	0.0000
LOG(PDRBSU?)	0.219158	0.066084	3.316355	0.0013
Fixed Effects				
_DKI--C	-11.21736			
_JABAR--C	-9.781530			
_JATENG--C	-9.660889			
_JATIM--C	-10.24411			
R-squared	0.988486	Mean dependent var	18.06126	
Adjusted R-squared	0.987470	S.D. dependent var	0.733806	
S.E. of regression	0.082139	Sum squared resid	0.688177	
Log likelihood	126.2425	F-statistic	973.0025	
Durbin-Watson stat	0.696632	Prob(F-statistic)	0.000000	

3.5. Hasil Estimasi Fixed Effect pada persamaan 4.5.

Dependent Variable: LOG(PDRBSU?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 06/23/08 Time: 23:06
 Sample: 2001:1 2007:4
 Included observations: 28
 Number of cross-sections used: 4
 Total panel (balanced) observations: 112

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(CR?)	0.199726	0.106347	1.878055	0.0633
LOG(PJ?)	0.203455	0.222228	0.915526	0.3621
LOG(TK?)	-0.793210	0.639220	-1.240903	0.2175
INF?	-0.006255	0.005789	-1.080463	0.2825
LOG(UMR?)	-0.246169	0.174481	-1.410868	0.1614
LOG(LW?)	2.503300	0.623463	4.015154	0.0001
LOG(GOP?)	0.814403	0.855289	0.952197	0.3433
Fixed Effects				
_DKI-C	4.021797			
_JABAR-C	-6.417644			
_JATENG-C	-6.158344			
_JATIM-C	-6.786236			
R-squared	0.867156	Mean dependent var	17.45573	
Adjusted R-squared	0.854004	S.D. dependent var	0.289022	
S.E. of regression	0.110434	Sum squared resid	1.231757	
Log likelihood	93.64207	F-statistic	65.92925	
Durbin-Watson stat	0.381388	Prob(F-statistic)	0.000000	

Hasil Estimasi Fixed Effect (Penghilangan asumsi heteroskedastis) pada persamaan 4.5.

Dependent Variable: LOG(PDRBSU?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 06/23/08 Time: 23:10
 Sample: 2001:1 2007:4
 Included observations: 28
 Number of cross-sections used: 4
 Total panel (balanced) observations: 112

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(CR?)	0.199726	0.094191	2.120438	0.0364
LOG(PJ?)	0.203455	0.152773	1.331747	0.1859
LOG(TK?)	-0.793210	0.403467	-1.965984	0.0520
INF?	-0.006255	0.004197	-1.490380	0.1392
LOG(UMR?)	-0.246169	0.148644	-1.656103	0.1008
LOG(LW?)	2.503300	0.624204	4.010385	0.0001
LOG(GOP?)	0.814403	0.724275	1.124440	0.2635
Fixed Effects				
_DKI-C	4.021797			
_JABAR-C	-6.417644			
_JATENG-C	-6.158344			
_JATIM-C	-6.786236			
R-squared	0.867156	Mean dependent var	17.45573	
Adjusted R-squared	0.854004	S.D. dependent var	0.289022	
S.E. of regression	0.110434	Sum squared resid	1.231757	
Log likelihood	93.64207	F-statistic	65.92925	
Durbin-Watson stat	0.381388	Prob(F-statistic)	0.000000	

LAMPIRAN 4. PERHITUNGAN SUKU BUNGA KREDIT TERTIMBANG

Propinsi	Periode	Kredit			TOTAL	SB			INF	SB rata-rata tertimbang	
		KMK	KI	KK		KMK	KI	KK			
DKI	2001:1	86,087.112	38,379.688	12,482.504	136,949.304	17.90	16.86	18.99	2.20	2,123,795,126.64	15.51
DKI	2001:2	81,258.361	49,309.680	13,528.449	144,096.490	18.45	17.04	19.22	3.11	2,151,330,413.53	14.93
DKI	2001:3	75,339.979	49,954.535	14,654.385	139,948.899	19.06	17.22	19.41	2.42	2,241,962,369.71	16.02
DKI	2001:4	75,437.909	42,219.754	16,950.797	134,608.460	19.19	17.90	19.85	3.32	2,092,960,303.56	15.55
DKI	2002:1	73,519.908	42,917.821	17,666.981	134,104.710	19.35	18.03	20.11	4.10	2,001,872,209.34	14.93
DKI	2002:2	71,574.747	40,555.546	19,692.521	131,822.814	19.08	18.11	20.28	0.81	2,392,694,957.36	18.15
DKI	2002:3	78,421.440	42,745.253	21,104.175	142,270.868	18.74	18.11	20.10	1.29	2,484,398,815.21	17.46
DKI	2002:4	85,794.494	45,396.225	23,728.319	154,919.038	18.25	17.82	20.21	2.62	2,448,371,692.43	15.80
DKI	2003:1	85,286.438	46,677.992	23,811.987	155,776.417	18.08	17.85	20.12	1.19	2,668,904,198.45	17.13
DKI	2003:2	88,678.189	45,059.565	25,791.267	159,529.021	17.41	17.43	19.73	0.82	2,707,323,389.13	16.97
DKI	2003:3	90,039.443	45,744.515	29,433.219	165,217.177	16.07	16.53	19.33	1.50	2,524,209,039.73	15.28
DKI	2003:4	93,179.759	45,563.831	37,487.603	176,231.193	15.07	15.68	18.69	2.14	2,442,168,385.26	13.86
DKI	2004:1	91,475.252	46,835.689	38,601.805	176,912.746	14.61	15.12	18.11	0.63	2,632,232,707.97	14.88
DKI	2004:2	104,654.262	50,489.187	36,702.839	191,846.288	14.10	14.64	17.51	2.79	2,322,202,359.25	12.10
DKI	2004:3	106,170.301	50,857.927	40,836.585	197,864.819	13.80	14.33	17.03	0.43	2,804,309,420.67	14.17
DKI	2004:4	114,696.902	52,704.560	44,681.357	212,082.819	13.41	14.05	16.57	1.92	2,611,755,596.83	12.31
DKI	2005:1	116,377.076	53,757.807	48,603.506	218,738.389	13.31	13.78	16.33	3.00	2,427,241,548.00	11.10
DKI	2005:2	127,219.973	55,530.081	54,645.717	237,395.771	13.36	13.65	16.04	1.54	2,968,572,258.27	12.50
DKI	2005:3	135,275.601	59,752.778	59,947.571	254,975.950	14.51	14.47	16.27	1.76	3,354,060,976.34	13.15
DKI	2005:4	138,169.457	58,827.355	63,614.297	260,611.109	16.23	15.66	16.83	9.05	1,875,824,748.47	7.20
DKI	2006:1	137,171.824	58,512.368	60,888.267	256,572.459	16.35	15.90	17.52	2.30	3,649,751,755.74	14.23
DKI	2006:2	152,727.851	58,789.620	59,353.516	270,870.987	16.15	15.94	17.82	0.33	4,371,953,565.86	16.14
DKI	2006:3	156,098.936	61,968.255	61,554.282	279,221.473	15.82	15.66	17.88	1.21	4,195,488,620.65	15.03
DKI	2006:4	170,587.349	63,320.078	64,891.735	298,799.162	15.07	15.10	17.58	2.07	4,049,166,963.19	13.55
DKI	2007:1	158,068.860	54,603.481	70,071.585	282,743.926	14.49	14.53	17.38	1.95	3,750,299,851.93	13.26
DKI	2007:2	166,712.050	59,707.858	74,555.810	300,975.718	13.88	13.99	16.91	0.51	4,256,517,318.34	14.14
DKI	2007:3	172,016.631	64,193.806	77,830.080	314,040.517	13.31	13.45	16.47	1.85	3,853,834,510.46	12.27
DKI	2007:4	206,811.341	71,504.831	83,246.502	361,562.674	13.00	13.01	16.13	1.61	4,379,475,456.43	12.11
JABAR	2001:1	33,301.314	12,844.598	9,463.846	55,609.758	17.90	16.86	18.99	1.66	900,059,680.14	16.19
JABAR	2001:2	40,321.745	24,831.319	10,597.697	75,750.761	18.45	17.04	19.22	3.05	1,139,709,786.30	15.05
JABAR	2001:3	36,254.858	22,639.350	11,816.471	70,710.679	19.06	17.22	19.41	1.94	1,173,046,185.33	16.59
JABAR	2001:4	38,662.012	23,902.011	12,778.555	75,342.578	19.19	17.90	19.85	4.79	1,062,533,375.31	14.10
JABAR	2002:1	36,390.409	21,470.400	13,480.718	71,341.527	19.35	18.03	20.11	3.87	1,086,271,255.64	15.23
JABAR	2002:2	37,372.410	21,177.804	15,072.649	73,622.863	19.08	18.11	20.28	0.98	1,330,118,529.22	18.07
JABAR	2002:3	39,543.010	21,448.935	15,952.454	76,944.399	18.74	18.11	20.10	2.91	1,226,212,344.56	15.94
JABAR	2002:4	40,768.248	21,070.018	17,434.721	79,272.987	18.25	17.82	20.21	3.73	1,176,155,716.66	14.84
JABAR	2003:1	42,277.529	21,565.249	18,279.447	82,122.225	18.08	17.85	20.12	0.29	1,493,284,447.36	18.18
JABAR	2003:2	42,941.137	22,301.027	19,907.267	85,149.431	17.41	17.43	19.73	1.4	1,409,873,270.29	16.56
JABAR	2003:3	33,141.508	16,948.074	16,824.972	66,914.554	16.07	16.53	19.33	1.46	1,040,267,156.70	15.55
JABAR	2003:4	33,354.098	16,974.859	18,384.304	68,713.261	15.07	15.68	18.69	2.43	945,441,463.51	13.76
JABAR	2004:1	33,977.478	17,157.895	19,997.389	71,132.762	14.61	15.12	18.11	2.58	934,468,514.81	13.14
JABAR	2004:2	36,750.016	18,087.751	21,136.685	75,974.452	14.10	14.64	17.51	1.91	1,007,972,051.27	13.27
JABAR	2004:3	36,241.360	19,104.889	23,663.135	79,009.384	13.80	14.33	17.03	-0.87	1,245,625,180.50	15.77
JABAR	2004:4	39,148.352	18,226.978	26,029.313	83,404.643	13.41	14.05	16.57	1.9	1,053,905,335.93	12.64
JABAR	2005:1	40,315.419	17,830.656	28,171.282	86,317.357	13.31	13.78	16.33	3.12	973,031,547.79	11.27

LAMPIRAN 4. PERHITUNGAN SUKU BUNGA KREDIT TERTIMBANG

Propinsi	Periode	KMK			Kredit			TOTAL	SB			INF	SB rata-rata tertimbang
		KMK	KI	KK	KI	KK	KMK		KI	KK			
JABAR	2005:2	42,458,238	18,797,861	30,510,611	18,797,861	30,510,611	91,766,710	13.36	13.65	16.04	1.25	1,198,514,675.27	13.06
JABAR	2005:3	45,810,502	18,563,515	33,913,943	18,563,515	33,913,943	98,287,960	14.51	14.47	16.27	1.73	1,315,066,127.88	13.38
JABAR	2005:4	45,565,930	18,291,749	34,463,824	18,291,749	34,463,824	98,321,503	16.23	15.66	16.83	12.56	371,091,913.48	3.77
JABAR	2006:1	45,047,807	17,917,447	34,524,527	17,917,447	34,524,527	97,489,781	16.35	15.90	17.52	1.53	1,477,129,399.86	15.15
JABAR	2006:2	47,254,003	18,311,095	35,590,898	18,311,095	35,590,898	101,155,996	16.15	15.94	17.82	0.57	1,631,601,887.39	16.13
JABAR	2006:3	49,789,673	19,455,665	37,199,663	19,455,665	37,199,663	106,445,001	15.82	15.66	17.88	1.26	1,623,357,613.94	15.25
JABAR	2006:4	50,556,962	20,071,175	38,678,537	20,071,175	38,678,537	109,306,674	15.07	15.10	17.58	1.87	1,540,533,359.92	14.09
JABAR	2007:1	50,976,267	20,126,756	39,552,882	20,126,756	39,552,882	110,655,905	14.49	14.53	17.38	1.13	1,593,475,790.02	14.40
JABAR	2007:2	50,190,000	17,060,000	42,200,000	17,060,000	42,200,000	109,450,000	13.88	13.99	16.91	-0.26	1,677,365,600.00	15.33
JABAR	2007:3	51,980,000	18,120,000	43,730,000	18,120,000	43,730,000	113,830,000	13.31	13.45	16.47	2.48	1,373,502,500.00	12.07
JABAR	2007:4	54,340,000	18,670,000	46,120,000	18,670,000	46,120,000	119,130,000	13.00	13.01	16.13	1.82	1,476,415,700.00	12.39
JATENG	2001:1	10,477,908	3,781,884	2,534,373	3,781,884	2,534,373	16,794,165	17.90	16.86	18.99	2.01	252,253,257.06	15.02
JATENG	2001:2	13,528,499	4,270,847	2,809,933	4,270,847	2,809,933	20,609,279	18.45	17.04	19.22	1.29	349,796,981.78	16.97
JATENG	2001:3	14,452,897	4,293,119	3,228,201	4,293,119	3,228,201	21,974,217	19.06	17.22	19.41	1.89	370,527,837.28	16.86
JATENG	2001:4	14,404,267	4,151,773	3,696,237	4,151,773	3,696,237	22,252,277	19.19	17.90	19.85	5.07	311,285,880.49	13.99
JATENG	2002:1	14,416,686	3,594,074	3,806,833	3,594,074	3,806,833	21,817,593	19.35	18.03	20.11	2.33	369,484,448.26	16.94
JATENG	2002:2	15,314,172	3,769,171	4,209,507	3,769,171	4,209,507	23,292,850	19.08	18.11	20.28	3.52	363,832,058.53	15.62
JATENG	2002:3	16,944,840	3,658,947	4,523,744	3,658,947	4,523,744	25,127,531	18.74	18.11	20.10	2.39	414,682,287.08	16.50
JATENG	2002:4	17,755,782	3,887,459	4,873,029	3,887,459	4,873,029	26,516,270	18.25	17.82	20.21	5.09	356,833,642.67	13.46
JATENG	2003:1	18,059,694	3,757,536	5,065,876	3,757,536	5,065,876	26,883,106	18.08	17.85	20.12	4.23	381,801,171.86	14.20
JATENG	2003:2	17,835,169	4,177,052	5,443,551	4,177,052	5,443,551	27,455,772	17.41	17.43	19.73	1.15	459,143,432.08	16.72
JATENG	2003:3	19,618,440	4,264,528	6,015,001	4,264,528	6,015,001	29,898,069	16.07	16.53	19.33	3.07	410,245,529.14	13.72
JATENG	2003:4	20,573,122	4,775,756	6,632,560	4,775,756	6,632,560	31,981,438	15.07	15.68	18.69	4.5	364,966,878.02	11.41
JATENG	2004:1	20,629,992	5,462,572	7,168,588	5,462,572	7,168,588	33,261,152	14.61	15.12	18.11	1.02	479,895,025.40	14.43
JATENG	2004:2	21,449,532	5,944,058	7,942,823	5,944,058	7,942,823	35,336,413	14.10	14.64	17.51	0.38	515,110,404.11	14.58
JATENG	2004:3	23,020,566	5,136,826	8,819,819	5,136,826	8,819,819	36,977,211	13.80	14.33	17.03	2.28	457,188,003.87	12.36
JATENG	2004:4	24,189,951	5,119,894	10,100,917	5,119,894	10,100,917	39,410,762	13.41	14.05	16.57	2.27	474,231,518.56	12.03
JATENG	2005:1	24,593,971	5,074,412	11,120,761	5,074,412	11,120,761	40,789,144	13.31	13.78	16.33	1.02	537,268,251.62	13.17
JATENG	2005:2	25,845,323	4,671,176	13,000,490	4,671,176	13,000,490	43,516,989	13.36	13.65	16.04	2.87	492,689,168.85	11.32
JATENG	2005:3	27,299,538	5,558,946	13,764,613	5,558,946	13,764,613	46,523,097	14.51	14.47	16.27	-0.2	709,829,117.91	15.22
JATENG	2005:4	29,135,130	5,561,574	14,190,970	5,561,574	14,190,970	48,887,674	16.23	15.66	16.83	2.44	679,505,509.28	13.90
JATENG	2006:1	28,747,352	5,498,706	14,454,413	5,498,706	14,454,413	48,700,471	16.35	15.90	17.52	3.25	652,413,415.61	13.40
JATENG	2006:2	30,620,611	5,537,798	14,910,460	5,537,798	14,910,460	51,068,869	16.15	15.94	17.82	0.93	801,005,716.80	15.68
JATENG	2006:3	31,674,486	5,767,914	15,864,500	5,767,914	15,864,500	53,306,900	15.82	15.66	17.88	2.69	731,677,600.76	13.73
JATENG	2006:4	33,643,811	5,698,057	16,259,164	5,698,057	16,259,164	55,601,032	15.07	15.10	17.58	8.83	387,931,883.03	6.98
JATENG	2007:1	31,514,705	5,785,214	16,752,482	5,785,214	16,752,482	54,052,401	14.49	14.53	17.38	2.03	722,138,998.00	13.36
JATENG	2007:2	32,074,633	6,159,693	18,511,559	6,159,693	18,511,559	56,745,885	13.88	13.99	16.91	0.87	795,031,553.85	14.01
JATENG	2007:3	34,474,156	6,310,144	19,952,120	6,310,144	19,952,120	60,744,420	13.31	13.45	16.47	1.48	782,539,727.96	12.88
JATENG	2007:4	36,363,308	6,320,520	21,261,896	6,320,520	21,261,896	63,945,724	13.00	13.01	16.13	1.57	797,512,565.00	12.47
JATIM	2001:1	18,126,664	5,394,299	4,385,479	5,394,299	4,385,479	27,906,442	17.90	16.86	18.99	2.37	432,557,145.41	15.50
JATIM	2001:2	21,362,115	6,427,403	4,991,514	6,427,403	4,991,514	32,781,032	18.45	17.04	19.22	0.52	582,544,731.31	17.77
JATIM	2001:3	22,188,498	6,068,688	5,651,852	6,068,688	5,651,852	33,909,038	19.06	17.22	19.41	1.98	569,978,131.32	16.81
JATIM	2001:4	23,268,010	7,607,978	6,098,559	7,607,978	6,098,559	36,974,547	19.19	17.90	19.85	1.72	640,156,093.41	17.31
JATIM	2002:1	20,904,512	6,917,630	6,199,127	6,917,630	6,199,127	34,021,269	19.35	18.03	20.11	2.75	560,333,130.32	16.47
JATIM	2002:2	20,611,484	7,014,553	6,793,575	7,014,553	6,793,575	34,419,612	19.08	18.11	20.28	2.53	570,992,752.19	16.59

LAMPIRAN 4. PERHITUNGAN SUKU BUNGA KREDIT TERTIMBANG

Propinsi	Periode	Kredit			TOTAL	SB		INF	SB rata-rata tertimbang		
		KMK	KI	KK		KMK	KI			KK	
JATIM	2002:3	23,849,524	7,492,572	7,379,287	38,721,383	18.74	18.11	20.10	3.43	598,139,883.69	15.45
JATIM	2002:4	25,929,391	7,614,702	7,865,550	41,409,643	18.25	17.82	20.21	4.74	571,586,433.07	13.80
JATIM	2003:1	24,891,055	7,800,171	8,149,710	40,840,936	18.08	17.85	20.12	2.09	667,877,935.71	16.35
JATIM	2003:2	26,360,560	8,015,059	8,553,998	42,929,617	17.41	17.43	19.73	1.5	703,015,783.01	16.38
JATIM	2003:3	28,832,416	7,893,183	9,003,947	45,729,546	16.07	16.53	19.33	1.08	718,469,625.94	15.71
JATIM	2003:4	31,291,605	8,102,549	9,697,381	49,091,535	15.07	15.68	18.69	3.55	605,581,557.31	12.34
JATIM	2004:1	29,864,686	7,704,093	10,220,962	47,789,741	14.61	15.12	18.11	0.17	729,786,314.47	15.27
JATIM	2004:2	32,710,642	8,137,228	10,841,438	51,689,308	14.10	14.64	17.51	0.6	739,169,064.70	14.30
JATIM	2004:3	36,549,494	8,002,231	12,119,631	56,671,356	13.80	14.33	17.03	0.61	790,882,776.20	13.95
JATIM	2004:4	39,111,660	8,582,551	13,438,798	61,133,009	13.41	14.05	16.57	1.82	756,491,008.63	12.37
JATIM	2005:1	40,267,961	8,931,711	14,490,578	63,690,250	13.31	13.78	16.33	0.8	844,724,477.23	13.25
JATIM	2005:2	41,750,783	9,265,708	15,918,329	66,934,820	13.36	13.65	16.04	1.8	819,114,696.24	12.24
JATIM	2005:3	47,656,021	9,589,700	17,308,056	74,553,777	14.51	14.47	16.27	0.37	1,084,268,997.34	14.54
JATIM	2005:4	49,321,622	9,687,276	17,631,581	76,640,479	16.23	15.66	16.83	2.9	1,026,674,786.35	13.40
JATIM	2006:1	47,230,556	9,599,658	17,601,132	74,431,346	16.35	15.90	17.52	2.63	1,037,471,545.46	13.94
JATIM	2006:2	48,642,763	9,842,886	18,161,943	76,647,592	16.15	15.94	17.82	0.88	1,198,672,168.59	15.64
JATIM	2006:3	52,756,028	10,260,684	18,493,975	81,510,687	15.82	15.66	17.88	1.92	1,169,454,428.36	14.35
JATIM	2006:4	54,641,727	10,863,826	19,362,991	84,868,544	15.07	15.10	17.58	8.15	636,217,346.67	7.50
JATIM	2007:1	52,792,077	10,744,306	19,846,418	83,382,801	14.49	14.53	17.38	2.15	1,086,729,684.60	13.03
JATIM	2007:2	56,194,766	11,736,624	21,055,589	88,986,979	13.88	13.99	16.91	0.99	1,212,131,622.62	13.62
JATIM	2007:3	63,118,379	12,046,281	22,925,855	98,090,515	13.31	13.45	16.47	0.81	1,300,263,618.64	13.26
JATIM	2007:4	67,087,687	12,755,767	24,463,372	104,306,826	13.00	13.01	16.13	2.61	1,160,445,834.17	11.13